



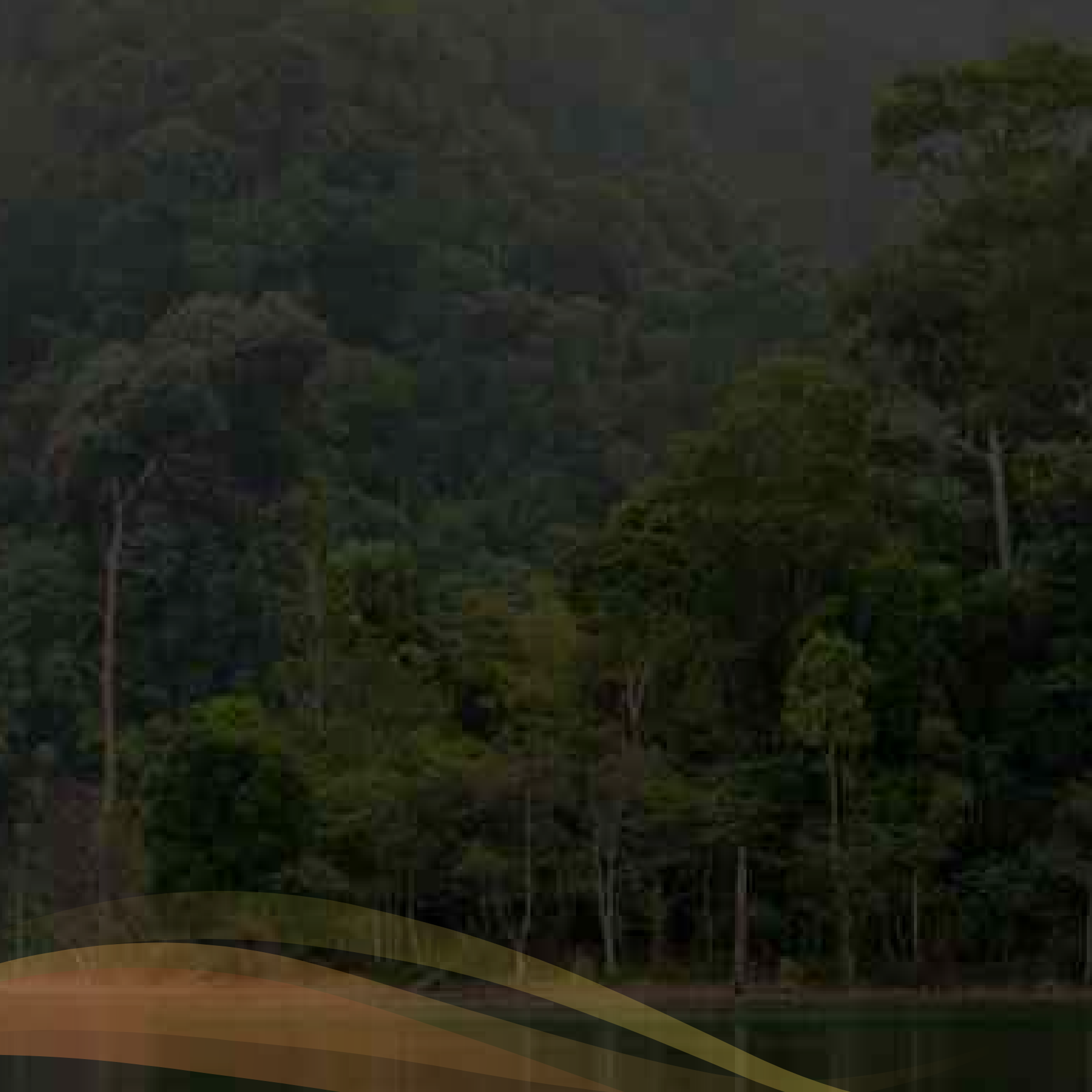
# LAPORAN KINERJA

# 20 25

## PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN

BADAN PENYULUHAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA  
KEMENTERIAN KEHUTANAN

© 2025 Pusat Penyuluhan Kehutanan





## **Laporan Kinerja 2025**

### **Pusat Penyuluhan Kehutanan**

Disusun dan diterbitkan oleh:

Pusat Penyuluhan Kehutanan

Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kementerian Kehutanan

Kantor : Gedung Manggala Wanabakti, Blok VII Lantai 8, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat 10270.

E-mail : [pusluh@kehutanan.go.id](mailto:pusluh@kehutanan.go.id).

Telepon: (021) – 57903075 Fax. 5720228

Penanggungjawab Kegiatan oleh:

Wahju Rudianto, S.P., M.Si.

Heri Suheri, S.Hut., M.Si.

Dian Dwi Hartati, S.Hut.

Naskah dan Tata Letak disiapkan oleh:

Pindi Nurjunifar

Materi dan Dokumentasi oleh:

Indri Puji Rianti, Feri Ichwansyah, Budi Budiman, Siwi Tri Utami,

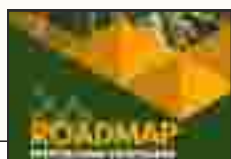
Nden Rissa Hadikusumah, Ida Gusti Nurul Nuryudaida, Ahdian Matlufi, Cucu Setiawati,

Danang Yuswantoro, Dimas Ramadhan, Pindi Nurjunifar, Henidar Dwi Tsara.

# Kaleidoskop

PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN 2025

## JANUARI



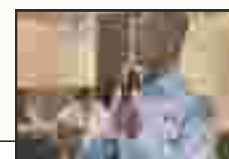
- Roadmap Penyuluhan Kehutanan.
- Penyusunan Rencana Pelaksanaan Kegiatan.
- Penyusunan draft Program Penyuluhan Kehutanan.

## FEBRUARI



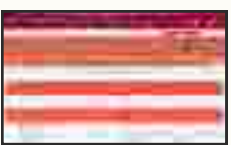
- Penyusunan Peraturan jabatan fungsional.
- Penyusunan materi penyuluhan dan jejak karbon.
- Persiapan Penilaian Wana Lestari.
- Kerjasama BP2SDM - APHI.

## MARET



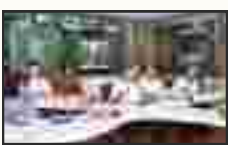
- Pembahasan perencanaan dan kebijakan strategis penyuluhan kehutanan.
- Persiapan uji kompetensi dan koordinasi kegiatan penyuluhan kehutanan.
- Pengembangan SIMLUH.
- Pembahasan instrumen pendampingan.

## APRIL



- Seleksi identifikasi calon penerima wanawiyata widyakarya dan KTH Mandiri.
- Verifikasi data BOP.
- Pembahasan program penyuluhan kehutanan.
- Pemantauan SPIP dan pematangan konsep kegiatan strategis penyuluhan kehutanan.

## MEI



- Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Online.

## JUNI

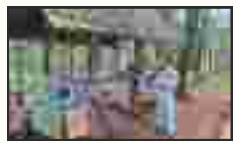


- Temu Teknis Aren Onsite (Sulawesi Utara).
- Bimtek Penginputan NTE KTH (Jawa Timur).
- Pemagangan KTH (Jawa Barat).

# Kaleidoskop

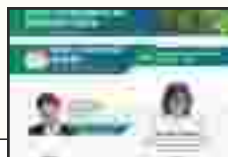
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN 2025

## JULI



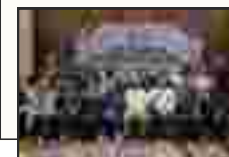
- Penilaian Wana Lestari yang dilakukan secara onsite dan offsite (online) ke 8 Provinsi yaitu Aceh, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Nusa Tenggara Timur.

## AGUSTUS



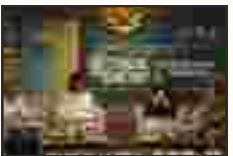
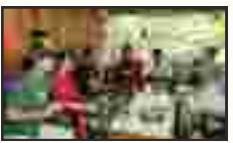
- Temu Karya Teladan Wana Lestari.
- Kegiatan Forestry Extension Zoominar.

## SEPTEMBER



- Rapat Koodinasi Pengembangan Tugas dan Fungsi Penyuluhan Balai PPSDM.
- Temu Penyuluh Kehutanan Provinsi Aceh.
- Fasilitasi Wanawiyata Widyakarya.
- Fasilitasi KTH Mandiri.

## OKTOBER



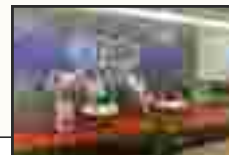
- Talkshow Penyuluhan Kehutanan (Sulawesi Tengah).
- Musyawarah Nasional.
- Foresta Showbiz (Jawa Barat).
- Pendampingan multiusaha kehutanan kelompok masyarakat.

## NOVEMBER



- Foresta Showbiz (Sulawesi Selatan).
- FGD penyusunan grand design ekoeduwisata (Sumatera Utara dan Jawa Barat).
- Evaluasi pendampingan ketahanan pangan program pangan agroforestri.
- Supervisi dan asistensi Non FAPE.
- Penerbitan Majalah Kenari.

## DESEMBER



- Penyusunan metode dan materi penyuluhan.
- Pemagangan pengelolaan pengelolaan ekoeduwisata.
- ToT Aren.
- Lokakarya penyusunan grand design ekoeduwisata.
- Monev FAPE.
- Foresta Showbiz.
- Talkshow Penyuluhan Kehutanan (Sumatera Barat dan Lampung).
- Kegiatan pendampingan ketahanan masyarakat.

A portrait of Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si., the Head of the Center for Forestry Extension. He is a middle-aged man with grey hair, wearing a light-colored short-sleeved shirt with a small emblem on the left chest. He is standing in front of a dense, green forest with tall trees. The background is slightly blurred, emphasizing the subject.

*Pengantar*  
*Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan*  
*Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.*

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Kinerja (LKj) Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Laporan Kinerja ini merupakan wujud pertanggungjawaban kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan kepada masyarakat serta para pemangku kepentingan, dengan tetap berpedoman pada ketentuan dalam Peraturan MenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam mendukung program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Capaian kinerja yang disajikan mencerminkan kontribusi nyata Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam mendukung Indikator Kinerja Program, khususnya peningkatan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan serta peningkatan jumlah Kelompok Tani Hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, air, dan energi.

Tahun 2025 merupakan periode yang penuh dinamika sekaligus momentum penting bagi Pusat Penyuluhan Kehutanan, seiring dengan transformasi organisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan. Perubahan struktur kelembagaan ini membawa implikasi terhadap arah kebijakan, tata kelola penyelenggaraan tugas, serta penyesuaian beberapa indikator kinerja yang harus dicapai oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Tahun 2025 juga memiliki makna strategis bagi Pusat Penyuluhan Kehutanan karena merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029. Oleh karena itu, capaian kinerja pada tahun ini menjadi landasan awal dan tolok ukur penting dalam pencapaian sasaran strategis dan target kinerja jangka menengah selama lima tahun ke depan. Penetapan target, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran kinerja Tahun 2025 diarahkan untuk memastikan ketercapaian target Renstra secara bertahap, terukur, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan tahun 2025 sebesar 100% dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 13.649.835.973,- atau 99,85%. Pusat Penyuluhan Kehutanan telah melaksanakan kegiatan dengan efektif dan efisien.

Atas tersusunnya laporan ini disampaikan ucapan terima kasih terhadap semua pihak yang telah berkontribusi dan membantu mulai dari persiapan sampai dengan selesainya laporan ini. Semoga laporan ini memberikan manfaat sebagai bahan evaluasi, acuan peningkatan kinerja, serta motivasi bagi seluruh pihak, khususnya dalam upaya penyuluhan dan pendampingan terhadap pembangunan kehutanan.



Jakarta, 17 Januari 2025  
Kepala Pusat,

Iwanju Rudianto, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19691016 199403 1 001



# Ringkasan EKSEKUTIF

Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan dapat diukur melalui pencapaian 2 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) dan sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Tahun 2025 dan Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Penyuluhan dengan Kepala Badan P2SDM. Capaian atas pelaksanaan program dan kegiatan Pusat Penyuluhan tahun 2025 disajikan dalam Laporan Kinerja (LKj) yang disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai melalui APBN. Laporan ini menggambarkan tingkat pencapaian sasaran strategis, indikator kinerja program (IKP), dan indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

Sebagaimana yang tertuang di dalam Rencana Kerja dan Perjanjian Kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2025, IKK yang dimiliki dan diperhitungkan Pusat Penyuluhan Kehutanan meliputi : (1) Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa; (2) Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan; dan 2 IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM, yaitu (3) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan; dan (4) Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air.

Hasil pengukuran rata-rata capaian kinerja Pusat Penyuluhan pada tahun 2025 yaitu sebesar 112,69% dengan capaian realisasi anggaran sebesar Rp.13.649.835.973,- atau 99,85% dari total pagu anggaran sebesar Rp.13.669.847.000,-. Adapun

rasio efektivitas capaian kinerja belum dapat dianalisis efektivitasnya secara year-on-year karena indikator indikator tersebut baru ditetapkan dan diukur pada tahun 2025, sedangkan rata-rata rasio efisiensi capaian kinerja sebesar 0,91 atau  $\leq 1$  maka pelaksanaan pencapaian kinerja termasuk dalam kategori efisien. Hal ini menunjukkan bahwa Pusat Penyuluhan Kehutanan telah efektif dan efisien dalam menggunakan sumber daya manusia dan anggaran untuk mencapai target kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan.

Kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2025 tidak terlepas dari kendala. Selain tahun 2025 merupakan tahun pertama Renstra 2025-2029, yang artinya masih di masa transisi pemisahan antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, tidak terlepas dari kendala anggaran bantuan masyarakat yang rendah sehingga memperkecil ruang gerak pengembangan KTH. Hal tersebut mengakibatkan banyaknya pembatasan kegiatan baik dari sisi kesiapan unsur penyelenggara maupun di sisi masyarakat dan pemerintah daerah dimana lokasi masyarakat berada. Meskipun demikian, Pusat Penyuluhan Kehutanan berkomitmen untuk terus menyempurnakan dan mengembangkan sistem akuntabilitas kinerja sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas KKN serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

# Potret Kinerja

PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN TAHUN 2025



Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan

Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan

Catatan:  
Indikator baru tersedia di Tahun 2026



25.196 Hektar

Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa

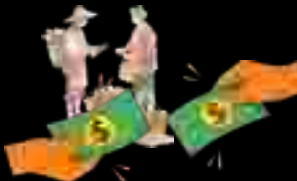
100,78%



4.400

Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan

100%



3.399,12 Miliar

Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan\*

100%



10 persen

Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air\*

100%

\*IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM



112,69%

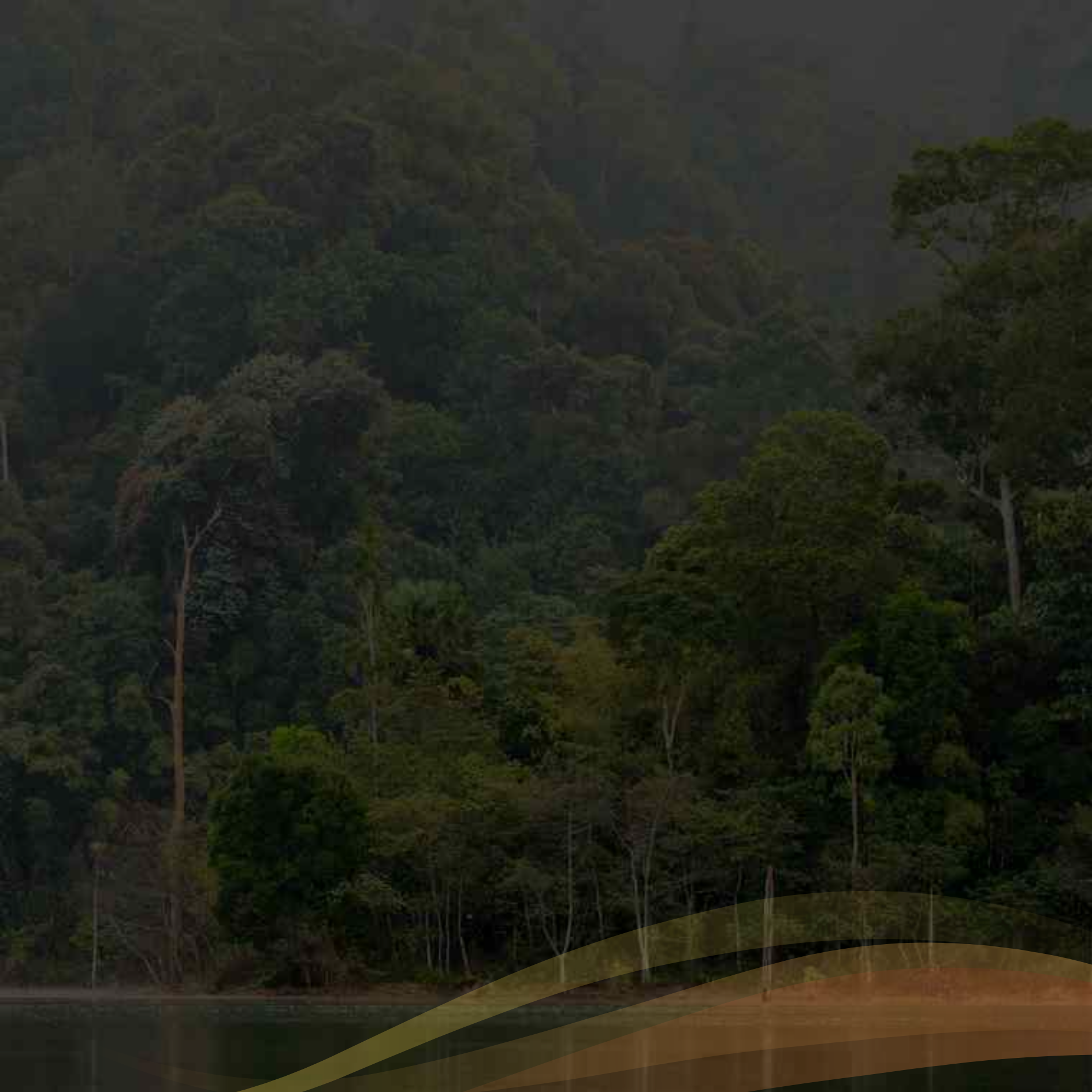
Rata-rata Capaian Kinerja Tahun 2025



99,85%

(Rp. 13.649.835.973,-)

Realisasi Anggaran



# Daftar Isi

<b>KALEIDOSKOP.....</b>	<b>II</b>
<b>PENGANTAR.....</b>	<b>IV</b>
<b>RINGKASAN EKSEKUTIF.....</b>	<b>VI</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>IX</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	2
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	3
1.3. Sumber Daya Manusia.....	5
1.4. Isu-Isu Strategis.....	8
<b>BAB 2 PERENCANAAN KINERJA.....</b>	<b>13</b>
2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029	14
2.2. Rencana Kerja 2025.....	18
2.3. Perjanjian Kinerja 2025.....	20
2.4. Perjalanan Pagu.....	22
2.5. Pohon Kinerja.....	24
<b>BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA.....</b>	<b>25</b>
3.1. Review atas Dokumen Perencanaan...	26
3.2. Review atas Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2025.....	28
3.3. Metode Pengukuran.....	30
3.4. Hasil Pengukuran Kinerja.....	31
3.5. Realisasi Anggaran.....	89
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>95</b>
Penutup.....	96
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>97</b>





# BAB 1

## *Pendahuluan*



## 1.1. Latar Belakang

Pembangunan sektor kehutanan di Indonesia saat ini menghadapi dinamika dan tantangan yang semakin kompleks, mulai dari perubahan iklim, deforestasi, degradasi lingkungan, tekanan terhadap keanekaragaman hayati, hingga tuntutan peningkatan produktivitas dan keberlanjutan pengelolaan hutan. Di tengah kompleksitas tersebut, keberadaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kehutanan yang kompeten, adaptif, profesional, dan mampu berpikir sistemik menjadi faktor kunci dalam memastikan terwujudnya tata kelola hutan yang efektif dan berkelanjutan. SDM yang menguasai aspek teknis, sosial, ekologis, serta mampu merespons dinamika kebijakan dan tantangan lapangan secara cepat merupakan elemen strategis untuk menjaga keseimbangan fungsi ekosistem hutan serta mengoptimalkan manfaat ekologis, ekonomi, dan sosial bagi masyarakat.

Selain kemampuan teknis pengelolaan hutan, pembangunan kehutanan modern juga menuntut hadirnya SDM yang memiliki kapasitas inovasi, literasi digital, kemampuan kolaborasi lintas sektor, serta kepekaan sosial dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Implementasi kebijakan strategis, seperti pemanfaatan teknologi digital, penguatan kelembagaan tapak, peningkatan nilai tambah hasil hutan, percepatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, hingga transformasi menuju ekonomi hijau, memerlukan peran SDM yang unggul, responsif, dan berorientasi hasil.

Penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Dalam rangka mendukung hal tersebut, setiap instansi pemerintah diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, serta pencapaian kinerja yang telah ditetapkan dalam perencanaan strategis dan perjanjian kinerja.

Tahun 2025 merupakan tahun yang strategis bagi Pusat Penyuluhan Kehutanan karena menjadi tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025–2029. Pada tahun ini, seluruh program, kegiatan, dan indikator kinerja mulai diimplementasikan sebagai dasar pencapaian target kinerja jangka menengah. Oleh karena itu, pelaksanaan dan capaian kinerja Tahun 2025 memiliki peran penting sebagai fondasi awal dalam memastikan konsistensi dan keberlanjutan pencapaian sasaran strategis selama periode Renstra.

Sebagai unit kerja di bawah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Penyuluhan Kehutanan memiliki peran strategis dalam mendukung pengelolaan hutan berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat melalui kegiatan penyuluhan kehutanan. Pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 diarahkan untuk mendukung Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen, serta berkontribusi terhadap pencapaian Indikator Kinerja Program berupa peningkatan nilai transaksi ekonomi Kelompok Tani Hutan dan peningkatan persentase Kelompok Tani Hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, air, dan energi.

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 disusun sebagai instrumen evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan, sekaligus sebagai media penyampaian informasi kinerja kepada para pemangku kepentingan. Laporan ini memuat gambaran perencanaan kinerja, capaian indikator kinerja, analisis keberhasilan dan tantangan, serta upaya perbaikan yang dilakukan sebagai bagian dari proses peningkatan kinerja secara berkelanjutan.

## 1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan mandat strategis untuk memperkuat kapasitas Sumber Daya Manusia penyuluhan kehutanan, Pusat Penyuluhan Kehutanan menjalankan peran penting sebagai motor penggerak pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, serta pemberdayaan masyarakat di seluruh Indonesia. Peran tersebut menuntut adanya tata kelola organisasi yang efektif, terarah, dan selaras dengan kebijakan nasional, khususnya dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan kehutanan yang berkelanjutan.

Sebagai unit kerja Eselon II yang bertanggung jawab menyiapkan SDM penyuluhan kehutanan yang kompeten, adaptif, dan berdaya saing, Pusat Penyuluhan Kehutanan dituntut untuk memastikan programnya berjalan dengan baik dan sesuai standar. Untuk itu, pelaksanaan tugas dan fungsi menjadi fondasi utama dalam mengarahkan program dan kegiatan agar mampu memberikan kontribusi terhadap pencapaian kinerja kementerian.

Seluruh pelaksanaan program dan kegiatan sepanjang tahun 2025 berpedoman pada tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 1 Tahun 2024 yang melekat pada Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagai dasar operasional organisasi. Tugas dan fungsi tersebut merupakan kerangka kerja yang memandu proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, hingga pelaporan, sehingga setiap capaian kinerja yang disajikan dalam laporan ini dapat mencerminkan tingkat akuntabilitas, efektivitas, serta keselarasan dengan arah kebijakan pembangunan nasional. Tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagai berikut:

### Tugas

Melaksanakan penyiapan penyusunan kebijakan teknis dan pelaksanaan penyuluhan kehutanan.

### Fungsi

1

Penyiapan penyusunan kebijakan teknis pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat;

2

Pelaksanaan pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat;

3

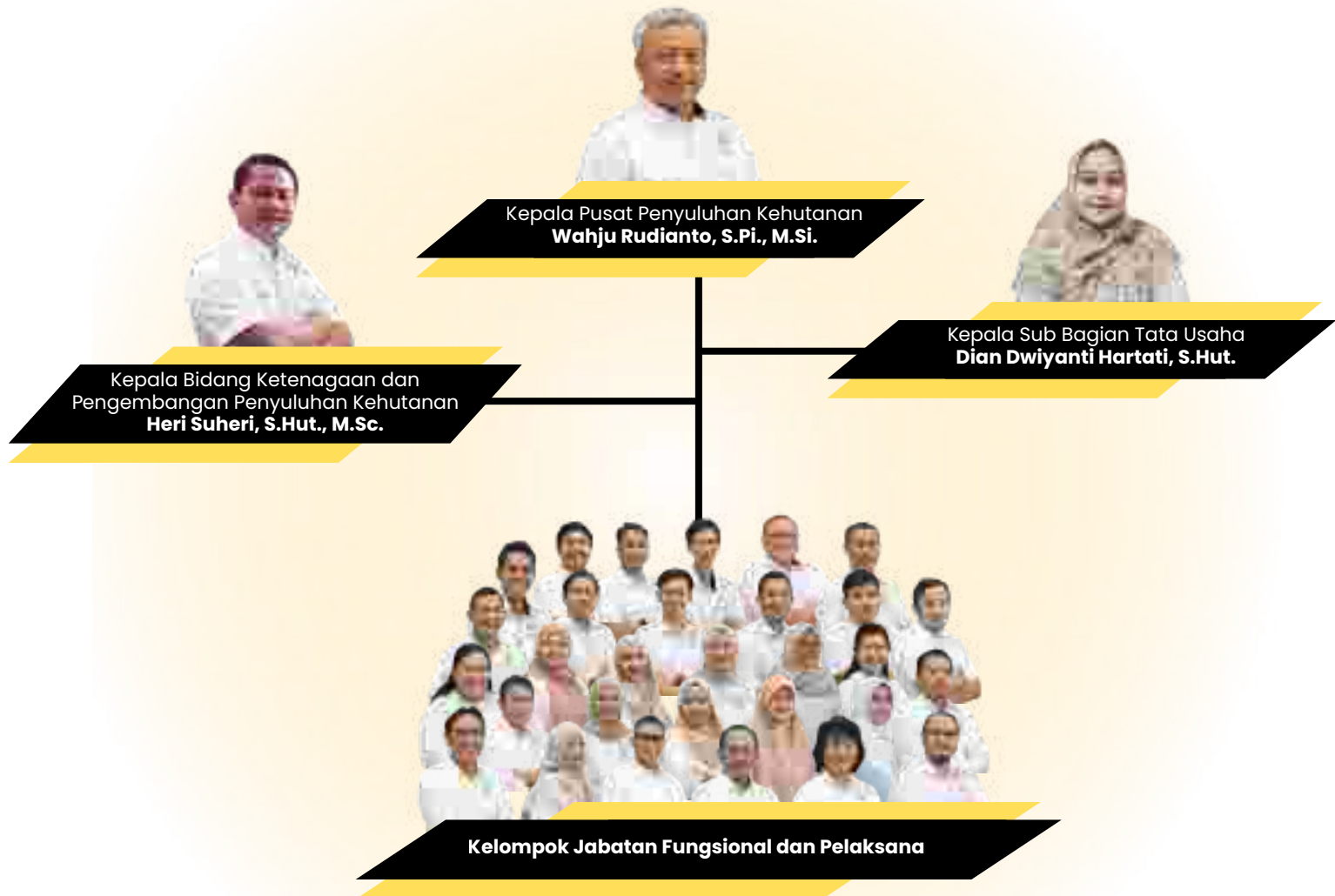
Pelaksanaan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan pengembangan penyuluhan kehutanan, ketenagaan penyuluhan kehutanan, dan pemberdayaan masyarakat; dan

4

Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga pusat.

# Struktur Organisasi

Untuk memastikan pelaksanaan tugas berjalan efektif dan selaras dengan tujuan organisasi, Pusat Penyuluhan Kehutanan yang berkedudukan sebagai Eselon II dikepalai oleh Kepala Pusat. Pusat Penyuluhan Kehutanan mempunyai tugas untuk melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan penyuluhan kehutanan yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Kepala Bidang Ketenagaan dan Pengembangan Penyuluhan Kehutanan serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha serta Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan struktur organisasi sebagaimana tergambar di bawah ini:



## 1.3. Sumber Daya Manusia

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai target kinerja, pada tahun 2025 Pusat Penyuluhan Kehutanan yang didukung oleh 37 orang pegawai yang terdiri dari 30 orang PNS dan 7 orang PPPK dengan sebaran sebagai berikut:

### Jenis Kelamin



21 Orang  
Laki-laki

16 Orang  
Perempuan

57 %

43 %

Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan jenis kelamin.

### Komposisi Jabatan

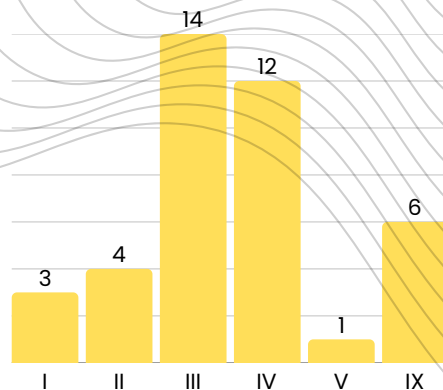
Fungsional Tertentu  
27

Non Struktural  
7

Struktural  
3

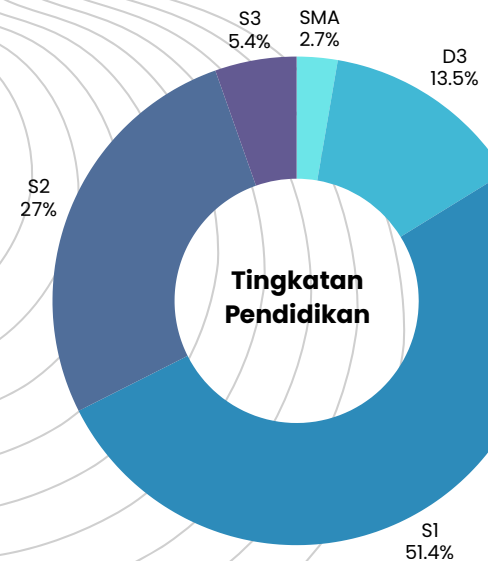
Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan Komposisi Jabatan

### Golongan



Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan Golongan

### Tingkatan Pendidikan



Jumlah SDM Pusat Penyuluhan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi, Pusat Penyuluhan Kehutanan menerapkan pengorganisasian kerja yang adaptif melalui pembentukan tim kerja di bawah Kepala Bidang. Pembentukan tim kerja tersebut dilakukan sebagai mekanisme operasional untuk mengelola kompleksitas dan keragaman substansi kegiatan penyuluhan kehutanan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan teknis, pendampingan Kelompok Tani Hutan, pengembangan sumber daya manusia, serta penguatan kelembagaan dan kemitraan. Untuk itu tim kerja pada Pusat Penyuluhan Kehutanan dibagi menjadi 3 yaitu: Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan, Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat, dan Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan. Dalam pelaksanaannya, tim kerja terdiri dari ketua dan anggota tim kerja.

Ketua tim kerja memiliki tugas:

1. Merencanakan dan melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai arahan Kepala Bidang dengan dukungan anggaran melalui DIPA Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM;
2. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas/pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuan tim kerja;
3. Melakukan konsultasi terkait pelaksanaan tugas/pekerjaan tim kerja dengan Kepala Bidang; dan
4. Memeriksa dan menyampaikan hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan kepada Kepala Bidang.

Anggota Tim kerja memiliki tugas sebagai berikut:

1. Melaksanakan tugas/pekerjaan sesuai kompetensi dan kemampuan yang dikoordinasikan oleh Kepala Bidang dan Koordinator
2. Melaksanakan koordinasi dengan baik kepada seluruh tim, Koordinator, maupun Kepala Bidang; dan
3. Menyampaikan hasil pelaksanaan tugas/pekerjaan kepada Kepala Bidang dan Koordinator.



## Tugas dan Tanggungjawab Tim Kerja

### **1 Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan**

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta monitoring, evaluasi dan pelaporan terkait ketenagaan penyuluhan kehutanan dan kelambagaan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan kehutanan;
2. Melaksanakan identifikasi dan pemetaan ketenagaan penyuluhan kehutanan;
3. Melaksanakan Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Aparatur;
4. Melaksanakan Temu Teknis Penyuluhan Kehutanan Non Aparatur;
5. Melakukan Pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Ketenagaan Penyuluhan Kehutanan; dan
6. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.

### **2 Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat**

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait kelembagaan masyarakat yang menjadi sasaran penyuluhan kehutanan;
2. Melakukan koordinasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran terkait pencapaian indikator Kinerja kegiatan jumlah KTH Mandiri dan Lembaga Pelatihan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya Masyarakat (LP2UKS) yang dibentuk dan dikembangkan;
3. Melakukan koordinasi rangkaian kegiatan penghitungan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH dengan Tim Kerja lingkup Pusat Penyuluhan Kehutanan;
4. Melakukan Pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Kelembagaan Masyarakat; dan
5. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.

### **3 Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan**

1. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan tugas, penyusunan NSPK, serta monitoring, evaluasi, dan pelaporan terkait pengembangan penyuluhan kehutanan;
2. Melaksanakan operasionalisasi sistem aplikasi yang dikembangkan Pusat Penyuluhan (SIMLUH dan SIMPING) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan lingkup Pusat Penyuluhan Kehutanan;
3. Melaksanakan penyusunan metode dan materi penyuluhan;
4. Melaksanakan penilaian Lomba Wana Lestari;
5. Menyelenggarakan Temu Karya Wana Lestari;
6. Melakukan penyusunan Majalah Kenari;
7. Melakukan koordinasi penyaluran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) dengan koordinator Penyuluh Kehutanan Ahli pada Pusat Penyuluhan Kehutanan;
8. Melakukan pengelolaan anggaran pada Tim Kerja Pengembangan Penyuluhan Kehutanan; dan
9. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan pimpinan baik secara langsung maupun disposisi.

## 1.4. Isu-Isu Strategis

Pelaksanaan tugas dan fungsi Pusat Penyuluhan Kehutanan pada Tahun 2025, sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis 2025–2029, dihadapkan pada berbagai isu strategis yang mempengaruhi pencapaian kinerja program dan kegiatan. Isu-isu strategis tersebut menjadi perhatian utama dalam upaya peningkatan efektivitas penyuluhan kehutanan dan pencapaian indikator kinerja secara berkelanjutan.

### **1 Keterbatasan dan Sebaran Sumber Daya Penyuluh Kehutanan**

Ketersediaan dan sebaran penyuluh kehutanan belum sepenuhnya sebanding dengan luas wilayah pendampingan dan jumlah Kelompok Tani Hutan yang harus dibina. Kondisi ini menuntut optimalisasi peran penyuluh, penguatan kapasitas, serta pemanfaatan pendekatan kerja kolaboratif untuk menjangkau wilayah pendampingan yang luas dan beragam.

### **2 Penguatan Kapasitas dan Kemandirian Kelompok Tani Hutan**

Tingkat kapasitas dan kemandirian Kelompok Tani Hutan masih bervariasi antarwilayah. Sebagian KTH telah mampu menghasilkan komoditi kehutanan secara berkelanjutan, namun sebagian lainnya masih memerlukan pendampingan intensif, khususnya dalam pengelolaan usaha, akses pasar, dan peningkatan nilai tambah produk.

### **3 Integrasi Penyuluhan dengan Isu Ketahanan Pangan, Air, dan Energi**

Penguatan peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi berbasis perhutanan sosial dan agroforestry memerlukan pendekatan lintas sektor dan sinergi kebijakan. Integrasi program dan kegiatan dengan sektor terkait masih perlu ditingkatkan agar kontribusi penyuluhan kehutanan terhadap isu strategis nasional semakin optimal.

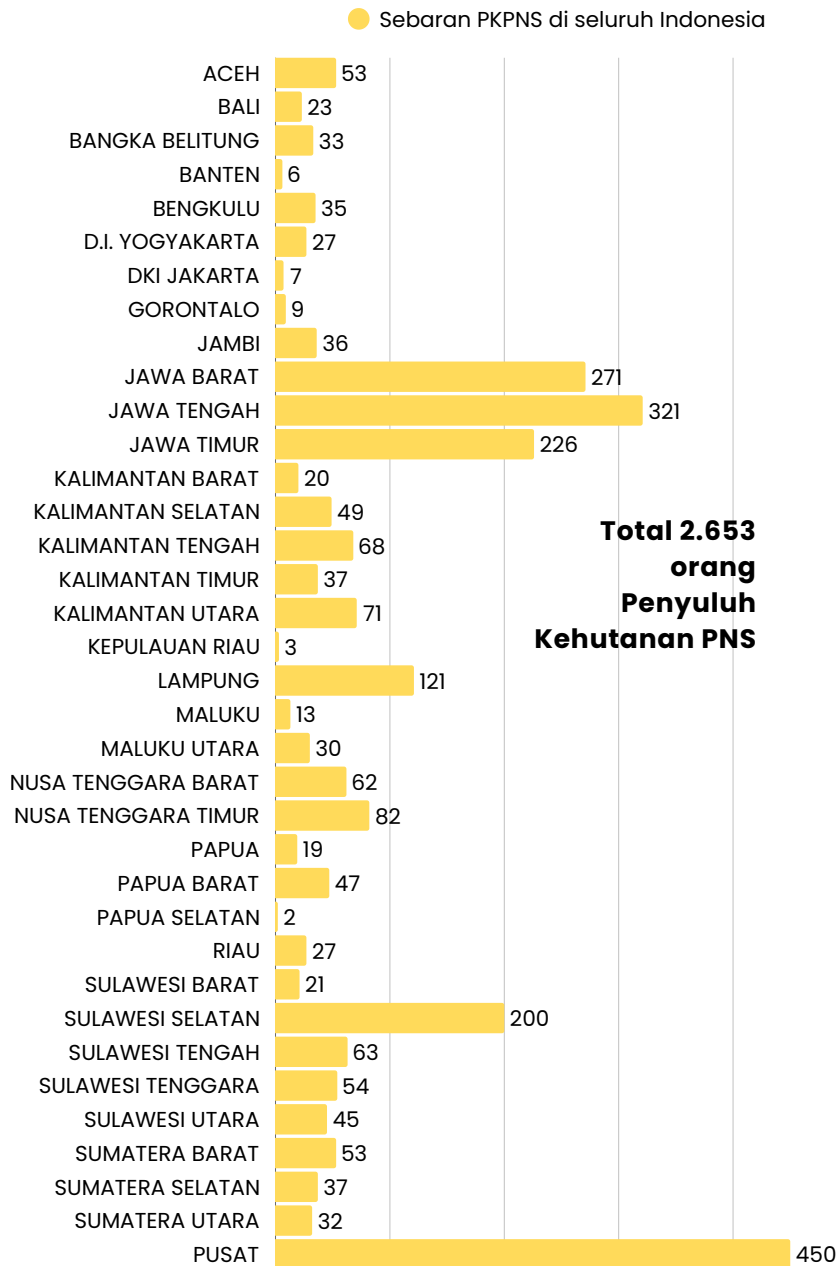
### **4 Kualitas Data dan Sistem Informasi Penyuluhan**

Ketersediaan data yang akurat, mutakhir, dan terintegrasi menjadi faktor penting dalam pengukuran kinerja dan pengambilan kebijakan. Tantangan masih ditemui dalam hal konsistensi data Kelompok Tani Hutan, produksi hasil hutan, serta luasan pendampingan, sehingga diperlukan penguatan sistem informasi dan mekanisme pelaporan kinerja melalui SIMLUH.

### **5 Penguatan Koordinasi dan Sinergi Kelembagaan**

Pelaksanaan penyuluhan kehutanan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat, daerah, maupun UPT. Tantangan koordinasi dan sinergi kelembagaan masih perlu terus ditingkatkan agar perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan penyuluhan dapat berjalan lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Dengan adanya pengembangan peran Balai P2SDM diarahkan untuk memperkuat fungsi penyuluhan kehutanan secara terintegrasi, baik melalui peningkatan kapasitas kelembagaan, penguatan sumber daya manusia, maupun optimalisasi tata kelola dan sistem kerja. Balai P2SDM diharapkan mampu menjadi simpul koordinasi penyuluhan di wilayah kerjanya, dengan melaksanakan fasilitasi pendampingan Kelompok Tani Hutan, pengembangan model penyuluhan kehutanan berbasis kebutuhan lokal, serta dukungan terhadap peningkatan kinerja penyuluh kehutanan di daerah.

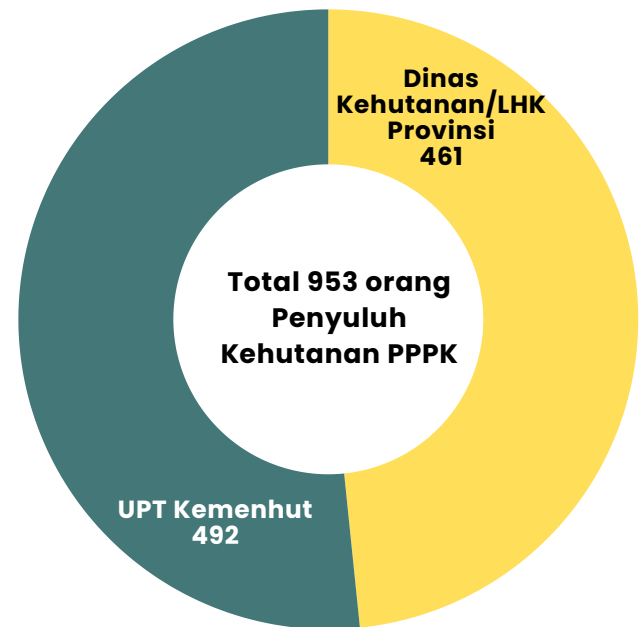
Pusat Penyuluhan Kehutanan berperan sebagai unit pembina penyelenggaraan penyuluhan kehutanan yang memiliki tanggung jawab dalam penguatan kapasitas, koordinasi, dan pengendalian kinerja penyuluh kehutanan, baik Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM), maupun Penyuluh Kehutanan Swasta. Peran pembinaan ini dilaksanakan secara sistematis untuk memastikan keselarasan pelaksanaan penyuluhan kehutanan dengan kebijakan nasional serta mendukung pencapaian target pembangunan kehutanan.

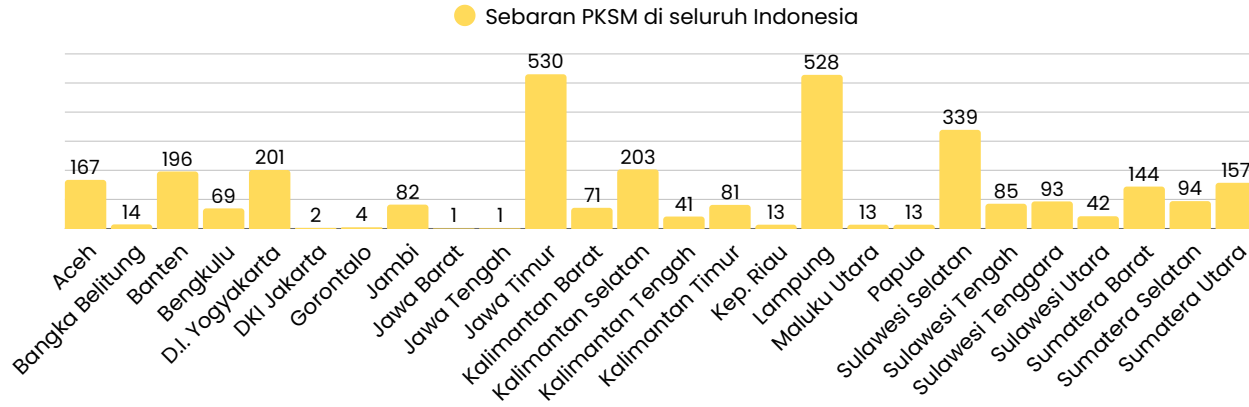


### Penyuluh Kehutanan

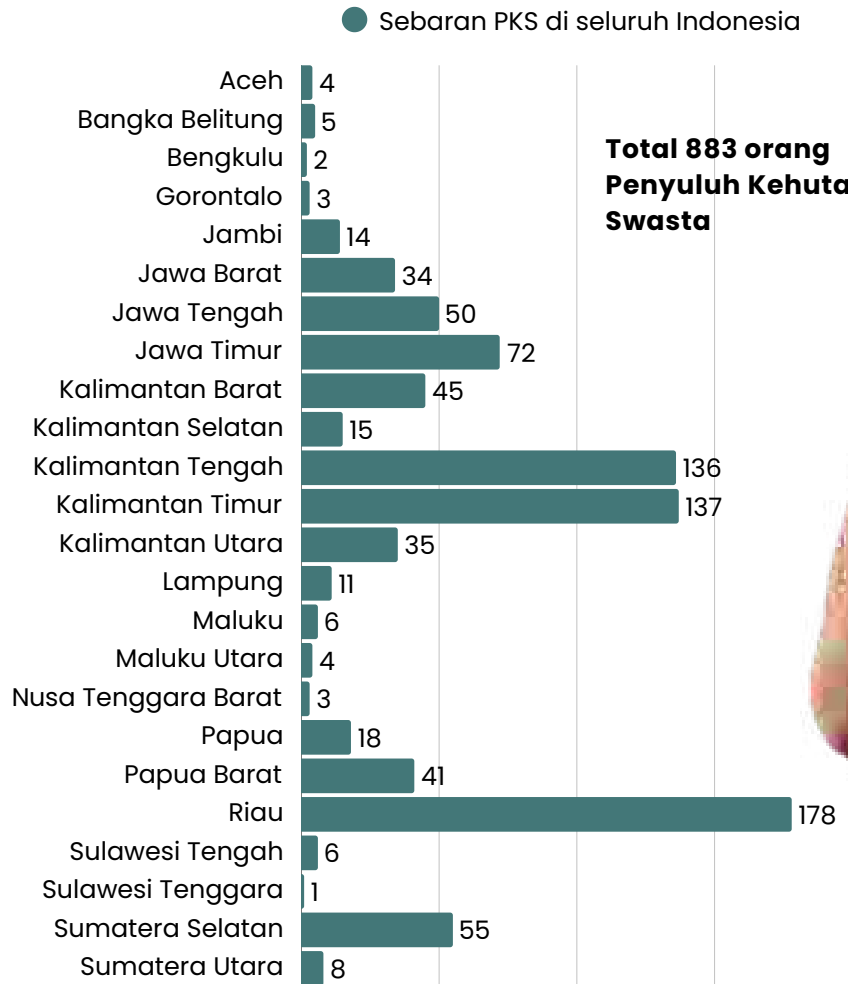
**Penyuluh Kehutanan ASN** merupakan ASN (PNS dan PPPK) yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan kehutanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Jumlah Penyuluh Kehutanan di Indonesia sebanyak 9.933 orang terdiri dari :





**Total  
5.444 orang  
Penyuluh  
Kehutanan  
Swadaya  
Masyarakat**



**Total 883 orang  
Penyuluh Kehutanan  
Swasta**



## **KTH Mandiri**

**KTH Mandiri** adalah KTH kelas utama yang memiliki ciri kelembagaannya kuat, kawasan lestari, dan usahanya berkembang.

Tujuan fasilitasi pembentukan KTH mandiri yaitu memberikan stimulan bagi daerah dalam upaya meningkatkan kapasitas Kelompok Tani Hutan melalui pematapan kelola kelembagaan, kawasan, dan usaha sehingga dapat meningkatkan kelas KTH dari Madya menjadi Utama.

Fasilitasi di prioritaskan untuk :

- o Penambahan sarana peningkatan kualitas dan kuantitas usaha produksi
- o Penambahan sarana kualitas dan kuantitas paska panen
- o Peningkatan kualitas dan kapasitas pengelolaan usaha

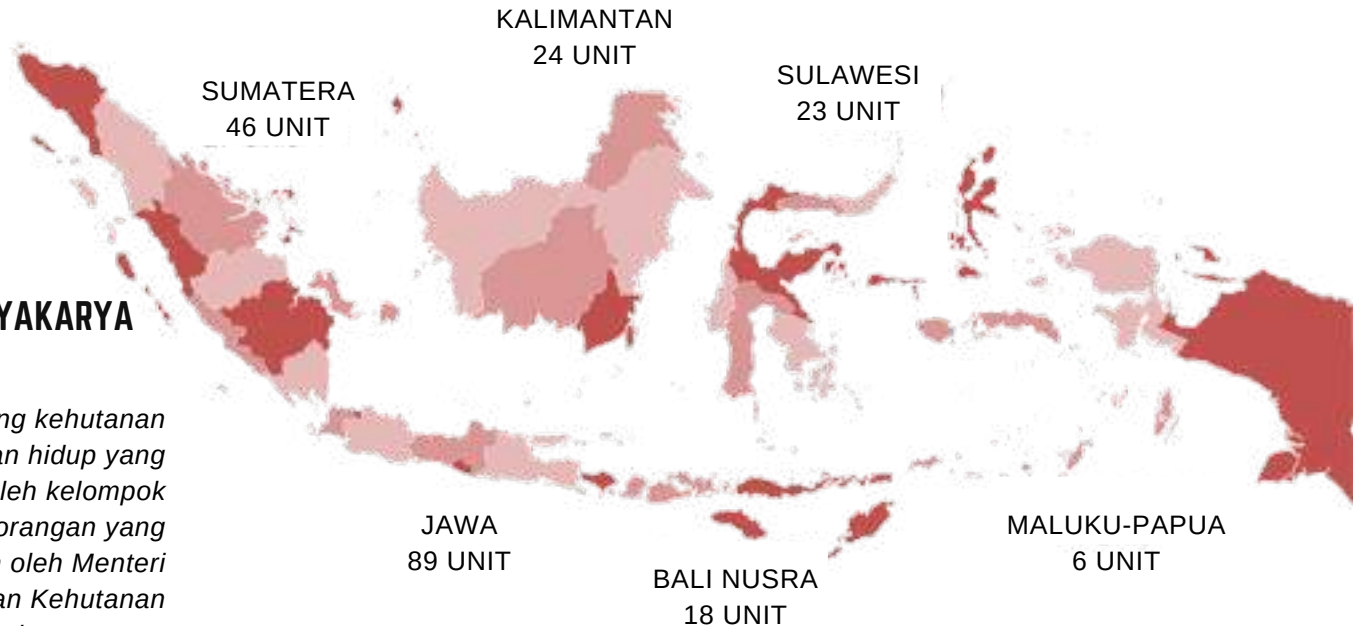
**Terdapat 398 KTH Penerima Fasilitasi KTH Mandiri  
Tahun 2020 - 2025  
Tersebar di 31 Provinsi  
Pulau Jawa 50,50%  
Luar Jawa 49,50%**



## **Wanawiyata Widyakarya/ Lembaga Pelatihan dan Pemagangan Usaha Kehutanan Swadaya (LP2UKS)**

**206 UNIT**  
**WANAWIYATA WIDYAKARYA**

“ model usaha bidang kehutanan dan/atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya ”



### **Pembentukan Wanawiyata Widyakarya**

Fasilitasi diprioritaskan untuk :

- o Pengembangan usaha
- o Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan & pemagangan
- o Peningkatan kapasitas SDM Wanawiyata Widyakarya

Kriteria :

- o Memiliki penetapan sebagai Wanawiyata Widyakarya
- o Memiliki Komoditas Usaha atau rencana pengembangan usaha berdasarkan Prioritas Kinerja BP2SDM atau kebijakan lain terkait prioritaskinerja Kementerian LHK

### **Pengembangan Wanawiyata Widyakarya**

Fasilitasi diprioritaskan untuk :

- o Pengembangan usaha Komoditas kelompok
- o Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendukung Pelatihan dan pemagangan
- o Peningkatan kapasitas SDM Wanawiyata Widyakarya.

Kriteria :

- o KTH paling rendah kelas Madya
- o Perorangan/ Kelompok Masyarakat, memiliki legalitas sebagai WNI.
- o Memenuhi persyaratan sebagai Wanawiyata Widyakarya

# BAB 2

## *Perencanaan Kinerja*



## 2.1. Rencana Strategis Tahun 2025-2029

### Visi dan Misi Pusat Penyuluhan Kehutanan

SDM kehutanan yang berkualitas merupakan pondasi utama untuk menghadapi dinamika pengelolaan hutan. Untuk membangun SDM yang berkualitas ini diperlukan SDM yang berintegritas untuk memastikan kewenangan dijalankan secara bertanggung jawab, memiliki jiwa inovatif dalam menjawab tantangan kehutanan yang semakin kompleks, serta dapat berkolaborasi dengan berbagai stakeholder dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Melalui karakter SDM tersebut, diharapkan SDM kehutanan dapat menjadi motor penggerak ekonomi hijau, yang tidak hanya menjaga kelestarian hutan, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi dan sosial.

Berdasarkan hal tersebut, sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Nomor 32 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Tahun 2025 – 2029, Pusat Penyuluhan Kehutanan menetapkan visi yaitu: "Mewujudkan Penyuluhan Kehutanan yang HEBAT (Handal, Empati, Berani, dan Tangguh) untuk mendukung pengelolaan hutan lestari, penguatan ketahanan pangan, air, dan energi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat".

Dalam mewujudkan visi tersebut, misi Pusat Penyuluhan Kehutanan disusun dengan mengacu juga pada Asta Cita Presiden serta berdasarkan tugas dan fungsi. Misi Pusat Penyuluhan Kehutanan adalah:

1. **Meningkatkan kualitas dan profesionalisme penyelenggaraan penyuluhan kehutanan** melalui penguatan kompetensi penyuluh, penerapan metode penyuluhan yang adaptif, serta pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.
2. **Memperkuat peran penyuluhan kehutanan dalam mendukung pengelolaan hutan lestari** melalui pendampingan Kelompok Tani Hutan secara berkelanjutan dan berbasis kebutuhan lokal.
3. **Mendorong pengembangan usaha kehutanan masyarakat yang produktif dan berdaya saing** guna meningkatkan nilai tambah, nilai transaksi ekonomi, dan kesejahteraan Kelompok Tani Hutan.
4. **Mengintegrasikan kegiatan penyuluhan kehutanan dengan upaya penguatan ketahanan pangan, air, dan energi** melalui pengembangan agroforestry, pemanfaatan hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, dan pengelolaan sumber daya hutan berbasis masyarakat.
5. **Memperkuat kelembagaan, kemitraan, dan sinergi lintas sektor** dalam penyelenggaraan penyuluhan kehutanan untuk mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.
6. **Meningkatkan tata kelola penyuluhan kehutanan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi hasil** melalui perencanaan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kinerja yang terintegrasi.



## Sasaran Program Pusat Penyuluhan Kehutanan

Berdasarkan Rencana Strategis Kementerian Kehutanan dan Badan P2SDM Tahun 2025-2029, Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung 2 (dua) Program dari 3 (tiga) program, yaitu:

### **1 Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan**

Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung program ini melalui kegiatan Peningkatan Penyuluhan dengan sasaran Peningkatan nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan. Program ini diarahkan untuk meningkatkan dan mempertahankan kelestarian dengan menghadirkan tapak hutan yang mampu membantu memulihkan ekonomi nasional dan ketahanan pangan. Sasaran program pengelolaan hutan berkelanjutan pada Badan P2SDM adalah SDM Kehutanan yang inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan.

### **2 Program Dukungan Manajemen**

Program Dukungan Manajemen ini diselenggarakan oleh seluruh Satker pada Badan P2SDM. Sasaran program dukungan manajemen yaitu meningkatnya kualitas reformasi birokrasi lingkup Kementerian Kehutanan serta Penguatan pengawasan internal Kementerian yang profesional dan berintegritas. Program ini diarahkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan transformasi pelayanan publik sebagai upaya peningkatan reformasi birokrasi dalam bidang kehutanan. Pada program ini, Badan P2SDM khususnya Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung pencapaian sasaran program dan indikator sasaran Kementerian melalui kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan P2SDM khususnya pada pencapaian Nilai Maturitas SPIP dan Nilai SAKIP.

## Cascading dan Crosscutting Kinerja

Sebagai penjabaran dan penyelarasan Sasaran Strategis Kementerian Kehutanan dengan Sasaran Program dan Sasaran Kegiatan Badan P2SDM yang menjadi kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan, maka disusunlah *Cascading* Peta Arsitektur Kinerja untuk mengetahui konsistensi antara rumusan Sasaran dan Indikator Kinerja Kementerian Kehutanan serta Sasaran dan Indikator Kinerja Badan P2SDM dengan Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagaimana gambar berikut:

No	Sasaran Strategis/ Sasaran Program/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)/ Indikator Kinerja Program (IKP) / Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Unit In Charge (UIC)	Crosscutting Stakeholder
T2-SS2	Meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKSS) Nilai Transaksi Ekonomi Masyarakat Hutan	Kemenhut	Kemenkop, Bappenas, Kementan, Kemendag, Kemendes, BUMN, Kemenkeu
	SP.2 SDM Kehutanan yang Inovatif, berkualitas dan berdaya saing dalam mendukung peran hutan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan	(IKP.1) Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Badan P2SDM	Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Perusahaan PBPH, Pemerintah daerah, BPDH
	SKI Meningkatkan penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	(IKK.1) Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, Koperasi/UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, <i>Offtaker</i> , LSM/NGO, BPDH, Perusahaan PBPH, Perbankan
		(IKK.2) Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, <i>Offtaker</i> , LSM/NGO, BPDH, Perusahaan PBPH, Perbankan
		(IKK.3) Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, P2SEM/ Pusbangsosek, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, <i>Offtaker</i> , LSM/NGO, BPDH, Perusahaan PBPH, Perbankan
		(IKP.2) Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air	Badan P2SDM	Ditjen PSKL, Ditjen KSDAE, Ditjen PHL, Perusahaan PBPH, Pemerintah daerah, BPDH
		(IKK.4) Kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	Pusluh	Dit. PKPS, Dit. PUPS, Dit. PPS, Dit. KK, Dit. PUPH, Dit. IPHH, UMKM, UPT Kemenhut, Dinas LHK/ Kehutanan provinsi, Dinas Koperasi/ Perdagangan/ Pertanian Provinsi, <i>Offtaker</i> , LSM/NGO, BPDH, Perusahaan PBPH, Perbankan

## Target Indikator Kinerja Kegiatan 2025–2029

Dalam pelaksanaan tugasnya, Pusat Penyuluhan Kehutanan mendukung 2 (dua) Kegiatan Utama yang ada di Badan P2SDM dengan penjabaran selanjutnya pada 4 Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) merupakan ukuran keberhasilan yang akan dicapai Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan dan capaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Program (IKP)/ Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
<b>IKP 1</b> Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan	Miliar Rupiah	700	800	900	1.000	1.100
<b>IKK 1</b> Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan	Ton	(Indikator Baru)	20.000	30.000	35.000	40.000
<b>IKK 2</b> Produksi Hasil Hutan Kayu dari Kelompok Tani Hutan	M3	(Indikator Baru)	30.000	40.000	45.000	50.000
<b>IKK 3</b> Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa	Hetare	(Indikator Baru)	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>IKP 2</b> Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air	Persen	10	11	12	13	14
<b>IKK 4</b> Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	Kelompok	4.400	4.400	5.320	5.840	6.400

## 2.2. Rencana Kerja 2025

Tahun 2025 menjadi tahun yang memiliki karakteristik berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya karena merupakan awal pelaksanaan periode pembangunan jangka menengah Tahun 2025–2029 yang disusun dalam konteks transisi pemerintahan nasional sekaligus perubahan organisasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menjadi Kementerian Kehutanan. Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada penataan kelembagaan, tetapi juga menuntut penyesuaian mendasar terhadap arah kebijakan, prioritas program, serta kerangka indikator kinerja agar selaras dengan visi, misi, dan program prioritas Presiden baru. Dalam kondisi demikian, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 dilakukan secara dinamis dan adaptif, di mana usulan indikator dan target pada tahap awal masih mengacu pada kebijakan pemerintahan sebelumnya dengan tetap menginternalisasi secara bertahap arah kebijakan nasional yang baru. Perumusan dan penyempurnaan indikator kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan terus dilakukan hingga menjelang akhir Tahun 2025, hingga pada akhirnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan Nomor Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 31 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025.

Dokumen Rencana Kerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 merupakan penjabaran operasional dari Rencana Kerja Kementerian Kehutanan Tahun 2025 yang memuat rincian kegiatan, sasaran serta strategi pelaksanaan yang akan dilaksanakan oleh Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam rangka mendukung pencapaian target pembangunan kehutanan secara berkelanjutan

Penyusunan target kinerja dalam dokumen ini telah mempertimbangkan secara komprehensif capaian indikator kinerja Tahun 2024 sebagai baseline, kapasitas dan kemampuan satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan, inovasi metode pelaksanaan kegiatan yang lebih efektif dan efisien, serta kesesuaian dengan alokasi anggaran yang tersedia. Adapun target kinerja pada Indikator Kinerja Program Tahun 2025 berdasarkan dokumen rencana kerja sebagai berikut:

### Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2025



**Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa sebesar 25.000 Hektare**

**Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan sebanyak 4.400 Kelompok**



## Alokasi Anggaran Tahun 2025

Dalam rangka mendukung pembiayaan kegiatan penyelenggaraan Peningkatan Penyuluhan dan Dukungan Manajemen Satker pada Pusat Penyuluhan Badan P2SDM, pada Tahun 2025 Pusat Penyuluhan Kehutanan didukung alokasi pagu anggaran awal sebesar Rp. 16.163.923.000,-. Seiring perjalanan selama tahun 2025, pada bulan Februari 2025 terdapat Efisiensi sebesar Rp.3.930.628.000,- (yang masih diblokir) dan pergeseran anggaran penyuluhan sebesar Rp.700.000.000,- dari Pusat Penyuluhan Kehutanan ke anggaran Balai P2SDM. Kemudian pada bulan April 2025, terdapat penghapusan blokir Efisiensi dan penambahan ABT pada program PHB sebesar Rp.1.800.000.000,- dan Dukman Rp.388.252.000,. Serta pada bulan September 2025 terdapat pergeseran pagu belanja operasional lingkup Kantor Pusat yang mengurangi anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan sebesar Rp.51.700.000,-. Sehingga pagu anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan pada akhir TA 2025 adalah sebagai berikut:



**PAGU ANGGARAN AKHIR TA. 2025**  
**Rp. 13.669.847.000,-**

### Komposisi Anggaran per Program

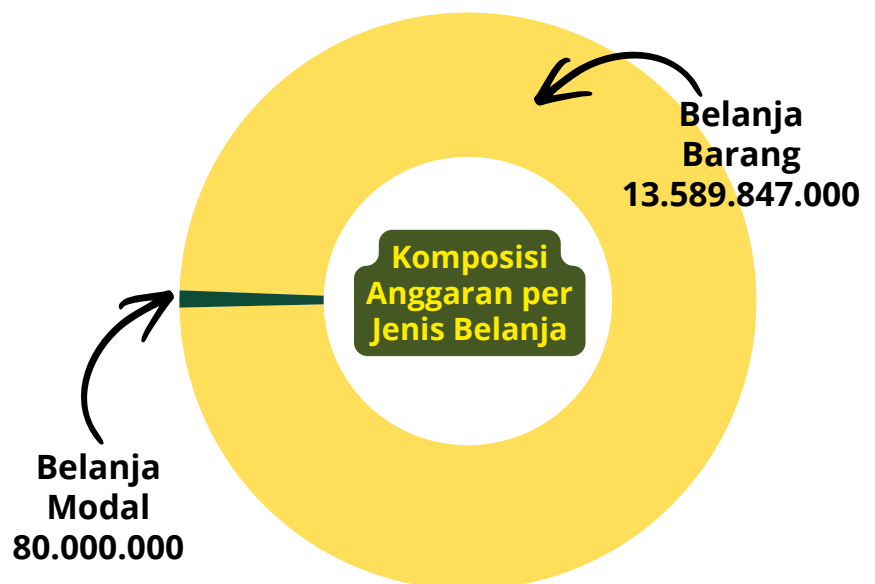
**Program Dukman** 8,293,203,000

**Program PHB** 5,376,644,000

### Komposisi Anggaran per Sumber Dana

**RM** 11,669,847,000

**PNP** 2,000,000,000



## 2.3. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/ kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja. Penyusunan PK mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja. Penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2025 lingkup Kementerian Kehutanan dilakukan penyesuaian dengan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang membagi kinerja dalam empat perspektif yaitu *Stakeholder Perspective*, *Customer Perspective*, *Internal Process Perspective* dan *Learning & Growth*. Dalam hal pengungkapan capaian kinerja pada Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 berfokus pada indikator yang diperjanjikan dalam *Stakeholder Perspective* yang terdiri dari 6 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana tabel berikut.

### Indikator Kinerja *Stakeholder Perspective* Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025

Stakeholder Perspective	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025
Meningkatnya penyuluhan kehutanan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	1.1 Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-
	1.2 Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-
	1.3 Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa	25.000 Hektar
	1.4 Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	4.400 Kelompok
	1.5 Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan*	Rp 700 Miliar
	1.6 Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air*	10 Persen

\*IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM

### Indikator Kinerja *Customer Perspective* Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025

Customer Perspective	Indikator / Rincian Output	Target 2025
Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan dalam mendukung kemandirian desa tepi hutan	2.1 Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan HHBK <b>Catatan : baru tersedia di Tahun 2026</b>	-
	2.2 Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Kayu <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-
	2.3 Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang meningkat kapasitasnya	1.250 Orang
	2.4 Peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)	20 Kelompok Masyarakat

### Indikator Kinerja *Internal Process, Learning and Growth* Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025

Internal Process, Learning and Growth	Indikator	Target 2025
Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Badan P2SDM yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	3.1 Nilai Maturitas SPIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	3,30 poin
Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Badan P2SDM	4.1 Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	72 poin
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkup Badan P2SDM	5.1 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan	82,5 poin

## 2.4. Perjalanan Pagu

Pagu anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun Anggaran 2025 ditetapkan sebagai bagian dari alokasi anggaran Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) untuk mendukung pelaksanaan Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dan Program Dukungan Manajemen. Penetapan pagu awal tersebut disusun berdasarkan arah kebijakan pembangunan kehutanan, prioritas nasional, serta sasaran strategis yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025–2029.

Sebagai tahun pertama pelaksanaan Renstra 2025–2029, proses penganggaran Tahun 2025 mengalami dinamika penyesuaian kebijakan fiskal dan penajaman program. Dalam pelaksanaannya, sebagian pagu anggaran program teknis Pusat Penyuluhan Kehutanan masih dikenakan blokir oleh Kementerian Keuangan sebagai bagian dari kebijakan pengendalian belanja negara dan penajaman kualitas perencanaan keuangan pada saat itu. Pemblokiran tersebut dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, dan pencapaian outcome program sesuai dengan agenda pembangunan nasional.

Seiring dengan berjalannya tahun anggaran, Pusat Penyuluhan Kehutanan melakukan langkah-langkah penyempurnaan perencanaan melalui penajaman kegiatan, penyesuaian target kinerja, serta penyelarasan dokumen perencanaan dan penganggaran. Pada Tahun 2025 Pusat Penyuluhan Kehutanan melakukan beberapa kali revisi anggaran dalam rangka penyelarasan ketercapaian output. Dengan besaran Pagu awal Rp.16.163.923.000,- pagu akhir sebesar Rp. 13.669.847.000,-.

Perubahan pagu anggaran yang terjadi selama Tahun Anggaran 2025 juga dipengaruhi oleh kebijakan internal dan hasil evaluasi perencanaan, sehingga dilakukan penyesuaian alokasi anggaran guna mendukung kegiatan prioritas. Dalam kondisi keterbatasan anggaran yang tersedia, Pusat Penyuluhan Kehutanan memfokuskan pelaksanaan kegiatan pada aktivitas yang memiliki kontribusi signifikan terhadap peningkatan kinerja penyuluhan kehutanan, khususnya dalam pendampingan Kelompok Tani Hutan, penguatan kapasitas penyuluh, dan dukungan terhadap pengelolaan hutan berkelanjutan.

Dengan demikian, perjalanan pagu anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 mencerminkan upaya adaptasi terhadap dinamika kebijakan penganggaran, sekaligus komitmen untuk tetap menjaga efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penggunaan anggaran dalam mendukung pencapaian target kinerja Renstra 2025–2029.

## Perjalanan Pagu Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025

**1 Januari 2025**

Pagu Awal

**Rp.16.163.923.000,-**

**22 Februari 2025**

Revisi pencantuman

Efisiensi belanja

**Rp.15.463.923.000,-**

**19 Mei 2025**

Revisi pergeseran antar KRO/RO  
untuk pemenuhan KRO/RO baru

**Rp.13.721.547.000,-**

**24 April 2025**

Pemenuhan Anggaran Biaya  
Tambahkan (ABT) melalui buka  
blokir anggaran efisiensi

**Rp.13.721.547.000,-**

**2 September 2025**

Revisi pemenuhan belanja pegawai  
eks BSI dan pergeseran anggaran  
operasional lingkup BP2SDM

**Rp.13.721.547.000,-**

**26 November 2025**

Revisi pergeseran untuk  
pemenuhan belanja pegawai  
Eselon I Kementerian Kehutanan

**Rp.13.669.847.000,-**

**3 November 2025**

Revisi penambahan RO Layanan  
BMN dan pergeseran pagu  
kelebihan belanja pegawai  
satker lingkup BP2SDM

**Rp.13.669.847.000,-**

**16 Desember 2025**

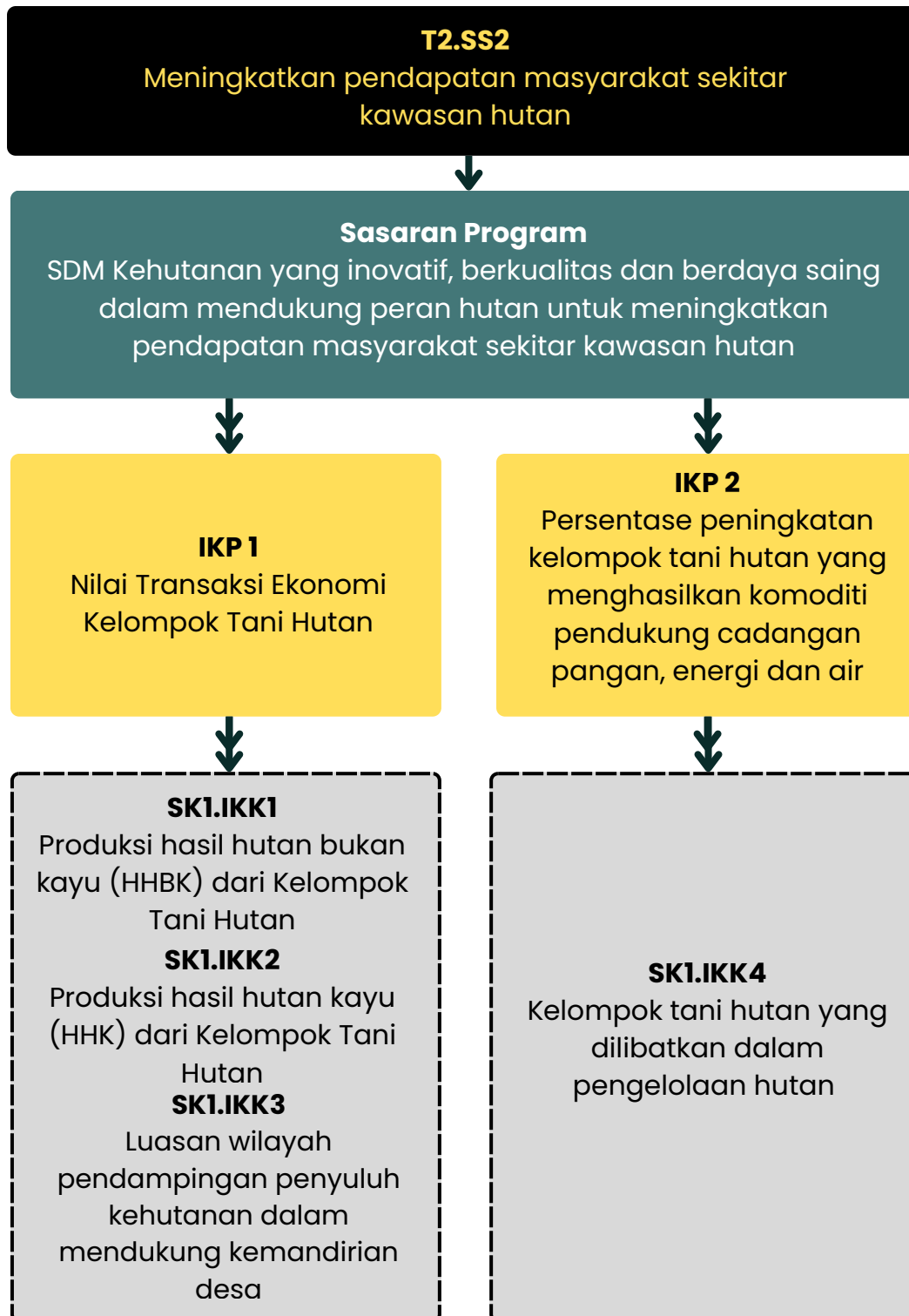
Revisi pergeseran untuk pemenuhan  
belanja pegawai Eselon I Kementerian  
Kehutanan tahap II

**Rp.13.669.847.000,-**

*Berdasarkan Data Revisi  
Direktorat Jenderal Anggaran (DJA)*

## 2.5. Pohon Kinerja

Penjenjangan kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan mulai dari sasaran strategis sampai dengan indikator kinerja kegiatan secara komprehensif dapat divisualisasikan melalui pohon kinerja. Penyusunan pohon kinerja diibaratkan seperti mengurai jalur kinerja secara logis yang dianggap paling terkait dan dibutuhkan dalam pencapaian outcome sehingga peran dari setiap tingkatan organisasi dapat terjabarkan dan Indikator Kinerja terbagi habis dari tingkat Kementerian sampai dengan tingkat Satuan Kerja.



# BAB 3

## *Akuntabilitas Kinerja*



## 3.1. Review atas Dokumen Perencanaan

Rencana Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan merupakan rencana kinerja anggaran yang sama pada lingkup Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam mendukung kegiatan Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi, Peningkatan Penyuluhan Kehutanan, serta Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM sebesar Rp.94.096.347.000,-. Sepanjang Tahun Anggaran 2025 terdapat kebijakan efisiensi anggaran untuk belanja K/L yang ditargetkan pada sumber dan rupiah murni pada belanja non operasional dan belanja perjalanan dinas, pemenuhan belanja pegawai dan penambahan RO Layanan BMN. Hingga akhir tahun anggaran 2025 pagu anggaran Kantor Pusat Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia turun sebesar 45,36 persen dari pagu awal sebesar Rp. 51.409.560.000,-. Perincian perubahan anggaran tersebut disajikan sebagaimana tabel di bawah ini.

No.	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Tanggal Perubahan	Keterangan
1	94.096.347.000	94.096.347.000	3 Februari 2025	Revisi terkait Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). belanja Non Operasional Satker lainnya lingkup BP2SDM disimpan sementara di Kantor Pusat sebesar Rp38.366.760.000,-.
2	94.096.347.000	55.029.587.000	22 Februari 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Pergeseran anggaran belanja Non Operasional sebesar Rp.38.366.760.000,- telah disebar ke Satker lainnya lingkup BP2SDM.</li> <li>2.Pergeseran anggaran dari Pusluh ke Balai P2SDM sebesar Rp.700.000.000,- untuk mendukung kegiatan penyuluhan di Balai P2SDM.</li> <li>3.Blokir efisiensi belanja APBN TA 2025 lingkup Kantor Pusat BP2SDM sebesar Rp9.439.772.000,-.</li> </ol>
3	55.029.587.000	75.543.464.000	24 April 2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1.Relaksasi blokir efisiensi untuk memenuhi belanja operasional dan kegiatan Prioritas Presiden yaitu kegiatan Ketahanan Pangan (Pendampingan Kegiatan Ketahanan Pangan di Pusluh).</li> <li>2.Relaksasi anggaran yang sementara dititipkan untuk belanja pegawai Ditjen KSDAE sebesar Rp25.000.000.000, yang akan bergeser pada proses revisi berikutnya.</li> </ol>

No.	Semula (Rp)	Menjadi (Rp)	Tanggal Perubahan	Keterangan
4	75.543.464.000	76.543.464.000	19 Mei 2025	Pergeseran anggaran pendidikan antar satker antar jenis belanja lingkup BP2SDM menjadi belanja barang operasional sebesar Rp1.000.000.000,- untuk pemenuhan belanja honorarium PPNPN lingkup Sekretariat Jenderal yang sementara dititipkan di Kantor Pusat.
5	76.543.464.000	76.543.464.000	14 Juli 2025	Revisi terkait perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA dan Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
6	76.543.464.000	73.154.246.000	2 September 2025	1.Pergeseran anggaran belanja barang operasional sebesar Rp650.000.000 untuk pemenuhan belanja honorarium PPNPN lingkup Balai Wilayah I limpahan dari PPNPN eks BSI LHK. 2.Terdapat 43 pegawai eks BPSI LHK yang dilimpahkan ke Balai P2SDM tidak beserta pelimpahan belanja pegawai. Sehingga terdapat kekurangan belanja pegawai lingkup Badan P2SDM TA 2025 sebesar Rp3.769.060.000,-.
7	73.154.246.000	73.154.246.000	8 Oktober 2025	Revisi terkait perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA dan Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
8	73.154.246.000	74.888.108.000	3 November 2025	Terdapat anggaran yang sementara dititipkan untuk belanja pegawai Ditjen KSDAE yang sebesar Rp21.230.940.000,-, yang akan bergeser pada proses revisi berikutnya.
9	74.888.108.000	51.561.560.000	26 November 2025	Pergeseran anggaran antar UKE 1 dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai lingkup Kementerian Kehutanan (Ditjen KSDAE) sebesar Rp23.326.548.000,-.
10	51.561.560.000	51.561.560.000	11 Desember 2025	Revisi terkait perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA dan Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK).
11	51.561.560.000	51.409.560.000	16 Desember 2025	Pergeseran anggaran antar UKE 1 dalam rangka penyelesaian pagu minus belanja pegawai lingkup Kementerian Kehutanan (Ditjen KSDAE) sebesar Rp1.440.000.000,-.
12	51.409.560.000	51.409.560.000	18 Desember 2025	Pemutakhiran Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan perubahan rencana penarikan dana dalam halaman III DIPA.

## 3.2. Review atas Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2025

SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran dan pelaporan kinerja dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi.

Evaluasi terhadap SAKIP dilaksanakan setiap tahun guna menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas outcome program terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya *good governance* yang berorientasi hasil. Dalam peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 tahun 2021, komponen yang diukur dalam evaluasi SAKIP meliputi Perencanaan Kinerja (30%), Pengukuran Kinerja (30%), Pelaporan Kinerja (15%) dan Evaluasi Akuntabilitasn Kinerja Internal (25%).

Sebagaimana hasil rekomendasi evaluasi SAKIP pada tahun sebelumnya, Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagai unit eselon II pada Badan P2SDM diwajibkan untuk melaksanakan penilaian SAKIP mandiri. Berdasarkan Memo Kepala Badan P2SDM Nomor M.34/P2SDM/PEHKT/WAS.04.01/B/10/2025 tanggal 16 Oktober 2025 tentang Perubahan Hasil Penjaminan Kualitas atas Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025, hasil penjaminan mutu evaluasi SAKIP mandiri yang telah dilakukan oleh Pusat Penyuluhan mendapat penilaian sebagaimana pada tabel di bawah ini.

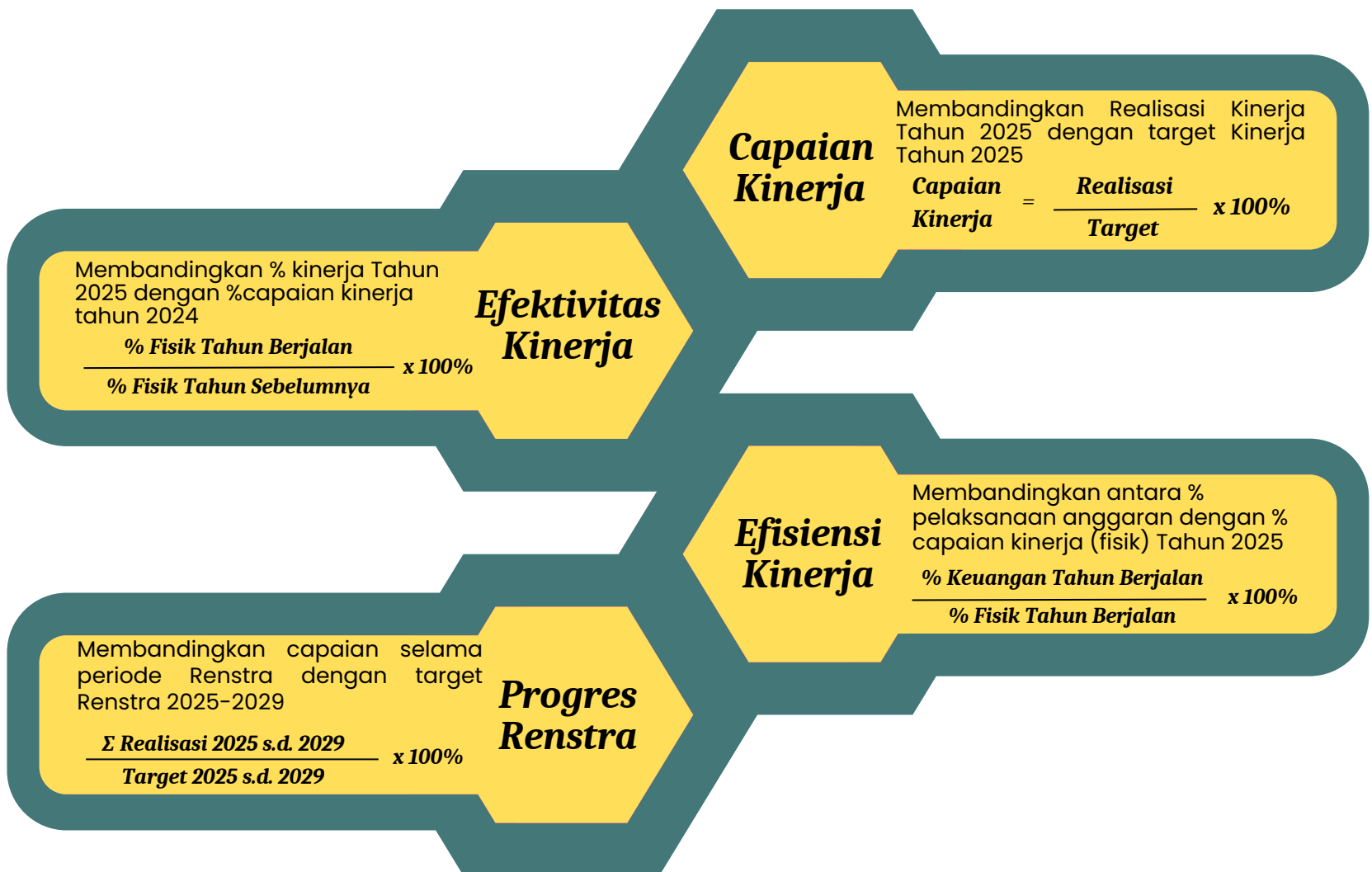
Komponen Nilai	Bobot	Nilai	Persen terhadap Bobot	Selisih Nilai dengan Bobot
Perencanaan Kinerja	30	26,83	89,43%	3,17
Pengukuran Kinerja	30	25,99	86,63%	4,01
Pelaporan Kinerja	15	12,87	85,80%	2,13
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,16	84,64%	3,84
<b>Nilai Hasil Evaluasi</b>	<b>100</b>	<b>86,86</b>	<b>86,86%</b>	<b>13,14</b>
<b>Tingkat Akuntabilitas</b>	<b>AA</b>	<b>A</b>		

Dari hasil penilaian SAKIP mandiri tersebut, terdapat beberapa rekomendasi yang perlu dilakukan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun selanjutnya. Rekomendasi tersebut tertuang dalam Memo Kepala Badan P2SDM Nomor M.20/P2SDM/PEHKT/WAS.03.01/B/06/2025 tanggal 23 Juni 2025 tentang Penyampaian Akun Aplikasi eSAKIP Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Penilaian Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2024 dan Hasil Penilaian Penjaminan Mutu atas Penilaian Mandiri SAKIP Tahun 2025. Adapun rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti seluruhnya oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan sebagaimana tabel berikut.

Komponen Penilaian	Rekomendasi	Upaya Tindak Lanjut
Perencanaan Kinerja	Pada dokumen perencanaan perlu ditambahkan narasi terkait penentuan target berdasarkan perbaikan kinerja tahun sebelumnya, serta strategi yang akan dilakukan satker untuk peningkatan kinerja	Penentuan target dan strategi telah ditambahkan ke dalam dokumen Renstra dan Renja Pusat Penyuluhan Kehutanan
Pengukuran Kinerja	Pusat Penyuluhan Kehutanan agar dapat melakukan rapat rutin minimal setiap triwulan untuk melakukan monitoring/pengukuran kinerja dan mendokumentasikan undangan, notulen serta foto-foto kegiatan	Akan dilakukan rapat rutin di tahun 2026
Pelaporan Kinerja	Sudah sesuai	-
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	Pusat Penyuluhan Kehutanan agar menyusun SK Pengelola Kinerja Satker	Akan disusun di tahun 2026

### 3.3. Metode Pengukuran

Pengukuran kinerja bertujuan untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program Peningkatan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM). Proses ini dilakukan sebagai upaya memastikan bahwa program berjalan sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan dan memberikan dampak yang signifikan terhadap pencapaian sasaran organisasi. Pengukuran dilakukan pada *stakeholder perspective* melalui empat metode utama, yaitu presentase capaian kinerja, progress terhadap pelaksanaan Renstra, efektivitas kinerja (pada indikator kinerja yang sama) dan efisiensi kinerja. Adapun perhitungan menggunakan formula sebagai berikut:



## 3.4. Hasil Pengukuran Kinerja

### Persentase Capaian Kinerja

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Realisasi	% Capaian Kinerja
<b>Stakeholder Perspective</b>				
1	Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-	-	-
2	Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-	-	-
3	Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa	25.000 Hektar	25.196,00 Hektar	100,78%
4	Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	4.400 Kelompok	4.400 Kelompok	100,00%
5	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan*	Rp 700 Miliar	3.399,12 Miliar	150,00%
6	Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air*	10 Persen	10 Persen	100,00%
<b>Rata-Rata Persentase Capaian Kinerja</b>				<b>112,69%</b>

\*IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM

Hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 menunjukkan bahwa Pusat Penyuluhan Kehutanan mampu merealisasikan kinerja secara optimal sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Rata-rata capaian kinerja mencapai 112,69 persen, yang mengindikasikan bahwa sebagian besar indikator kinerja tidak hanya tercapai, tetapi juga melampaui target. Kinerja yang melampaui target terutama tercermin pada indikator Nilai Transaksi Ekonomi KTH yang terealisasi sebesar Rp3.399,12 miliar, jauh di atas target Rp700 miliar (presentase kinerja sesungguhnya 485,57% namun dibatasi maksimal 150%). Hal ini menunjukkan kontribusi nyata kelompok tani hutan dalam mendorong aktivitas ekonomi berbasis sumber daya hutan, sekaligus menjadi bukti bahwa program pemberdayaan yang dilaksanakan telah mampu meningkatkan skala dan keberlanjutan usaha KTH. Serta indikator kinerja Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa yang terealisasi sebesar 25.196 Ha pemetaan wilayah pendampingan terhadap KTH binaan penyuluh kehutanan pada 59 desa untuk mendukung peningkatan nilai indeks desa membangun.

Pengukuran capaian kinerja juga dilakukan untuk indikator pada *Customer Perspective*, dan *Internal Process, Learning and Growth* yang didominasi oleh Indikator kinerja Kegiatan pada tingkat level eselon II. Berdasarkan hasil pengukuran, hampir seluruh indikator telah berhasil mencapai target yang ditetapkan. Adapun rincian penilaian pada masing-masing Indikator sebagaimana tabel berikut:

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target PK	Realisasi	% Capaian Kinerja
<b>Customer Perspective</b>				
1	Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan HHBK <b>Catatan : baru tersedia di Tahun 2026</b>	-	-	-
2	Produksi hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Kayu <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-	-	-
3	Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang meningkat kapasitasnya	1.250 Orang	1.250 Orang	100,00%
4	Peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)	20 Kelompok Masyarakat	20 Kelompok Masyarakat	100,00%
<b>Internal Process, Learning and Growth</b>				
1	Nilai Maturitas SPIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	3,30 poin	3,73 poin	113,03%
2	Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	72 poin	86,86 poin	120,64%
3	Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan	82,5 poin	97,28 poin	117,92%

## Efektivitas Kinerja

Efektivitas kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 dinilai dari tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan Rencana Strategis 2025–2029. Secara umum, pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan efektif, yang ditunjukkan oleh capaian indikator kinerja utama dan indikator kinerja kegiatan yang sebagian besar mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan.

Tingginya capaian pada beberapa indikator, khususnya Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung Indikator Kinerja Program Badan P2SDM, yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan yang melampaui target, menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan penyuluhan, penguatan kapasitas Kelompok Tani Hutan, serta sinergi lintas unit telah mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat pengelola hutan. Hal ini mencerminkan bahwa strategi dan pendekatan yang diterapkan telah tepat sasaran dan relevan dengan kebutuhan di lapangan. Selain masifnya sosialisasi terkait pengisian NTE yang dilakukan oleh Pusat Penyuluhan dan pemberian Biaya Operasional Kepada Penyuluh Kehutanan ASN yang menjadi tolok ukur keberhasilan. Adanya target pencapaian NTE dari Masing-masing provinsi juga berperan besar dalam pencapaian target tersebut. Seperti pada Jawa Timur yang merupakan provinsi dengan nilai NTE terbesar di Indonesia, berdasarkan data yang tersedia untuk Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) Kelompok Tani Hutan (KTH) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025, target NTE Provinsi Jawa Timur ditetapkan sebesar Rp 1.8 T.

Selain itu, efektivitas kinerja juga tercermin dari tercapainya target luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dan keterlibatan Kelompok Tani Hutan dalam pengelolaan hutan sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa sumber daya yang tersedia telah dimanfaatkan secara optimal untuk menjangkau wilayah dan kelompok sasaran, serta memperkuat peran penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa dan pengelolaan hutan berkelanjutan.



No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja		Efektivitas
		2024	2025	
1	Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-	-	-
2	Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-	-	-
3	Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa	-	100,78%	tidak dibandingkan
4	Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	-	100,00%	tidak dibandingkan
5	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan*	150,00 %	150,00 %	1,00
6	Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air*	-	100,00%	tidak dibandingkan

\*IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM

Pengukuran efektivitas kinerja dilakukan dengan membandingkan presentase capaian kinerja di tahun 2025 terhadap presentase capaian kinerja di tahun 2024 untuk indikator-indikator kinerja yang masih berkelanjutan dari Renstra sebelumnya. Berdasarkan hasil pengukuran tersebut, IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM yaitu Indikator Nilai Transaksi Ekonomi KTH menunjukkan capaian yang sama dengan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 150 persen, sehingga menghasilkan nilai efektivitas sebesar 1,00 dengan kategori efektif. Capaian ini menandakan bahwa kinerja pada indikator tersebut telah berjalan secara optimal dan mampu dipertahankan secara berkelanjutan.

Adapun IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM lainnya, seperti persentase peningkatan kelompok tani hutan penghasil komoditas pendukung cadangan pangan, energi, dan air; serta IKK Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa dan Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan, belum dapat dianalisis efektivitasnya secara *year-on-year*. Hal ini disebabkan indikator-indikator tersebut baru ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembandingan dari tahun sebelumnya.

## Efisiensi Kinerja

Efisiensi kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 dinilai dari perbandingan antara pemanfaatan sumber daya dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Dalam pelaksanaan program dan kegiatan, Pusat Penyuluhan Kehutanan berupaya mengoptimalkan penggunaan anggaran, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai target kinerja secara optimal.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan kehutanan pada Tahun 2025 dilakukan dengan mengedepankan prinsip efisiensi, antara lain melalui pemanfaatan sumber daya yang ada, penguatan koordinasi dengan unit terkait, serta sinergi program lintas sektor. Pendekatan tersebut memungkinkan capaian beberapa indikator kinerja dapat diraih sesuai bahkan melampaui target yang ditetapkan, meskipun dalam kondisi keterbatasan anggaran dan adanya penyesuaian kebijakan pada tahun anggaran berjalan.

Efisiensi kinerja juga tercermin dari kemampuan Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam memprioritaskan kegiatan yang berdampak langsung terhadap pencapaian sasaran program, khususnya kegiatan pendampingan Kelompok Tani Hutan dan penguatan peran penyuluh kehutanan di lapangan. Dengan fokus pada kegiatan prioritas, penggunaan anggaran dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran dan memberikan hasil yang maksimal.

Selain itu, optimalisasi peran penyuluh kehutanan ASN dan pemanfaatan dukungan operasional yang tersedia turut berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi kinerja, terutama dalam pengumpulan dan pelaporan data kinerja. Hal ini memungkinkan pengukuran capaian kinerja dilakukan secara lebih efektif tanpa memerlukan tambahan sumber daya yang signifikan.



Pengukuran Efisiensi Capaian Kinerja tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara persentase penyerapan anggaran tahun 2025 dengan persentase capaian kinerja tahun 2025. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui efisiensi capaian kinerja, apabila rasio yang dihasilkan  $\leq 1$  maka pelaksanaan pencapaian kinerja termasuk dalam kategori efisien, sedangkan bila rasio yang dihasilkan  $> 1$  maka pencapaian kinerja dikategorikan kurang efisien. Hasil perhitungan terhadap efisiensi capaian kinerja Pusat Penyuluhan Tahun 2025 dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	% Capaian Kinerja		Efisiensi
		Keuangan	Fisik	
1	Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-	-	-
2	Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	-	-	-
3	Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa	99,87%	100,78%	0,99
4	Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	99,96%	100,00%	1,00
5	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan*	99,87%	150,00 %	0,67
6	Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air*	99,96%	100,00%	1,00
<b>Rata-Rata Efisiensi</b>				<b>0,91</b>

\*IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM

Secara umum, capaian kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan pada Tahun 2025 berada pada kategori efisien, hal ini ditunjukkan dari rata-rata nilai efisiensi sebesar 0,91 yang berarti penggunaan anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan telah optimal untuk mencapai target IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM maupun IKK Pusat Penyuluhan Kehutanan sendiri. Tingginya nilai efisiensi pada Tahun 2025 ditunjang oleh tingginya presentase capaian Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan yang dapat mencapai 150%.

## Progres Capaian Renstra 2025–2029

No.	Indikator Kinerja Kegiatan	Target 2025–2029	Realisasi s.d. 2025	%
1	Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	40.000 Ton (bukan kumulatif)	-	-
2	Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan: baru tersedia di Tahun 2026</b>	50.000 m3 (bukan kumulatif)	-	-
3	Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam kemandirian desa	125.000 Hektar (kumulatif)	25.196 Hektar	20,15%
4	Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	6.400 Kelompok (bukan kumulatif)	4.400 Kelompok	68,75%
5	Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan*	1,1 Triliun	3,399 Triliun	150,00%
6	Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air*	14 Persen	10 Persen	71,43%
<b>Rata-Rata Progres</b>				<b>77,58%</b>

\*IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM

Pengukuran progres capaian renstra ini dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja aktual terhadap target Renstra lima tahunan pada masing-masing indikator kinerja program. Berdasarkan hasil perhitungan, rata-rata progres capaian Renstra Pusat Penyuluhan Kehutanan sampai dengan Tahun 2025 mencapai 77,58%. Capaian ini menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program telah sejalan dengan arah kebijakan Renstra, meskipun masih terdapat variasi tingkat capaian antar indikator.

Indikator Nilai Transaksi Ekonomi KTH menunjukkan progres yang sangat baik dengan capaian sebesar 150%, melampaui target Renstra yang telah ditetapkan sampai akhir periode, Capaian yang sangat tinggi ini mengindikasikan bahwa potensi ekonomi KTH yang berkembang di lapangan relatif lebih besar dibandingkan proyeksi yang digunakan dalam penetapan target Renstra. Oleh karena itu, ke depan diperlukan evaluasi dan penyesuaian target Renstra secara lebih adaptif dengan mempertimbangkan tren peningkatan aktivitas usaha KTH, dinamika pasar, serta dampak penguatan pendampingan dan pembinaan yang telah dilakukan.

## Progres Capaian Renstra 2025–2029

Pada Indikator Kinerja Program (IKP) 1, yaitu Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan, realisasi capaian pada Tahun 2025 mencapai sebesar 470 persen dari target yang ditetapkan. Capaian yang melampaui target tersebut menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi Kelompok Tani Hutan yang signifikan, yang didukung oleh kegiatan pendampingan penyuluh kehutanan, penguatan kapasitas kelompok, serta sinergi program dengan unit teknis terkait. Tingginya capaian ini juga mencerminkan semakin kuatnya peran Kelompok Tani Hutan dalam memanfaatkan potensi usaha kehutanan secara produktif dan berkelanjutan. Sosialisasi dan Bimbingan Teknis yang dilakukan secara masif oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan juga berperan penting dalam pencapaian target NTE di masing-masing Provinsi. Saat ini sebagian besar Provinsi menjadikan NTE sebagai salah satu indikator keberhasilan dari pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan dan juga indikator peningkatan ekonomi dari masyarakat sekitar hutan. Adanya Biaya Operasional Penyuluh (BOP) kehutanan ASN menjadi salah satu indikator pendukung yang mendorong optimalisasi peran penyuluh, termasuk dalam penginputan data hasil penjualan Kelompok Tani Hutan binaan sebagai dasar pengukuran kinerja ekonomi kehutanan.

Selanjutnya, pada IKP 2, yaitu Persentase Peningkatan Kelompok Tani Hutan yang Menghasilkan Komoditi Pendukung Cadangan Pangan, Air, dan Energi, capaian kinerja Tahun 2025 tercatat sebesar 10 persen. Capaian ini menunjukkan bahwa upaya pendampingan dan fasilitasi yang dilakukan telah mulai mendorong keterlibatan Kelompok Tani Hutan dalam produksi komoditas strategis yang mendukung ketahanan pangan, air, dan energi. Sebagai tahun awal Renstra, capaian ini menjadi indikasi awal yang positif dan akan terus ditingkatkan melalui penguatan pendampingan pada tahun-tahun selanjutnya.

Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025–2029, sejumlah indikator kinerja kegiatan masih berada pada tahap persiapan dan penataan sistem pelaksanaan. Hal tersebut berlaku khususnya untuk Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Produksi hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan dengan target sebesar 20.000 ton dan IKK Produksi hasil hutan kayu (HHK) dari Kelompok Tani Hutan dengan target sebesar 30.000 m<sup>3</sup>.

Kedua indikator tersebut merupakan indikator baru yang mulai ditetapkan pada periode Renstra 2025–2029, sehingga pada Tahun 2025 fokus pelaksanaan masih diarahkan pada penyusunan kerangka pelaksanaan, penguatan basis data, serta penyiapan mekanisme pendampingan yang mendukung pencapaian target produksi pada tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu, pada Tahun 2025 belum dilakukan pengukuran capaian kinerja secara kuantitatif terhadap kedua IKK tersebut.

Selain sebagai indikator baru, belum terlaksananya pengukuran capaian produksi HHBK dan HHK juga dipengaruhi oleh perlunya penyesuaian kebijakan, kesiapan kelembagaan Kelompok Tani Hutan, serta sinkronisasi dengan program teknis terkait pengelolaan hutan dan perhutanan sosial. Pada tahap awal ini, Pusat Penyuluhan Kehutanan lebih memprioritaskan kegiatan pendukung, seperti identifikasi potensi komoditas, pemetaan kelompok dampingan, serta penguatan kapasitas penyuluh kehutanan dalam mendampingi kegiatan produksi yang berkelanjutan.

Sementara itu, pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 3, yaitu Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa, realisasi capaian pada Tahun 2025 mencapai 100,7 persen atau setara dengan luasan pendampingan sebesar 25.196 hektare. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan oleh penyuluh kehutanan telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan sedikit melampaui target, serta berkontribusi dalam memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan. Intervensi yang dilakukan dalam pencapaian IKK ini diantaranya adalah pemberian BOP kepada penyuluh kehutanan ASN, kegiatan pendampingan agroforestry pendampingan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas bagi penyuluh kehutanan, fasilitasi peningkatan kemandirian KTH, fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widiyakarya dan pemagangan.

Pada IKK 4, yaitu Kelompok Tani Hutan yang Dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan, capaian kinerja Tahun 2025 mencapai 100 persen dengan keterlibatan sebanyak 4.400 kelompok. Capaian ini mencerminkan keberhasilan Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam memperluas jangkauan pendampingan dan meningkatkan partisipasi aktif Kelompok Tani Hutan dalam pengelolaan hutan. Keterlibatan kelompok secara optimal menjadi fondasi penting dalam mendukung pengelolaan hutan yang inklusif dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.



# Benchmarking **KINERJA**

## Nilai Transaksi Ekonomi

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pencapaian kinerja dan memperkuat sinergi antarunit di lingkungan Kementerian Kehutanan, Pusat Penyuluhan Kehutanan pada Tahun 2025 telah melaksanakan benchmarking kinerja melalui koordinasi dan kolaborasi dengan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial. Kegiatan benchmarking ini difokuskan pada penyesuaian pencapaian kegiatan pendampingan agroforestry yang mendukung ketahanan pangan, khususnya pada areal perhutanan sosial.

Benchmarking kinerja dilakukan sebagai respon atas kebutuhan untuk memastikan bahwa target pendampingan yang dilaksanakan oleh penyuluh kehutanan sejalan dengan pelaksanaan kegiatan ketahanan pangan di wilayah perhutanan sosial. Melalui koordinasi yang intensif, Pusat Penyuluhan Kehutanan mempelajari dan mengadopsi pendekatan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dalam perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian kegiatan yang didukung oleh anggaran belanja tambahan.

Hasil benchmarking menunjukkan bahwa pencapaian target anggaran belanja tambahan sangat ditentukan oleh tingkat keterpaduan antara program pendampingan penyuluhan dengan kegiatan teknis di lapangan. Oleh karena itu, Pusat Penyuluhan Kehutanan menyesuaikan fokus pendampingan agar secara langsung mendukung kegiatan agroforestry ketahanan pangan yang dilaksanakan pada areal perhutanan sosial, baik dari

aspek perencanaan kegiatan, penetapan lokasi, maupun pelibatan Kelompok Tani Hutan sebagai subjek utama kegiatan.

Selain itu, benchmarking kinerja ini mendorong terbangunnya mekanisme kerja kolaboratif antara Pusat Penyuluhan Kehutanan dan Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial, termasuk dalam penyesuaian target kinerja, pemanfaatan data lokasi perhutanan sosial, serta pemantauan capaian kegiatan secara bersama. Kolaborasi tersebut memastikan bahwa pendampingan yang dilakukan oleh penyuluh kehutanan tidak hanya berorientasi pada output, tetapi juga memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan ketahanan pangan masyarakat pengelola hutan.

Dalam konteks Indikator Kinerja Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan yang diampu oleh Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, terdapat kesamaan substansi indikator dengan indikator kinerja pada unit Eselon I lain di Kementerian Kehutanan. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial mengukur Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat Kehutanan (KUPS), sementara Direktorat Jenderal KSDAE mengukur Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Masyarakat di sekitar Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, dan Taman Buru. Ketiga indikator tersebut pada dasarnya sama-sama berorientasi pada pengukuran aktivitas ekonomi masyarakat yang mengelola atau memanfaatkan sumber daya hutan dan kawasan konservasi secara legal dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, terlihat adanya perbedaan skala dan karakter capaian antar unit. Badan P2SDM mencatat Nilai Transaksi Ekonomi sebesar Rp3,399 triliun dengan partisipasi sebanyak 10.490 Kelompok Tani Hutan, yang menunjukkan luasnya jangkauan pembinaan dan peran SDM kehutanan dalam mendorong aktivitas ekonomi kelompok di berbagai wilayah. Pada sisi lain, Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial mencatat Nilai Transaksi Ekonomi sebesar Rp1,810 triliun yang dihasilkan oleh 1.525 unit KUPS, yang mencerminkan fokus pada kelompok usaha dengan orientasi bisnis dan hilirisasi produk perhutanan sosial. Sementara itu, Direktorat Jenderal KSDAE mencatat Nilai Transaksi Ekonomi sebesar Rp4,26 miliar dengan keterlibatan 40 kelompok binaan, yang menggambarkan karakteristik pembinaan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan konservasi dengan ruang pemanfaatan yang lebih terbatas namun spesifik.

Perbandingan ini menunjukkan bahwa perbedaan capaian nilai transaksi tidak semata-mata mencerminkan kinerja yang lebih tinggi atau lebih rendah, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan mandat, ruang lingkup pembinaan, jumlah kelompok dampingan, serta karakteristik usaha yang dikembangkan oleh masing-masing unit Eselon I. Melalui benchmarking ini, Badan P2SDM dapat memperoleh pembelajaran penting, baik dari pendekatan penguatan kelembagaan usaha pada Perhutanan Sosial maupun dari model pengelolaan ekonomi masyarakat berbasis konservasi pada KSDAE, sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pembinaan ke depan.

Unit Kerja	Nilai Transaksi	Partisipasi Kelompok
Balai P2SDM	Rp. 3.399.115.761.284,-	10.490 Kelompok Tani Hutan
Perhutanan Sosial	Rp. 1.810.585.955.512,-	1.525 KUPS
KSDAE	Rp. 4.261.927.650,-	40 Kelompok Binaan KSDAE

## Sinergi Program Pembangunan Bidang Kehutanan dengan Bidang Ketenagakerjaan

Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat dalam pengelolaan hasil hutan bukan kayu (HHBK) merupakan implementasi kesepahaman bersama antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Kehutanan tentang sinergi program pembangunan bidang Ketenagakerjaan dengan bidang kehutanan yang ditandatangani pada 11 April 2025. Beberapa tindak lanjut dari kesepahaman bersama tersebut antara lain:

1. Sinergi data Lokasi Perhutanan Sosial (PS) dan keberadaan penyuluh di masing-masing lokasi PS, sehingga dapat menghasilkan data atas kesenjangan jumlah kebutuhan penyuluh pendamping di lapangan, dan akan ditutupi dari Tenaga Kerja Mandiri (TKM) atau lulusan Sekolah Menengah Kejuruan Kehutanan Negeri (SMKKN) yang akan direkrut dalam program pendampingan PS tersebut.
2. Melakukan proses percepatan penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia bidang Perhutanan Sosial, dan koordinasi dalam penetapan KKNi (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) bidang Perhutanan Sosial.
3. Rencana pemanfaatan lulusan SMKKN dalam perekrutan sebagai Tenaga Kerja Mandiri (TKM) oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
4. Rencana kemitraan dengan pihak swasta dalam mendukung/memfasilitasi implementasi MoU Kementerian Kehutanan dan Kementerian Ketenagakerjaan ini.

Dalam rangka pengembangan pembelajaran dan pengembangan kompetensi, Tim Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Kehutanan melaksanakan kunjungan lapangan ke Wanawiyata Widyakarya Kelompok Tani Hutan (KTH) Tani Mandiri, Sleman, DI Yogyakarta untuk mereplikasi kegiatan KTH dalam pengembangan program TKM berbasis usaha kehutanan.



Sebagai tindak lanjut sinergi program antara Kementerian Ketenagakerjaan dengan Kementerian Kehutanan dilakukan pelatihan petani yang akan dilaksanakan pada Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) dengan rincian target peserta pelatihan sebagai berikut: Medan 1500 orang, Padang 1200 orang, Bandung Barat 2500 orang dan Serang 1900 orang.

### **Pelatihan Petani Agroforestry bertempat di Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Padang**

Pelatihan ini merupakan bagian dari program nasional peningkatan keterampilan tenaga kerja di sektor-sektor potensial berbasis lokalitas, sehingga diharapkan masyarakat desa di sekitar kawasan hutan memiliki keterampilan agroforestry sehingga dapat berkontribusi terhadap ekonomi keluarga tanpa merusak hutan.





Indikator Kinerja Kegiatan

**LUASAN WILAYAH PENDAMPINGAN PENYULUH KEHUTANAN  
DALAM Mendukung KEMANDIRIAN DESA**

## Capaian Kinerja

Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa merupakan indikator yang menggambarkan cakupan area desa atau kawasan hutan yang mendapatkan pendampingan dari penyuluh kehutanan secara aktif dan berkelanjutan. Pendampingan yang dilakukan mencakup kegiatan pemberdayaan masyarakat, penguatan kelembagaan kelompok, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta pengembangan usaha kehutanan dan agroforestry yang berbasis pada potensi suatu wilayah tersebut. Melalui pendampingan pada luasan wilayah tertentu, penyuluh kehutanan berperan sebagai fasilitator serta pendamping bagi masyarakat khususnya kelompok tani hutan dalam mengelola sumber daya hutan secara produktif. Kegiatan pendampingan tidak hanya berfokus pada aspek teknis pengelolaan hutan, tetapi juga mencakup perencanaan usaha, peningkatan nilai tambah hasil hutan, penguatan akses pasar serta integrasi pengelolaan hutan dengan ketahanan pangan dalam mendukung kemandirian desa.

Target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa adalah sebanyak 25.000 hektar luasan wilayah. Pendampingan oleh penyuluh kehutanan tersebut dilakukan terutama pada desa-desa yang merupakan lokasi Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan dari Perhutanan Berbasis Masyarakat.

Pada tahun 2025 yang merupakan tahun pertama dari Renstra 2025-2029, capaian realisasi untuk IKK Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa mencapai 100,78 persen atau setara dengan luasan pendampingan sebesar 25.196 hektar. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan pendampingan oleh penyuluh kehutanan telah terlaksana sesuai dengan target yang ditetapkan, bahkan sedikit melampaui target, serta berkontribusi dalam memperkuat kemandirian desa melalui pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan.

Intervensi yang dilakukan dalam pencapaian IKK ini diantaranya adalah pemberian BOP kepada penyuluh kehutanan ASN, kegiatan pendampingan agroforestry pendampingan ketahanan pangan, peningkatan kapasitas bagi penyuluh kehutanan, fasilitasi peningkatan kemandirian KTH, fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widiyakarya serta kegiatan pemagangan. Seluruh intervensi tersebut dirancang untuk memperkuat fungsi penyuluhan sebagai motor penggerak pembangunan kehutanan di tingkat tapak.



Penghitungan luasan wilayah pendampingan Penyuluh Kehutanan merupakan aspek penting dalam mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK), atau Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH), setiap penyuluh kehutanan memiliki wilayah binaan yang meliputi Kecamatan atau Desa tertentu.

Penetapan wilayah binaan Penyuluh Kehutanan tidak hanya mempertimbangkan aspek ketersediaan personil Penyuluh Kehutanan, tetap juga mempertimbangkan administratif desa, karakteristik geografis, kondisi tutupan lahan, aksesibilitas wilayah, serta potensi dan permasalahan kehutanan yang ada di setiap desa binaan. Pendekatan sistematis dalam penetapan wilayah binaan menjadi dasar bagi penyuluh untuk merancang strategi pendampingan yang efektif dan efisien dalam mendorong kemandirian desa.

Berdasarkan SK wilayah binaan yang telah ditentukan kemudian dilakukan penghitungan jumlah KTH yang berada dalam wilayah binaan. KTH yang dihitung adalah KTH yang sudah teregister pada aplikasi SIMLUH. Data tersebut kemudian diintegrasikan dengan data intervensi kegiatan Pusat Penyuluhan yang sudah dilakukan pada tahun 2025 terhadap Kelompok Tani Hutan.

Desa yang terdapat KTH yang sesuai dengan ketentuan kemudian dihitung luasannya. Luasan wilayah desa dimaksud diambil dari Data administrasi Badan Informasi Geospasial (BIG) yang mencakup kumpulan shapefile (SHP) batas wilayah Indonesia, mulai dari tingkat provinsi, kabupaten/ kota, kecamatan, hingga desa.



## Output dan Outcome

Output yang dihasilkan dari Indikator Kinerja Kegiatan yaitu teridentifikasinya Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa yang mencapai 25.196 Hektar. Capaian ini mencerminkan optimalnya peran penyuluh kehutanan dalam mendampingi masyarakat desa, khususnya kelompok tani hutan (KTH), dalam pengelolaan sumber daya hutan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan secara terintegrasi melalui pendekatan partisipatif, dengan memperhatikan karakteristik sosial, ekonomi, dan ekologi wilayah dampingan.

Adapun outcome yang diharapkan dan mulai terlihat adalah meningkatnya kemandirian desa dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari, berkembangnya praktik agroforestry yang mendukung ketahanan pangan dan pendapatan masyarakat, serta meningkatnya partisipasi dan kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya fungsi hutan. Pendampingan yang berkelanjutan juga berkontribusi pada penguatan kelembagaan kelompok dan peningkatan jejaring usaha berbasis hasil hutan.

## Efektivitas

IKK Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa merupakan IKK baru yang ditetapkan pada tahun Renstra 2025-2029. Di tahun pertama ini, capaian realisasi untuk IKK Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa mencapai 100,78 persen atau setara dengan luasan pendampingan sebesar 25.196 hektar.

IKK Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa ini belum dapat dianalisis efektivitasnya secara year-on-year, hal ini disebabkan indikator-indikator tersebut baru ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembandingan dari tahun sebelumnya.

## Efisiensi

Pencapaian kinerja Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa terhadap target sebesar 100,78% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp.4.643.211.229,- atau sebesar 99,87% dari pagu anggaran Rp.4.649.457.000,-, sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 0,99 dengan kategori efisien. Secara nyata, Pusat Penyuluhan Kehutanan melakukan upaya-upaya efisiensi dalam melakukan intervensi terhadap luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan seperti pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi dengan metode daring ataupun hybrid, serta penggunaan aplikasi SIMLUH untuk pengumpulan data luasan wilayah kth yang didampingi oleh penyuluh kehutanan secara online dan real time.



## Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

1. Keterbatasan jumlah penyuluh kehutanan dibandingkan dengan luas wilayah dampingan,
2. Kondisi geografis yang sulit dijangkau, serta
3. Perbedaan tingkat kapasitas dan kesiapan KTH di masing-masing wilayah.
4. Keterbatasan sarana pendukung dan masih adanya ketergantungan sebagian KTH terhadap bantuan pemerintah menjadi tantangan dalam mendorong kemandirian secara optimal.

## Upaya Tindak Lanjut

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

1. Penguatan strategi pendampingan melalui peningkatan kompetensi penyuluh kehutanan secara berkelanjutan
2. Optimalisasi pemanfaatan BOP
3. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung kegiatan penyuluhan di wilayah sulit dijangkau
4. Fasilitasi pengembangan usaha KTH akan lebih difokuskan pada peningkatan akses pasar, permodalan, dan kemitraan
5. Penguatan peran Wanawiyata Widiyakarya dan perluasan program pemagangan diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam menyiapkan sumber daya manusia kehutanan yang mandiri dan berkelanjutan, sehingga kemandirian desa berbasis pengelolaan hutan dapat terus ditingkatkan.



## Capaian Kinerja pada Rincian Output (RO)

Dalam mendukung tercapainya Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa, berdasarkan Renstra Badan P2SDM Tahun 2025-2029, IKK diterjemahkan lagi menjadi Rincian Output yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L). Pusat Penyuluhan Kehutanan melalui Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan mempunyai target Rincian Output (RO) sebanyak 1.250 orang Penyuluh Kehutanan Pendamping yang meningkat kapasitasnya. Target tersebut dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:



No	Kegiatan	Tempat Pelaksanaan	Tanggal Pelaksanaan	Jumlah (orang)
1	Temu Penyuluh Kehutanan Online "Aren sebagai sumber energi dan pangan"	Pusdatin/ Zoominar	8 Mei 2025	250 Orang
2	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Banten	Banten	11 s.d 13 Juni 2025	30 Orang
3	Temu Teknis Penyuluh Kehutanan Provinsi Sulawesi Utara	Sulawesi Utara	11 s.d 13 Juni 2025	10 Orang
4	Forestry Extention Zoominar "Peran teknologi dalam pengembangan komoditas aren"	Zoominar	28 Agustus 2025	415 Orang
5	Temu Penyuluh Kehutanan dalam Pelestarian Gajah di Provinsi Aceh	Aceh	23 s.d 25 September 2025	50 Orang
6	Talkshow Penyuluhan Kehutanan dengan tema Nilai Transaksi Ekonomi KTH dari hutan untuk Kehidupan	Palu	6 Oktober 2025	60 Orang
7	Pendampingan Pangan Agroforestry melalui Perhutanan Berbasis Masyarakat	E-Learning	Oktober s.d. Desember 2025	435 Orang
<b>Jumlah</b>				<b>1.250 Orang</b>

# Success Story

MELAUJI INOVASI IPAH HYBRID,  
90% WARGA SUDAH DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN AIR

## Sigit Murhofiq

merupakan Penyuluh Kehutanan PNS Ahli Muda di CDK Wilayah X, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah dengan wilayah kerja Kecamatan Jenar dan Kecamatan Sambungmacan, Kabupaten Sragen. Sigit Murhofiq merupakan Terbaik I Teladan Wana Lestari Kategori Penyuluh Kehutanan PNS Tahun 2025.



Kemiskinan, ancaman kekeringan, lahan kritis, pencemaran lingkungan, penebangan liar dan kebakaran hutan menjadi tantangan besar Sigit dalam bertugas di lapangan. Sebagai salah satu garda terdepan di tingkat tapak, Sigit bertekad untuk memperbaiki kondisi wilayah kerjanya dengan melakukan strategi penyuluhan yang inovatif dan efektif. Tidak hanya itu, Sigit juga mempunyai jejaring kerja yang luas sehingga dapat mendorong kelompok tani hutan yang didampinginya memperoleh kerjasama dengan berbagai pihak.

Dalam menanggulangi permasalahan-permasalahan yang terjadi, Sigit menginisiasi dan mendampingi berbagai kegiatan rehabilitasi dan pembangunan kehutanan. Sigit mengembangkan sistem agroforestri pada hampir seluruh kelompok binaan, lahan KTH ditanami dengan jenis pohon jati, mahoni, alpukat, manga jenis red ivory, kopi, dan cabai. Sedangkan pengembangan sistem agrosilvopastura dilakukan oleh kelompok binaan LMDH Banyurip Lestari dengan membudidayakan tanaman sacha inchi dan rumput odot sebagai pakan ternak.

Untuk mengatasi kelangkaan air, Sigit Murhofiq telah menerapkan konservasi tanah dan air secara vegetatif dan sipil teknis. Konservasi tanah dan air secara vegetatif dilakukan di KTH binaan yaitu dengan menanam alpukat, mangga dan jambu air yang ditumpangsarikan di lahan monokultur jagung. Penanaman dilakukan sejak tahun 2019 dengan jumlah mencapai 58.000 bibit. Konservasi tanah dan air secara sipil teknis dilakukan dengan membangun Instalasi Pemanen Air Hujan (IPAH) Hybrid. Selain KTH, Sigit juga membina kelompok Masyarakat Mitra Polhut dan secara aktif mendorong kegiatan pengendalian kebakaran dan pengamanan hutan dengan cara patroli. Patroli dilakukan secara rutin dengan menggandeng masyarakat dan berkoordinasi dengan pemerintah desa maupun Perum Perhutani setempat.

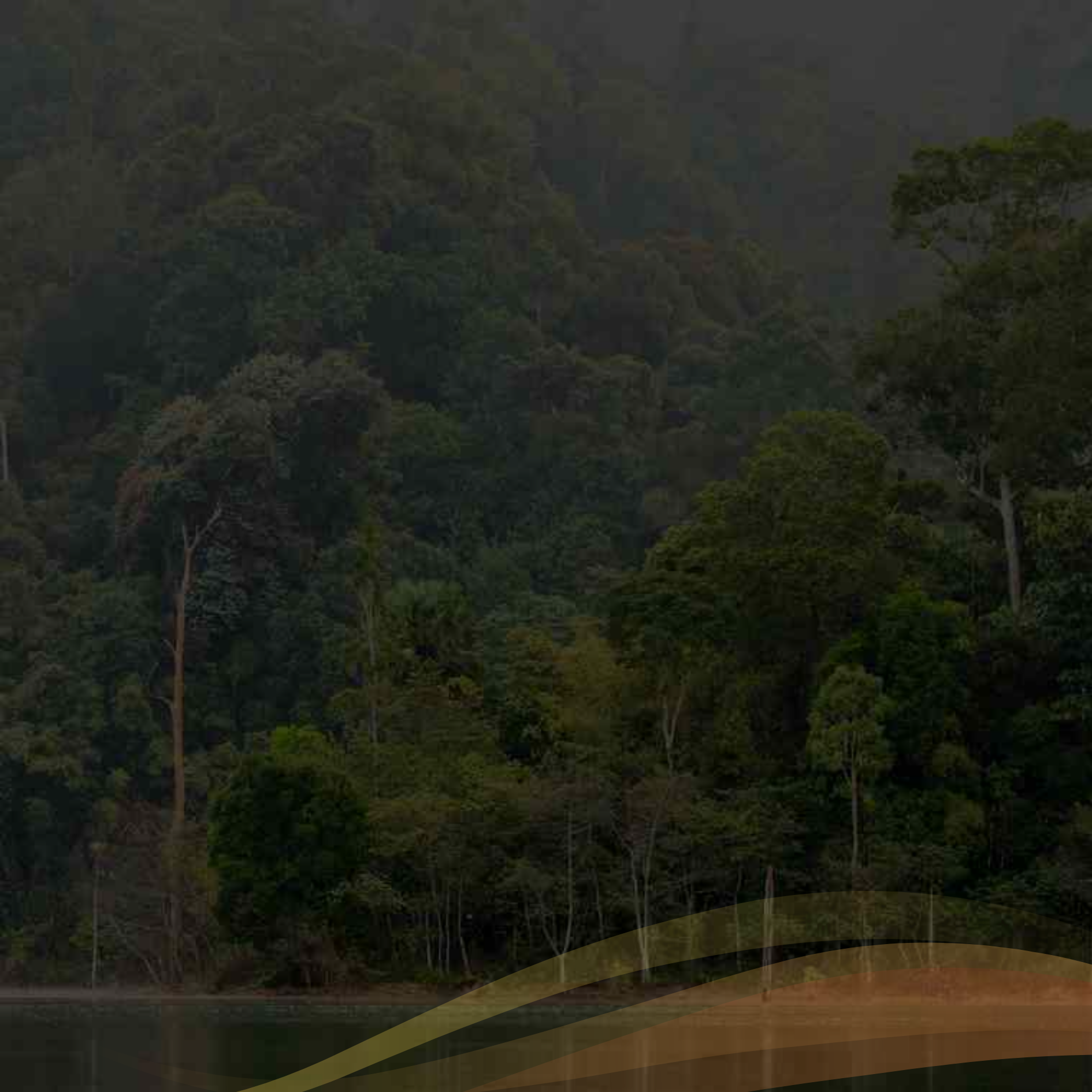




Melalui program rehabilitasi hutan dan lahan yang dijalankan sejak tahun 2019, perubahan signifikan mulai terlihat. Data citra satelit Sentinel menunjukkan bahwa pada tahun 2025, terjadi peningkatan tutupan lahan yang sangat jelas di Kecamatan Jenar yaitu dari 3.232 ha pada tahun 2019 menjadi 5.264 ha pada tahun 2025.

Selain bertambahnya tutupan lahan, dampak lain dari pendampingan yang dilakukan Sigit adalah kemandirian warga dalam memenuhi kebutuhan air. Melalui inovasi IPAH Hybrid, 90% warga sudah dapat memenuhi kebutuhan air baik untuk rumah tangga maupun pertanian. Hal ini juga tentunya berdampak pada penghematan pengeluaran pembelian air bagi masyarakat.

Tak hanya itu, kegiatan pemberdayaan yang digagas Sigit telah berdampak pada peningkatan taraf ekonomi masyarakat. Berdasarkan data yang bersumber dari Dinas Lingkungan dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah, Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) beberapa kelompok tani binaan telah tercatat meningkat pendapatannya, antara lain KTH Sumber Wono (peningkatan pendapatan 370,11%), KTH Anting Putri (peningkatan pendapatan 569,29%), KTH Wono Tirto Lestari (peningkatan pendapatan 420%), dan LMDH Banyurip Lestari (peningkatan pendapatan 81,38%).



# Success Story

## Sugiharto

merupakan salah seorang teladan Wana Lestari Terbaik I Tingkat Nasional yang berasal dari Cabang Dinas Kehutanan (CDK) wilayah VIII Provinsi Jawa Tengah. Sugiharto telah mengabdikan sebagai PKSM selama 18 tahun. Sebagai PKSM Sugiharto juga mendampingi masyarakat dan KTH di wilayah binaannya yaitu Kecamatan Kaligesing, Kabupaten Purworejo, Provinsi Jawa Tengah. Sugiharto tidak serta merta menjadi PKSM. awalnya Sugiharto merupakan seorang direktur teknik disalah satu Perusahaan swasta. Berawal dari gempa bumi Yogyakarta tahun 2006 yang berkekuatan 6,3 skala richter yang berdampak pada Desa Donorejo Kec. Keligesing, Purworejo. Atas nasihat dari Ibunya, Sugiharto terpanggil untuk kembali ke kampungnya demi membangun desanya. Setelah pulang kampung dan tidak kembali lagi ke kota, Sugiharto mulai aktif membangun Desa Donorejo pada tahun 2007 dengan berbagai kegiatan pembangunan kehutanan seperti rehabilitasi hutan dan lahan, pemberdayaan masyarakat, pemanfaatan kawasan hutan sebagai sumber pakan ternak, pengembangan HHBK kopi, pengembangan jasa lingkungan ekowisata, dan sebagainya.



Kegiatan yang dilakukan Sugiharto atau sering disapa Mas Totok, menjadikannya didaulat oleh CDK setempat menjadi PKSM di daerah Kaligesing, Kabupaten Purworejo sejak tahun 2016. Saat ini keanggotaan Mas Totok sebagai PKSM sudah terregister di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh Mas Totok telah memberikan dampak nyata terhadap ekologi dan ekonomi di lingkungan Kecamatan Kaligesing Kabupaten Purworejo.

Mas Totok sangat aktif dalam melakukan kegiatan pembangunan kehutanan, beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan antara lain:

1. Melakukan rehabilitasi hutan dan lahan di lereng pegunungan Menoreh karena daerah tersebut tutupan lahannya sudah terbuka dan kondisi lahan bekas bencana alam;
2. Menenerapkan sistem agrosilvopasture yang memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi masyarakat yang didampingi;
3. Menjaga kelestarian Cagar Biosfer Menoreh Merapi yang telah ditetapkan oleh UNESCO;
4. Menyusun Peraturan Kepala Desa tentang konservasi satwa/perlindungan satwa dan data hasil identifikasi satwa bersama Yayasan Burung Indonesia dan Yayasan Kanopi Indonesia;
5. Pengembangan jasa lingkungan ekowisata di Lereng Pegunungan Menoreh dalam rangka pemanfaatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat; 6). Pelestarian kebun buah genetik lokal seperti buah Manggis dan Durian.

Kegiatan yang telah dilakukan oleh Sugiharto berdampak pada positif baik terhadap lingkungan maupun terhadap masyarakat sekitar. Dampak kegiatan pembangunan kehutanan yang dilakukan oleh Mas Totok sangat signifikan dari segi ekologi terbukti dengan perubahan tutupan lahan dan kondisi lahan bekas bencana alam. Berdasarkan penampakan dari citra satelit menunjukkan perubahan signifikan di areal tersebut yang awalnya rusak sekarang menjadi hijau Kembali. Membaiknya ekologi di daerah tersebut berdampak pada membaiknya habitat satwa di wilayah binaan PKSM. Hal ini tentu sangat mendukung kelestarian Cagar Biosfer Menoreh Merapi yang telah ditetapkan oleh UNESCO. Penerapan sistem agrosilvopasture pada kelompok dampingan memberikan dampak peningkatan ekonomi berdasar data capaian NTE di 2 (dua) kelompok binaan PKSM terjadi peningkatan rata-rata selama kurun waktu 4 tahun sejak tahun 2022 s.d tahun 2025.



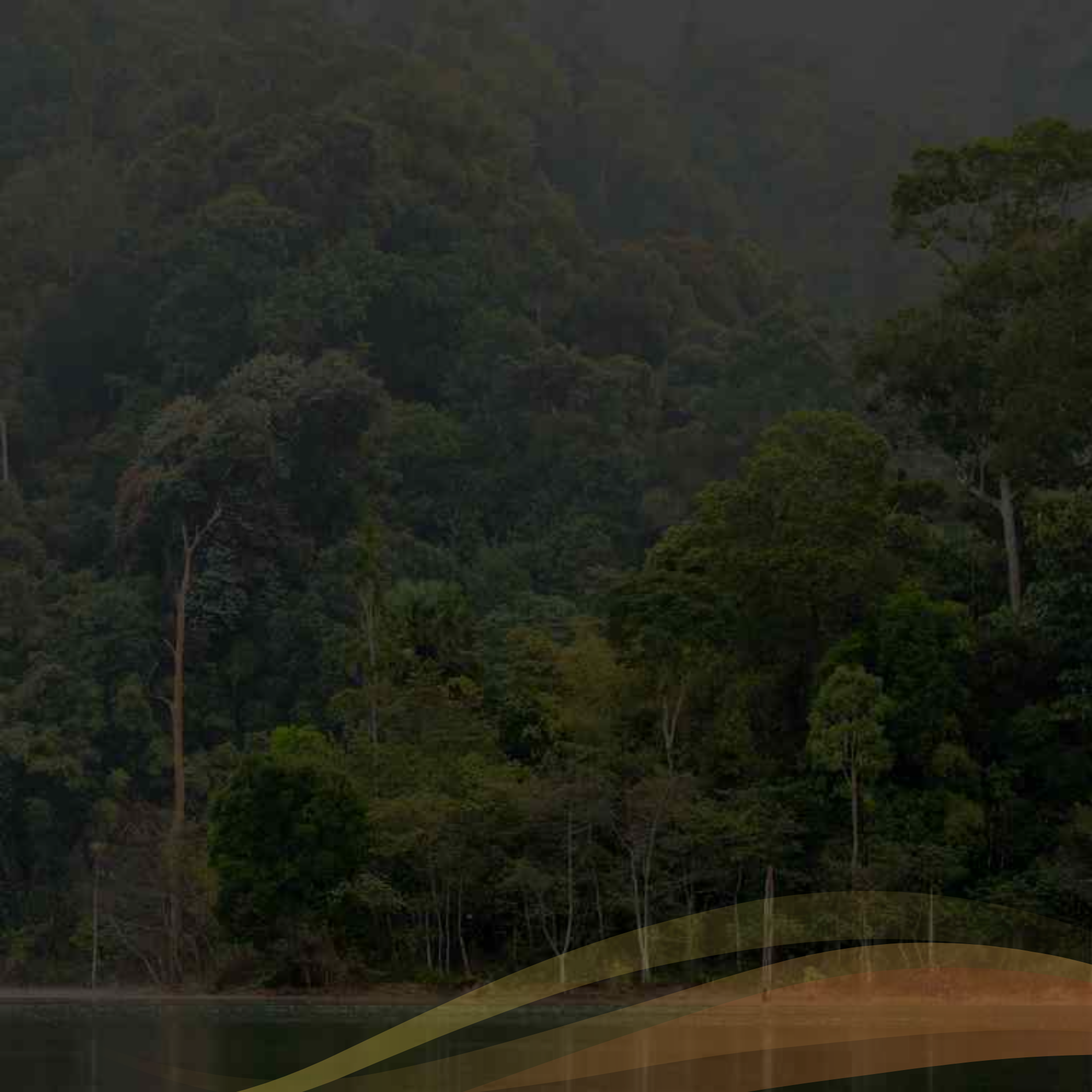
Selain beberapa kegiatan yang telah dilakukan di atas, Sugiharto juga melakukan kegiatan yang dilakukan sebagai bagian dari inovasi. Kegiatan tersebut antara lain:

- » Menginisiasi acara kenduren kopi yang merupakan sebagai unsur sosial budaya sekaligus memperkenalkan tradisi daerah Purworejo sebagai media penyuluhan dengan masyarakat dan instansi terkait;
- » Pembuatan kandang kambing etawa dengan memperhatikan prinsip kesehatan hewan ternak. Hal tersebut dimaksudkan agar kambing lebih sehat terhindar dari penyakit penemuan, tidak terjadi kekurangan kalsium yang dibangkitkan dari sinar matahari, minim terjadi keguguran karena desain penampang lantai melintang dan minim terjadi prolaps karena tinggi tempat pakan sesuai.

Keberhasilan PKSM dalam inovasi branding yang telah diakui dan diberikan sertifikat branding produk berbasis identitas geografis (Kambing Etawa galur Kaligesing) oleh Kementerian Pertanian. Mas Totok juga aktif melakukan penyuluhan, berbagi informasi dan menjadi narasumber di Kanal media sosial (IG & FB: Toto Gunung Kelir) dan Youtube Pribadi (Gunung Kelir Cipta Mandiri) serta Nasional (TVRI, INTANI, BAGELAN Channel).

Selain berinovasi, Mas Totok juga aktif menjalin kemitraan dengan berbagai pihak baik pemerintah maupun LSM dalam pengembangan produk atau kegiatan pelestarian alam seperti dengan UNS, BRIN, Yayasan Burung Indonesia dan Yayasan Kanopi Indonesia.





# Success Story

KTH PEDULI WISATA KARANGTIRTA MEMBANGUN KEMANDIRIAN

## Arini Budiani, S.TP

Di Desa Ngombak, Grobogan, Jawa Tengah ada cerita menarik tentang bagaimana pendampingan dan semangat belajar dapat mengubah cara para petani bertani dan membangun kemandirian pangan. Kelompok Tani Hutan (KTH) Mekar Jaya, yang sebelumnya hanya mengandalkan pola pertanian subsisten, kini mulai menunjukkan wajah baru: lebih terorganisir, lebih percaya diri, dan lebih produktif.

Sebelum program Fasilitasi Agroforestry Pangan dan Energi-Perhutanan Sosial (FAPE PS) hadir, para petani di Blok Ngrapah-Prigi menghadapi berbagai tantangan. Lahan kurang produktif, ketergantungan pada pupuk kimia cukup tinggi, belum banyak inovasi dalam mengolah hasil panen, dan kelembagaan kelompok masih lemah. Namun keadaan tersebut perlahan berubah ketika pendampingan mulai dilakukan secara rutin.

Melalui rangkaian pelatihan, bimbingan teknis, diskusi kelompok, hingga praktik lapangan, para petani diperkenalkan pada konsep agroforestry—kolaborasi antara tanaman hutan dan tanaman pangan. Mereka belajar membuat pupuk organik, melakukan konservasi tanah dan air, hingga menata ulang sistem tanam agar lebih ramah lingkungan dan berkelanjutan. Setelah beberapa bulan berjalan, upaya itu membuahkan hasil. Produktivitas lahan meningkat, kerentanan terhadap gagal panen menurun, dan pola pikir petani pun berubah dari sekadar bercocok tanam untuk bertahan hidup menjadi bercocok tanam untuk berkembang.



Tak hanya berhenti pada peningkatan produksi, program FAPE PS juga mendorong lahirnya berbagai inovasi usaha. Jagung yang sebelumnya hanya dijual pipilan, kini diolah menjadi emping jagung yang lebih bernilai tambah. Prosesnya dilakukan bersama: mulai dari pelatihan, pengolahan, penjemuran, hingga pengepakan. Begitu pula dengan hasil hutan seperti kayu balsa dan buah sawo yang kini dipanen lebih terencana dan memenuhi standar mutu pasar.

Di sisi kelembagaan, KTH Mekar Jaya tampil lebih solid. Mereka rutin mengadakan pertemuan, menyusun SOP budidaya, serta mengelola administrasi dan bantuan dengan lebih tertib. Dengan adanya fasilitas demfarm agroforestry, wilayah mereka kini menjadi model pembelajaran yang bisa direplikasi di desa lain. Kelembagaan yang awalnya rapuh kini tumbuh menjadi kelompok yang mampu mengambil keputusan bersama dan merencanakan usaha secara mandiri.

Pendamping program, Arini Budiani, menggambarkan proses ini sebagai transformasi sosial yang mendalam. Baginya, melihat petani berani mencoba teknologi baru, berdiskusi lebih terbuka, dan bekerja lebih kompak adalah bentuk kemajuan yang tak ternilai. "Ini bukan sekadar transfer ilmu," katanya, "tapi perjalanan bersama untuk memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan".

Perubahan kecil yang dilakukan setiap hari—menanam bibit bersama, membuat emping jagung, mengecek panen balsa, hingga sekedar berdiskusi di teras rumah—ternyata memberi dampak besar. Program pendampingan ini bukan hanya tentang meningkatkan produksi pangan, tetapi juga tentang menghadirkan harapan baru bagi petani di tengah dinamika perubahan iklim dan pasar.

Kisah KTH Mekar Jaya adalah bukti bahwa ketika pengetahuan, pendampingan, dan kemauan untuk belajar bertemu dalam satu titik, kemandirian pangan bukan lagi mimpi, tetapi kenyataan yang terus tumbuh dari desa.





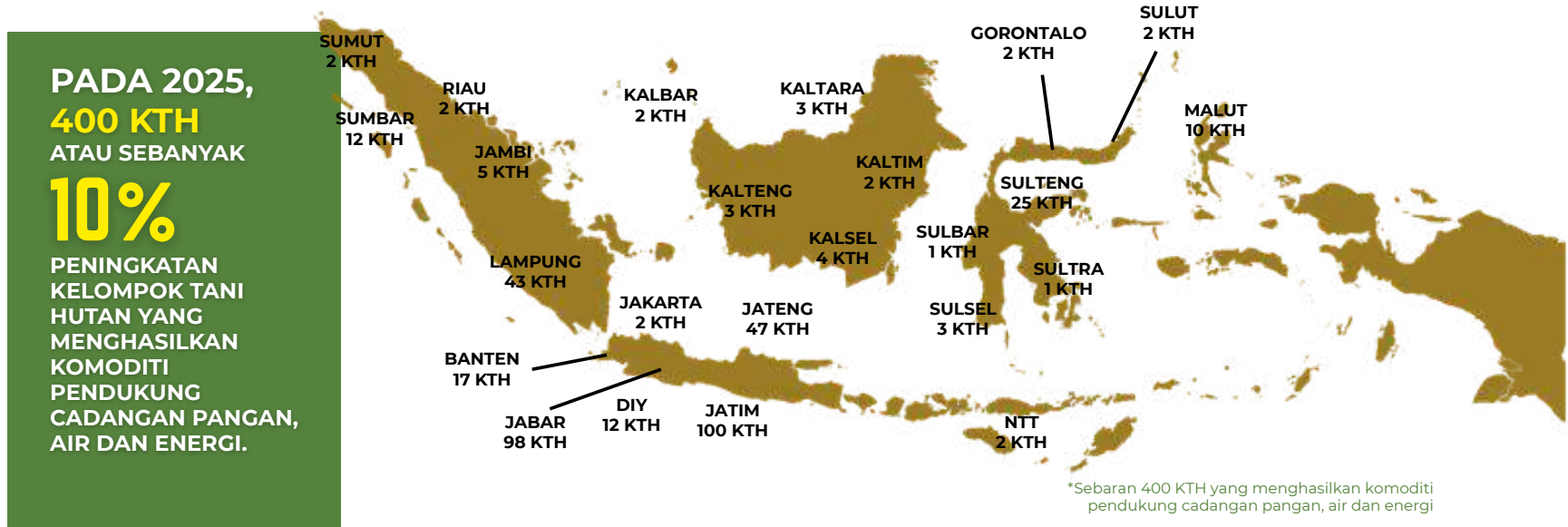
Indikator Kinerja Kegiatan  
**KELOMPOK TANI HUTAN YANG DILIBATKAN  
DALAM PENGELOLAAN HUTAN**

## Capaian Kinerja

Keterlibatan Kelompok Tani Hutan (KTH) dalam pengelolaan hutan merupakan perwujudan dari strategi yang menempatkan masyarakat sebagai aktor kunci, bukan sekadar objek pembangunan. Secara deskriptif, keterlibatan ini bermakna adanya transformasi peran masyarakat di sekitar kawasan hutan, dari aktivitas yang bersifat sporadis dan tidak terorganisir menjadi sebuah entitas kolektif yang legal dan terstruktur. Melalui wadah KTH, masyarakat diberikan akses resmi dan tanggung jawab untuk mengelola kawasan hutan, yang mencakup aspek perlindungan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, hingga pengembangan jasa lingkungan secara berkelanjutan.

Pada praktiknya, keterlibatan ini bukan hanya soal izin administrasi, melainkan proses pendampingan yang intensif untuk mengubah pola pikir masyarakat dari pemanfaatan hutan yang ekstraktif menjadi pengelolaan yang berwawasan lingkungan. Pendampingan tersebut diarahkan untuk memperkuat tiga pilar utama kelompok, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Dengan keterlibatan yang optimal, KTH berfungsi sebagai garda terdepan dalam menjaga kelestarian hutan di tingkat tapak, karena masyarakat merasa memiliki kepentingan langsung terhadap kesehatan ekosistem hutan yang menjadi sumber mata pencaharian mereka. Keterlibatan KTH dalam pengelolaan hutan merupakan salah satu indikator kinerja utama yang mencerminkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan kehutanan.

Target yang ditetapkan pada Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Kelompok Tani Hutan yang Dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan adalah 4.400 Kelompok, dengan baseline yang telah ditentukan pada tahun 2024 sebanyak 4.000 kelompok. Pelibatan KTH dalam pengelolaan hutan dilakukan terutama pada desa-desa yang merupakan lokasi Proyek Strategis Nasional Ketahanan Pangan dari Perhutanan Berbasis Masyarakat yang telah ditentukan setiap tahunnya sesuai dengan RPJMN 2025-2029.



Pada Tahun 2025, capaian kinerja indikator ini mencapai 100 persen, dengan jumlah KTH yang terlibat sebanyak 4.400 kelompok sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan keberhasilan Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam memperluas jangkauan pendampingan serta memperkuat peran KTH sebagai pelaku utama pengelolaan hutan di tingkat tapak.

Pelibatan KTH dilakukan melalui berbagai kegiatan pendampingan, penyuluhan, fasilitasi peningkatan kemandirian KTH, fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya serta kegiatan pemagangan. Seluruh intervensi tersebut dirancang untuk memperkuat fungsi penyuluhan sebagai motor penggerak pembangunan kehutanan di tingkat tapak.

## **Output dan Outcome**

Output yang dihasilkan dari Indikator Kinerja Kegiatan ini antara lain meningkatnya jumlah KTH yang terlibat secara aktif dalam pengelolaan hutan yaitu penambahan 400 kelompok pada tahun 2025 atau 10 persen dari baseline 4.000 kelompok, tersusunnya rencana kerja kelompok, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan dan teknis KTH dalam mengelola kawasan hutan dan usaha berbasis hasil hutan. Selain itu, KTH juga mendapatkan akses yang lebih baik terhadap informasi, pelatihan, dan fasilitasi pendukung lainnya.

Adapun outcome yang diharapkan dan mulai terlihat adalah terwujudnya pengelolaan hutan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis masyarakat. Keterlibatan KTH secara optimal berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan anggota kelompok melalui pengembangan usaha kehutanan dan diversifikasi sumber pendapatan, sekaligus memperkuat fungsi hutan dalam menjaga

keseimbangan ekologi. Partisipasi aktif masyarakat juga mendorong tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap kelestarian hutan.

## **Efektivitas**

IKK Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan merupakan IKK baru yang ditetapkan pada tahun Renstra 2025-2029. Di tahun pertama ini, capaian realisasi untuk IKK Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan mencapai 100 persen atau 4.400 kelompok.

IKK Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan ini belum dapat dianalisis efektivitasnya secara year-on-year, hal ini disebabkan indikator-indikator tersebut baru ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembandingan dari tahun sebelumnya.

## **Efisiensi**

Pencapaian kinerja Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan terhadap target sebesar 100% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp.726.892.425,- atau sebesar 99,96% dari pagu anggaran Rp.727.187.000,-, sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 1,00 dengan kategori efisien. Secara nyata, Pusat Penyuluhan Kehutanan melakukan upaya-upaya efisiensi dalam melakukan intervensi terhadap Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan seperti pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi dengan metode daring ataupun hybrid, serta penggunaan aplikasi SIMLUH untuk menyeleksi calon penerima dan juga googledrive untuk pengumpulan usulan proposal fasilitasi yang didampingi oleh penyuluh kehutanan secara online dan real time.

## Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Kelompok Tani Hutan yang dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

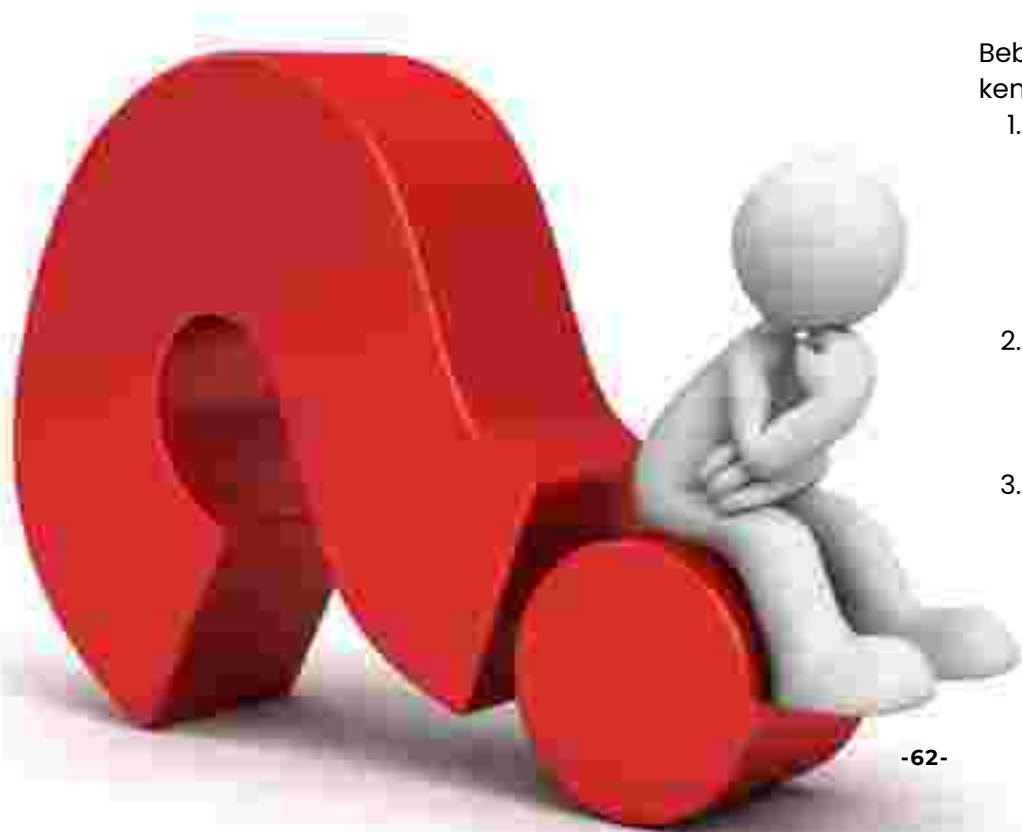
1. Perbedaan tingkat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia antar-KTH,
2. Keterbatasan akses permodalan dan pasar bagi sebagian kelompok
3. Tantangan dalam menjaga konsistensi partisipasi anggota kelompok
4. Faktor geografis dan kondisi sosial ekonomi wilayah tertentu juga mempengaruhi intensitas dan efektivitas pendampingan yang diberikan.



## Upaya Tindak Lanjut

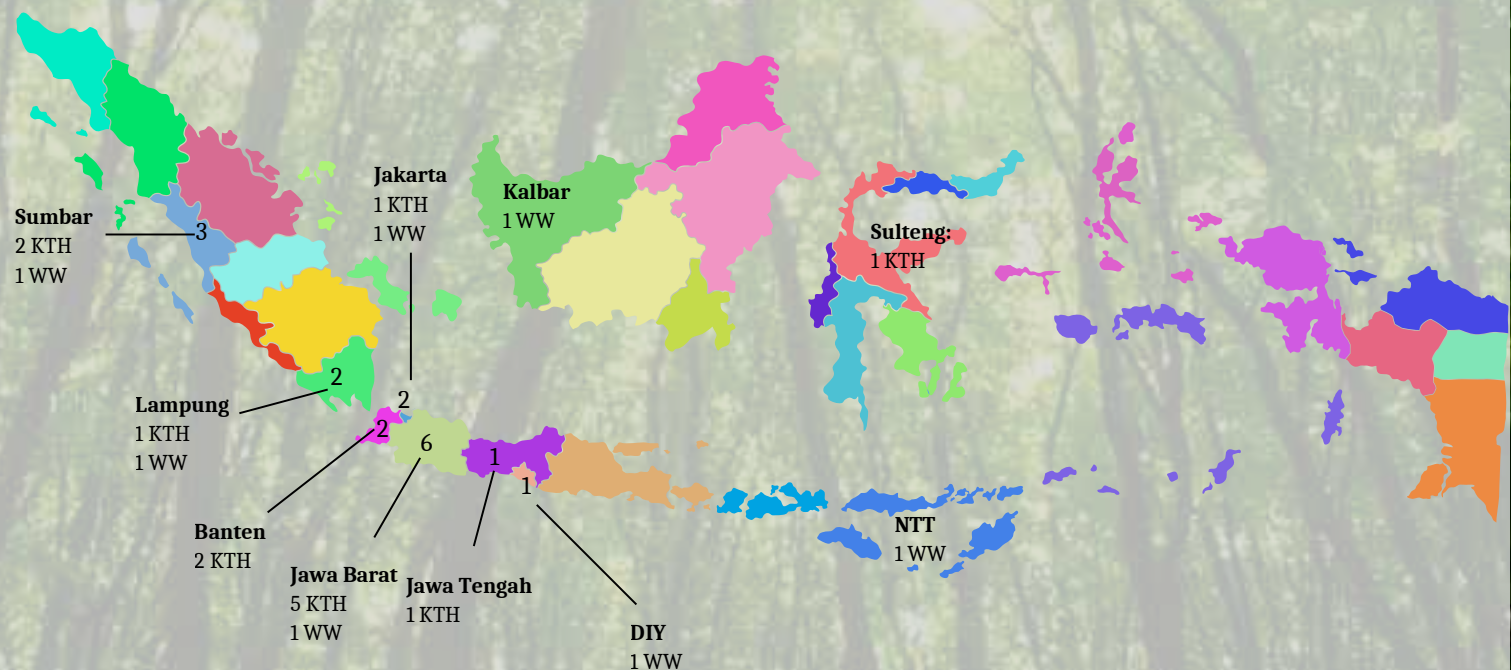
Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

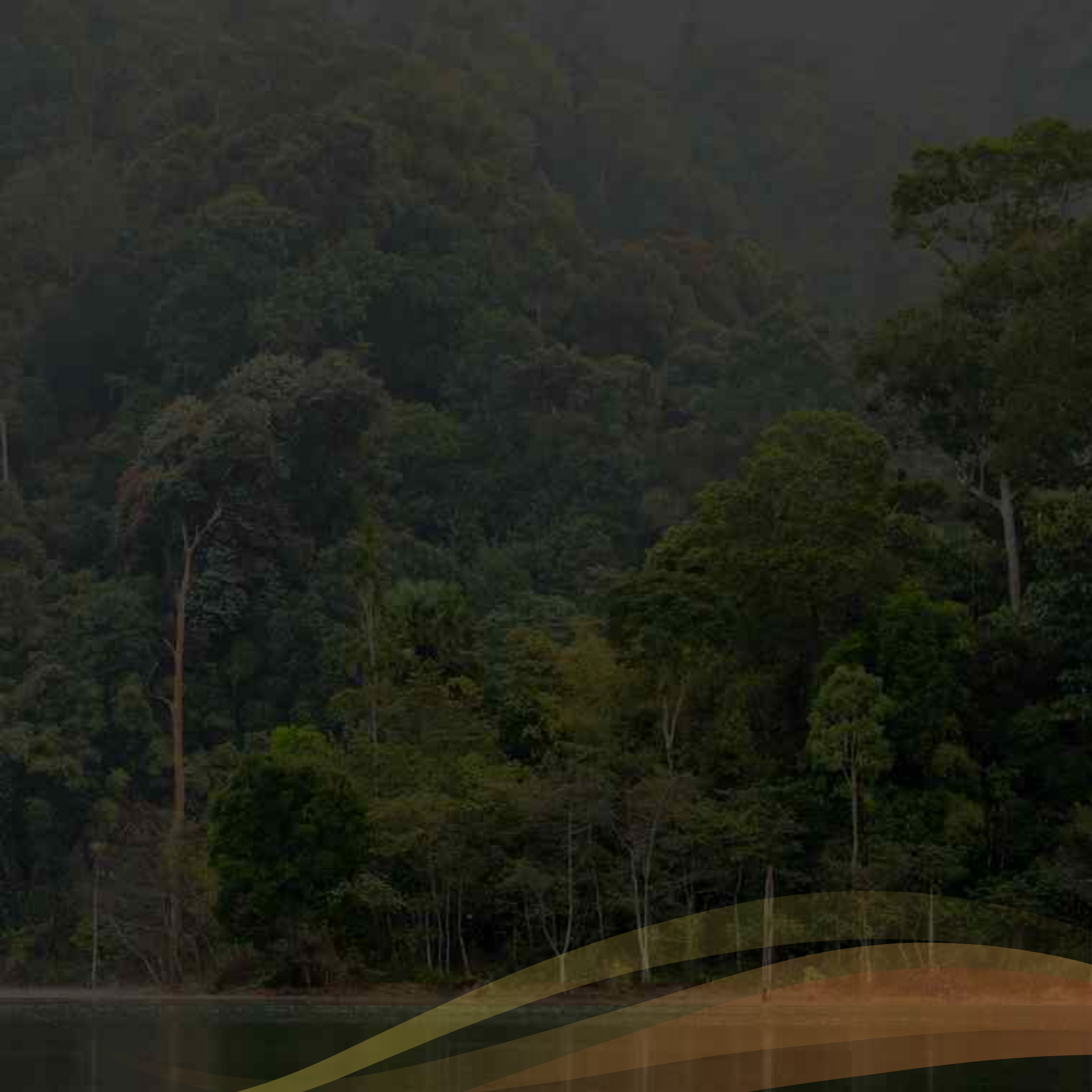
1. Pusat Penyuluhan Kehutanan akan terus memperkuat kapasitas KTH melalui pelatihan berkelanjutan, pendampingan usaha, serta fasilitasi kemitraan dengan pihak swasta, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Pendekatan diferensiasi pendampingan juga akan diterapkan untuk menyesuaikan intervensi dengan tingkat perkembangan masing-masing KTH.
3. Pemanfaatan teknologi informasi dan penguatan jejaring antar-KTH diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pembinaan, memperluas akses pasar, serta mendorong kemandirian dan keberlanjutan pengelolaan hutan berbasis masyarakat.



## Capaian Kinerja pada Rincian Output (RO)

Dalam mendukung tercapainya Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa, berdasarkan Renstra Badan P2SDM Tahun 2025-2029, IKK diterjemahkan lagi menjadi Rincian Output yang tertuang di dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKA-K/L). Pusat Penyuluhan Kehutanan melalui Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan mempunyai target Rincian Output (RO) sebanyak 20 Kelompok Masyarakat Peningkatan Kemandirian Usaha Kelompok Tani Hutan. Target tersebut dicapai melalui kegiatan sebagai berikut:





# Success Story

## KTH MANDIRI 2025

### KTH PEDULI WISATA KARANGTIRTA MEMBANGUN KEMANDIRIAN



Desa Sukaresik, Sidamulih, Pangandaran Jawa Barat memiliki kawasan pantai yang terus berubah. Pantainya terancam abrasi dan pasang surut. Di tengah tantangan itulah KTH Peduli Wisata Karangtirta menapaki jalan menuju kemandirian. Kelompok tani hutan ini sudah berdiri sejak 2011, namun baru beberapa tahun terakhir geliatnya semakin terasa. Beranggotakan 25 orang, mereka bergerak di bidang pembibitan tanaman pantai seperti mangrove dan cemara laut, serta jasa lingkungan berbasis ekowisata. Meski potensi alam melimpah, modal usaha terbatas dan pengelolaan kelompok belum optimal membuat perkembangan mereka berjalan perlahan. Kegiatan KTH mulai berubah ketika fasilitasi pembentukan KTH Mandiri 2025 hadir membawa dukungan, pendampingan, dan fasilitasi dari Pusat Penyuluhan Kehutanan, BP2SDM, Kementerian Kehutanan. Kegiatan tersebut ini bukan hanya memberikan dana, tetapi juga memberikan arah tentang bagaimana kelompok bisa membangun kelembagaan yang kuat, mengelola kawasan pesisir secara lestari, hingga mengembangkan usaha yang bernilai ekonomi.

Perubahan pertama dalam kelola kelembagaan yaitu administrasi yang sebelumnya berantakan dibenahi, papan nama diperbaiki, buku-buku pencatatan dibuat lebih rapi, dan profil kelompok disusun ulang dengan lebih lengkap. Pelatihan pembibitan cemara laut dan mangrove menjadi titik awal meningkatnya kapasitas anggota. Yang menarik, perubahan ini menumbuhkan hal lain yang lebih penting yaitu kebersamaan. Anggota yang dulunya pasif kini lebih aktif dalam rapat, diskusi, dan kerja lapangan. Kelembagaan yang tadinya hanya formalitas, mulai terasa hidup.

Pantai Karangtirta bukan kawasan yang mudah dikelola. Angin kencang, abrasi, dan pasang surut membuat banyak bibit tanaman tak bertahan lama. Namun dengan pendampingan, KTH mulai menyusun rencana rehabilitasi yang lebih terarah. Penanaman dilakukan lebih terencana, edukasi mangrove untuk pelajar mulai digalakkan, dan paket wisata edukasi merangkak tumbuh di kawasan yang dulu hanya dikenal sebagai destinasi pantai biasa. Ketika bibit cemara laut digulung ombak, kelompok tidak menyerah. Mereka mengganti metode persemaian dengan rak bersusun dan nampan. Ketika abrasi datang, mereka membuat tanggul sederhana dari karung pasir dan bambu. Bukan solusi besar, tetapi langkah kecil yang mampu membuat perubahan nyata.

Sebelum mendapatkan fasilitasi, usaha KTH masih terbatas pada pembibitan kecil-kecilan. Dana fasilitasi terdiri dari pembibitan mangrove dan pembibitan cemara laut serta penambahan tenda dan hamok untuk paket wisata mangrove. Dengan adanya fasilitasi tersebut usaha pembibitan dan ekowisata mulai berkembang. Pendapatan meningkat dari penyewaan sarana wisata. NTE kelompok mulai naik meskipun masih dalam tahap awal pengembangan. Kemandirian yang dulu hanya menjadi harapan, kini mulai tampak jalannya.

Selain itu, tercipta juga kolaborasi yang saling menguatkan. Kerja sama yang dulu hanya bersifat proyek, kini mulai berubah menjadi kemitraan jangka panjang. KTH Peduli Wisata Karangtirta belum sepenuhnya mandiri. Masih banyak tantangan: cuaca ekstrem, ketergantungan musim tanam, keterbatasan sarana wisata, hingga tuntutan pasar yang semakin tinggi. Namun, sudah ada fondasi awal. Kelompok telah membuktikan bahwa perubahan tidak selalu datang dari langkah besar, tetapi dari keberanian mencoba dan tidak berhenti bergerak. KTH Peduli Wisata Karangtirta berharap ke depannya dapat menjadi kelompok yang benar-benar mandiri dalam segala hal didukung oleh semua pihak.



# Success Story

## PEMBENTUKAN WANAWIYATA WIDYAKARYA TAHUN 2025

### WANAWIYATA WIDYAKARYA RAHAYU JAYA

Salah satu KTH yang mendapatkan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya tahun 2025 yaitu KTH Rahayu Jaya. Kelompok Tani Hutan (KTH) Rahayu Jaya diketuai oleh Hasan Mashadi dan penyuluh kehutanan pendamping Rusdianto, S.Hut. KTH Rahayu Jaya merupakan salah satu KTH binaan Balai Taman Nasional Way Kambas yang dibentuk pada tanggal 28 Januari 2020 atas inisiatif warga agar bisa ikut andil dalam merawat/menjaga hutan Taman Nasional Way Kambas agar tidak terjadi kebakaran hutan di sekitar domisil KTH Rahayu Jaya. KTH Rahayu Jaya beralamatkan di Desa Labuhan Ratu VII, Kecamatan Labuhan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung. KTH Rahayu Jaya bergerak di kegiatan merestorasi hutan, perawatan hutan, penjagaan hutan dan usaha bersama di bidang wisata edukasi, ternak kambing dan budidaya lebah trigona. Pada kegiatan merestorasi hutan di dalam kawasan TN Way Kambas, pada tanggal 22 September 2020 KTH Rahayu Jaya melakukan perjanjian kerjasama untuk pemulihan ekosistem seluas 50 Ha selama 5 tahun di zona rehabilitasi di RPTN Margahayu SPTN Wilayah III Kuala Penet Taman Nasional Way Kambas Tahun 2020-2025. Pada September 2025 KTH Rahayu Jaya dapat menyelesaikan kewajiban untuk merestorasi hutan seluas 50 Ha dan unit usahanya sudah berjalan sehingga menjadi areal/lokasi praktek dan edukasi dari pelajar/mahasiswa serta menjadi salah satu lokasi tujuan wisata edukasi bagi wisatawan umum.



KTH Rahayu Jaya setelah mendapatkan fasilitasi pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2025 telah ditetapkan menjadi Wanawiyata Widyakarya melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 11479 Tahun 2025 tentang Penetapan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2025 pada tanggal 8 Desember 2025. Wanawiyata Widyakarya adalah model usaha di bidang kehutanan dan atau lingkungan hidup yang dimiliki dan dikelola oleh kelompok masyarakat atau perorangan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan sebagai percontohan, tempat pelatihan dan magang bagi masyarakat lainnya. KTH Rahayu Jaya juga telah mendapatkan sertifikat Kelas Utama dengan nomor sertifikat 500.4.2.3/44/v.24/B.IV.1/2024.

Nilai Transaksi Ekonomi dari usaha kehutanan yaitu wisata edukasi dengan penjualan 48 paket senilai Rp.96.000.000,-, ternak kambing 30 ekor Rp.45.000.000,- dan budidaya lebah trigona 120 botol madu senilai Rp.12.000,-.

## Dampak adanya fasilitasi bagi Kelompok

### Sebelum Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2025

- ▶ Belum ditetapkan menjadi Wanawiyata Widyakarya
- ▶ Kapasitas fasilitator wanawiyata widyakarya masih kurang
- ▶ Belum memiliki Papan Nama Wanawiyata Widyakarya,
- ▶ Kelengkapan sekretariat belum lengkap
- ▶ Kelengkapan Sarpras pendukung pelatihan belum lengkap
- ▶ Kelengkapan peralatan untuk peningkatan usaha belum lengkap

### Setelah Fasilitasi Pembentukan Wanawiyata Widyakarya Tahun 2025

- ▶ Sudah ditetapkan menjadi Wanawiyata Widyakarya Pule Payung dalam Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 11479 Tahun 2025
- ▶ Fasilitator Wanawiyata Widyakarya Mendapatkan Pelatihan Pengelola Wanawiyata Widyakarya (manajemen dan teknis)
- ▶ Sudah ada Papan Nama Wanawiyata Widyakarya Rahayu Jaya
- ▶ Kelengkapan sekretariat yang lebih memadai dengan pengadaan kursi bambu, meja bambu, flipchart/papan tulis, kertas flipchart, kipas angin
- ▶ Kelengkapan Sarpras pendukung pelatihan dan pemagangan yang lebih memadai dengan pengadaan proyektor, stabilizer, layar proyektor (gantung), kabel rol, stop kontak, sound system, kabel jek ausio, microphone stand dan microphone bluetooth
- ▶ Pengembangan Usaha dengan peningkatan stup trigona itama dan bibit kakao





Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung IKP Badan P2SDM

**NILAI TRANSAKSI EKONOMI  
KELOMPOK TANI HUTAN**

## Capaian Kinerja

Kelompok Tani Hutan (KTH) selama ini menjadi pilar penting dalam pelaksanaan pembangunan kehutanan berbasis masyarakat. Di banyak wilayah, KTH bukan hanya menjadi mitra pemerintah dalam pengelolaan kawasan hutan, tetapi juga menjadi penggerak utama aktivitas ekonomi masyarakat sekitar hutan. Berbagai usaha mulai dari pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, pengolahan sederhana hasil hutan, hingga jasa lingkungan dan ekowisata telah tumbuh dan berkembang, meskipun dengan tingkat keberhasilan yang beragam. Kondisi ini menunjukkan bahwa upaya pemberdayaan KTH telah berjalan, namun masih membutuhkan instrumen yang mampu menggambarkan capaian ekonominya secara lebih nyata dan terukur.

Dalam praktiknya, keberhasilan pembinaan KTH sering kali dinilai dari aspek administratif atau jumlah kelompok yang terbentuk, sementara dampak ekonomi yang sesungguhnya dirasakan oleh kelompok belum sepenuhnya tergambarkan dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan suatu ukuran yang sederhana namun substantif, yang dapat menunjukkan sejauh mana KTH telah berkembang sebagai entitas usaha.

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH dipandang sebagai indikator yang relevan karena secara langsung merekam aktivitas ekonomi riil yang dilakukan oleh kelompok dalam berinteraksi dengan pasar. Indikator ini juga dapat mengukur dampak intervensi Badan P2SDM melalui kegiatan pembinaan kelembagaan kelompok masyarakat dan peningkatan kapasitas Penyuluh Kehutanan yang dilaksanakan oleh Pusat Penyuluhan Kehutanan, bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam berbagai kegiatan penyuluhan kehutanan. NTE KTH didefinisikan sebagai nilai rupiah yang dihasilkan dari aktivitas usaha kelompok tani hutan. Perhitungan NTE mencakup penjumlahan omzet seluruh KTH,

yang meliputi produk barang dan/atau jasa, termasuk hasil hutan kayu, hasil hutan bukan kayu, serta produk turunan lainnya yang berkontribusi terhadap omzet selama kurun waktu satu tahun.

Tujuan utama dari perhitungan nilai transaksi ini bukan semata-mata untuk mengumpulkan angka, melainkan untuk memahami dinamika ekonomi kelompok secara lebih objektif. Melalui data tersebut, dapat diketahui kelompok mana yang telah tumbuh dan mandiri, kelompok yang masih memerlukan penguatan, serta dapat digali informasi terkait faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun kurang berkembangnya usaha KTH. Informasi ini sangat penting sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan, penentuan prioritas pendampingan, dan penajaman arah programa penyuluhan ke depan. Bagi KTH sendiri, pencatatan dan penghitungan transaksi dapat mendorong kelompok untuk lebih tertib dalam mengelola usaha, memahami arus keuangan, serta meningkatkan kepercayaan diri dalam menjalin kemitraan dengan pihak lain. Sementara itu, bagi mitra usaha dan pemangku kepentingan, Kelompok Tani yang memiliki pembukuan usaha yang baik dapat menjadi indikator awal dalam menilai potensi dan kelayakan kerja sama dengan KTH.

Pengukuran Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan dilakukan dengan menghimpun seluruh data transaksi yang tercatat dalam kegiatan usaha kelompok selama periode satu tahun. Data tersebut bersumber dari catatan keuangan kelompok, bukti penjualan, laporan usaha, serta hasil wawancara dan konfirmasi di lapangan yang dilakukan oleh penyuluh atau pendamping. Data yang telah dihimpun selanjutnya diinput secara periodik, umumnya setiap bulan, melalui aplikasi Sistem Informasi Manajemen Penyuluhan Kehutanan (SIMLUH) oleh Penyuluh Kehutanan PNS yang telah diberikan akses. Untuk memastikan keakuratan dan kewajaran data yang dilaporkan, dilakukan proses

verifikasi dan konfirmasi secara virtual oleh Pusat Penyuluhan kepada para penyuluh di setiap provinsi. Pendekatan ini dipilih agar penghitungan Nilai Transaksi Ekonomi KTH tetap sederhana dan mudah diterapkan di lapangan, namun tetap memiliki tingkat akuntabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan.

Berdasarkan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan P2SDM dengan Menteri Kehutanan Tahun 2025, target Nilai Transaksi Ekonomi Kelompok Tani Hutan ditetapkan sebesar Rp700 Miliar. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa pada Tahun 2025 realisasi NTE KTH mencapai Rp3.399,11 Miliar, atau sebesar 485,59% dari target yang ditetapkan (presentase capaian kinerja dibatasi 150%). Apabila

dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024 yang sebesar Rp1,433 triliun, realisasi tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang signifikan. Peningkatan ini ditunjang dari peningkatan jumlah kelompok yang berpartisipasi dalam pengisian data NTE dari 6.511 Kelompok di tahun 2024 menjadi 10.490 kelompok di tahun 2025. Selain dari kuantitas jumlah kelompok, peningkatan juga terlihat dari produktivitas per kelompok dimana terdapat peningkatan omzet rata-rata dari Rp220,1jt/kelompok di tahun 2024 menjadi Rp324,03 jt/kelompok di tahun 2025. Kenaikan ini tidak hanya mencerminkan bertambahnya volume transaksi, tetapi juga menunjukkan semakin menguatnya kapasitas usaha KTH sebagai hasil dari pembinaan, pendampingan, serta dukungan kebijakan yang terus dilakukan secara konsisten.

**NILAI TRANSAKSI EKONOMI  
KELOMPOK TANI HUTAN BINAAN  
BP2SDM TAHUN 2025**  
**RP. 3.399.115.761.284,-**  
**1.354 PK ASN dan 10.490 KTH yang mengisi NTE**

Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) adalah nilai transaksi yang diperoleh dari aktivitas usaha kelompok tani hutan.

Penginputan data NTE KTH dilakukan oleh Penyuluh Kehutanan ASN melalui Aplikasi SIMLUH

Berdasarkan Aplikasi SIMLUH tanggal 31 Desember 2025

**Provinsi dengan  
NTE tertinggi**

**Jenis Barang Jasa  
dengan NTE tertinggi**

Jawa Timur  
Rp.1.633.482.011.347,-  
2.605 KTH

1

Hasil Hutan Kayu  
Rp.1.063.084.318.079,-

Jawa Barat  
Rp.637.954.726.319,-  
2.837 KTH

2

Kopi  
Rp.684.728.723.322,-

Lampung  
Rp.551.421.742.856,-  
2.666 KTH

3

Tanaman Pangan  
Hasil Agroforestri  
Rp.614.843.790.332,-

Jawa Tengah  
Rp.473.853.343.507,-  
1.276 KTH

4

Buah-buahan Dan  
Biji-bijian  
Rp.271.822.003.396,-

Sulawesi Tengah  
Rp.26.759.151.130,-  
153 KH

5

Hasil Wana Ternak  
(silvopastura)  
Rp.198.988.885.802,-

Berdasarkan Aplikasi SIMLUH tanggal 31 Desember 2025

Berdasarkan data Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) tahun 2024 dan 2025, secara nasional terlihat peningkatan yang sangat signifikan, baik dari sisi nilai transaksi maupun tingkat partisipasi Kelompok Tani Hutan (KTH). Total NTE meningkat dari Rp1,43 triliun pada tahun 2024 menjadi Rp3,399 triliun pada tahun 2025, atau mengalami kenaikan lebih dari dua kali lipat. Sejalan dengan itu, jumlah partisipasi KTH juga meningkat dari 6.511 KTH pada tahun 2024 menjadi 10.490 KTH pada tahun 2025, yang menunjukkan semakin luasnya keterlibatan kelompok dalam aktivitas ekonomi kehutanan.

Peningkatan NTE tersebut menunjukkan bahwa program pemberdayaan ekonomi KTH mulai memberikan dampak nyata terhadap aktivitas usaha kelompok, khususnya dalam pengelolaan hasil hutan kayu dan bukan kayu, jasa lingkungan, serta usaha turunan kehutanan lainnya. Kenaikan partisipasi KTH juga mengindikasikan semakin meningkatnya kesadaran, kapasitas, dan kepercayaan kelompok untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis kawasan hutan.

Provinsi Jawa Timur memperoleh Nilai Transaksi Ekonomi tertinggi nasional dengan omzet sebesar Rp1.633.482.011.347,00 dari 2.605 KTH. Pencapaian NTE yang tinggi tersebut tidak terlepas dari peran Penyuluh Kehutanan ASN sebanyak 270 orang dan 530 orang Penyuluh kehutanan swadaya masyarakat (PKSM) serta 71 orang Penyuluh Kehutanan Swasta. Penyuluh Kehutanan di Provinsi Jawa Timur memiliki komitmen dan motivasi yang tinggi untuk dapat melakukan pendataan nilai transaksi ekonomi kelompok binaan berkat dukungan dari Dinas Kehutanan Provinsi yang menjadikan NTE sebagai salah satu indikator kinerja penyuluh kehutanan. Hal tersebut perlu diterapkan pada seluruh provinsi lainnya sehingga pencatatan NTE secara nasional dapat lebih optimal.

Secara regional, kontribusi NTE terbesar masih berasal dari provinsi-provinsi dengan basis KTH yang kuat dan pendampingan yang relatif intensif. Provinsi Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Tengah, Jambi, dan Bengkulu menjadi penyumbang utama nilai transaksi ekonomi, baik pada tahun 2024 maupun 2025.

Di Pulau Jawa, peningkatan NTE cukup konsisten di Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur, seiring dengan meningkatnya jumlah KTH yang berpartisipasi. Hal ini mencerminkan kuatnya dukungan ekosistem kelembagaan, akses pasar, serta pendampingan yang relatif baik dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, provinsi Riau, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Bali, NTB, Sulawesi Barat dan beberapa provinsi lainnya menunjukkan penurunan nilai transaksi, yang mengindikasikan masih perlunya penguatan model usaha KTH yang sesuai dengan karakteristik wilayah maupun sosialisasi terkait pencatatan nilai transaksi ekonomi kelompok.

Di wilayah Indonesia Timur, seperti Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Papua, dan Papua Barat, meskipun kontribusi nilai transaksi secara nominal masih relatif kecil, terdapat kecenderungan peningkatan partisipasi KTH pada tahun 2025. Hal ini menunjukkan adanya potensi pengembangan ekonomi KTH yang masih terbuka luas, namun membutuhkan penguatan kapasitas, pendampingan usaha, serta dukungan akses permodalan dan pasar.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah provinsi yang belum mencatatkan nilai transaksi maupun partisipasi KTH, seperti Kepulauan Riau, Papua Tengah, Papua Pegunungan, dan Papua Selatan. Kondisi ini menjadi perhatian khusus dan menunjukkan perlunya strategi percepatan melalui pendampingan intensif, pemetaan potensi usaha kehutanan lokal, serta penguatan peran penyuluh dan mitra pembangunan di daerah.

**Tabel  
Rekapitulasi  
Nilai Transaksi  
Ekonomi  
Kelompok Tani  
Hutan**

No	Provinsi	NTE 2024		NTE 2025	
		Rp	Pasrtisipasi KTH	Rp	Partisipasi KTH
1	Aceh	182.925.000	8	533.906.000	32
2	Sumatera Utara	1.500.000	1	173.415.000	2
3	Sumatera Barat	257.331.000	24	1.482.806.200	27
4	Riau	327.930.000	9	152.965.000	6
5	Jambi	10.462.277.300	68	13.225.257.550	60
6	Sumatera Selatan	680.100.000	9	21.610.800	2
7	Bengkulu	13.873.375.500	26	13.279.440.750	11
8	Lampung	323.206.307.012	898	473.853.343.507	1.276
9	Bangka Belitung	263.540.500	16	15.824.500	1
10	Kepulauan Riau	0	0	0	0
11	DKI Jakarta	144.312.000	8	19.829.000	3
12	Jawa Barat	332.555.476.456	2.246	637.954.726.319	2.837
13	Jawa Tengah	66.951.836.338	324	551.421.742.856	2.666
14	DI Yogyakarta	5.669.990.000	135	11.202.289.292	208
15	Jawa Timur	624.529.990.335	2.025	1.633.482.011.347	2.605
16	Banten	6.225.098.900	95	8.147.187.070	119
17	Bali	823.861.972	6	55.106.000	1
18	Nusa Tenggara Barat	4.993.607.500	28	78.822.500	4
19	Nusa Tenggara Timur	517.313.607	63	462.080.375	42
20	Kalimantan Barat	3.266.083.500	27	1.031.842.000	24
21	Kalimantan Tengah	3.897.634.598	30	1.357.282.050	18
22	Kalimantan Selatan	3.854.778.952	140	8.303.737.199	144
23	Kalimantan Timur	1.343.366.500	20	1.790.035.650	22
24	Kalimantan Utara	0	0	254.324.000	7
25	Sulawesi Utara	1.732.454.000	2	2.124.503.790	36
26	Sulawesi Tengah	17.246.026.376	124	26.759.151.130	153
27	Sulawesi Selatan	6.673.157.635	108	8.625.616.999	93
28	Sulawesi Tenggara	273.550.016	22	147.207.500	20
29	Gorontalo	910.832.000	9	502.205.800	9
30	Sulawesi Barat	1.403.715.000	12	424.758.000	5
31	Maluku	216.701.250	9	109.900.000	7
32	Maluku Utara	342.068.150	14	2.053.029.100	46
33	Papua Barat	70.000.000	1	1.504.000	1
34	Papua	178.200.000	4	68.300.000	3
35	Papua Tengah	0	0	0	0
36	Papua Pegunungan	0	0	0	0
37	Papua Selatan	0	0	0	0
<b>Total</b>		<b>1.433.074.741.397</b>	<b>6.511</b>	<b>3.399.115.761.284</b>	<b>10.490</b>

# Success Story

## KTH NTE

**KTH NURUL AMAL**

*Sentra Ekonomi  
Kretait Hutan*



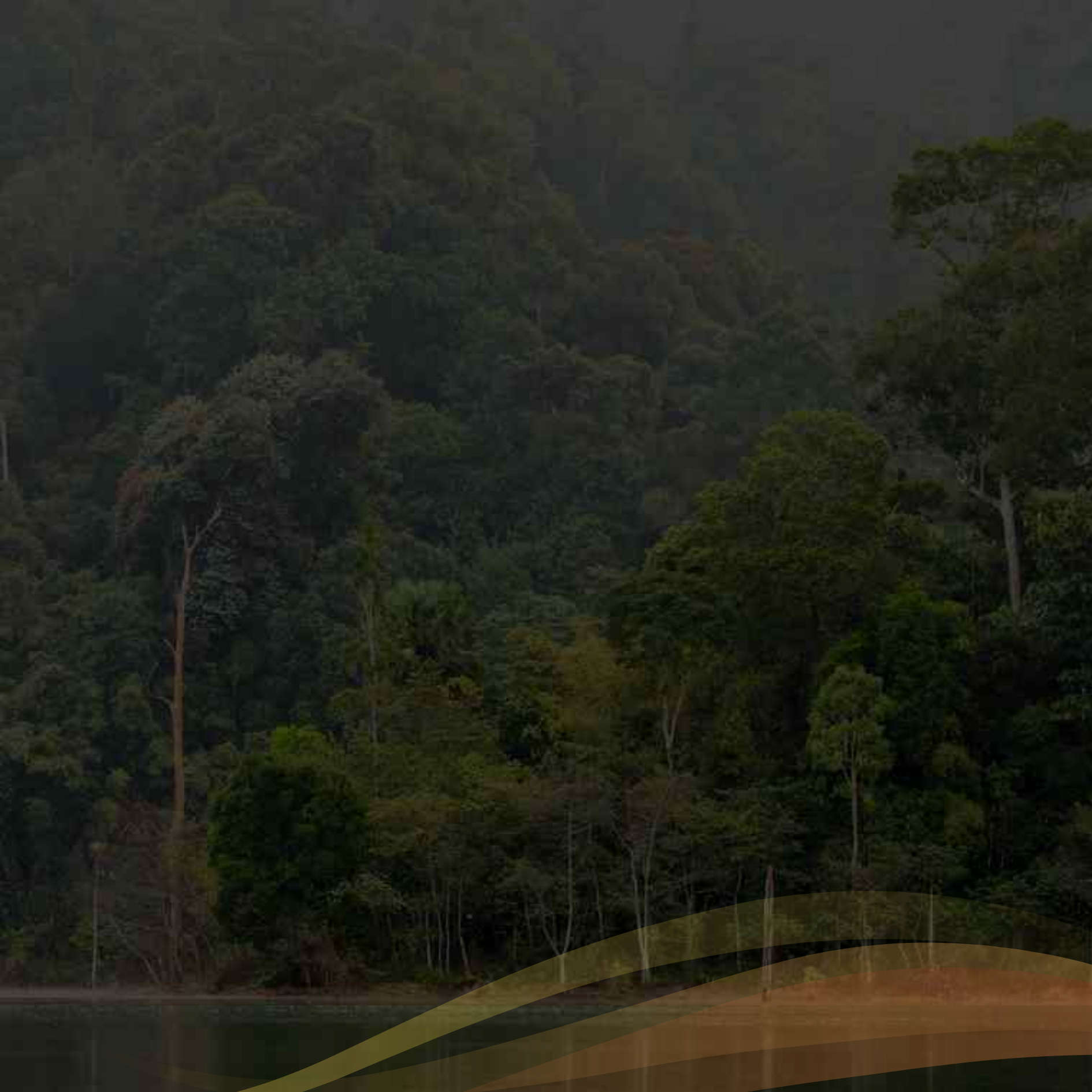
Di kaki Gunung Endut, Desa Babakan Jayawangi, Kecamatan Kalapanunggal, Kabupaten Sukabumi, KTH Nurul Amal telah berkembang menjadi penggerak ekonomi desa berbasis pengelolaan hutan. Didirikan pada tahun 2005 dan dipimpin oleh Ujang Hamdan, S.P., KTH ini beranggotakan 51 orang, dengan hampir sepertiga diantaranya perempuan, yang secara aktif terlibat dalam berbagai kegiatan usaha dan pengelolaan kelompok.

Penguatan ekonomi kelompok dilakukan melalui pengembangan berbagai usaha berbasis potensi lokal. Sejak tahun 2004, KTH Nurul Amal menumbuhkan sejumlah UMKM desa, mulai dari produk pangan seperti Kue Basah Babakan Jayawangi, Bakso Mas Bro, Dapur Ummah dan Hano Coconut Jelly, hingga produk kerajinan R Three L Jewelry. Pengembangan usaha tersebut menjadikan KTH tidak hanya berperan sebagai pengelola kawasan hutan, tetapi juga sebagai pusat kegiatan ekonomi kreatif di tingkat desa.



Dari upaya tersebut, nilai transaksi ekonomi KTH Nurul Amal menunjukkan peningkatan yang sangat signifikan. Pada tahun 2025, nilai transaksi ekonomi kelompok tercatat mencapai Rp.685 juta, melonjak tajam dibandingkan sekitar tiga tahun sebelumnya yang masih berada dikisaran Rp.47 juta. Peningkatan ini mencerminkan semakin kuatnya tata kelola usaha kelompok, meningkatnya partisipasi anggota serta semakin luasnya akses pasar bagi produk-produk KTH.

Selain mendorong pertumbuhan ekonomi, KTH Nurul Amal tetap menjaga keseimbangan dengan kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan. Berbagai prestasi diraih, mulai dari penyelenggaraan festival produk lokal, penguatan pasar rakyat, hingga penetapan sebagai KTH kelas Utama dan lokasi pemagangan Wanawiyata Widyakarya. Puncak capaian tersebut ditandai dengan diraihnya penghargaan Terbaik III Nasional Wana Lestari Tahun 2025, yang menegaskan bahwa peningkatan nilai transaksi ekonomi dapat berjalan seiring dengan pengelolaan hutan yang berkelanjutan.





Indikator Kinerja Kegiatan yang mendukung IKP Badan P2SDM

**PERSENTASE PENINGKATAN KELOMPOK TANI HUTAN  
YANG MENGHASILKAN KOMODITI PENDUKUNG CADANGAN  
PANGAN, ENERGI DAN AIR**

## Capaian Kinerja

Indikator kinerja “Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air” mencerminkan komitmen Badan P2SDM khususnya Pusat Penyuluhan Kehutanan untuk memperkuat peran KTH sebagai ujung tombak dalam pengelolaan sumber daya alam yang produktif dan berkelanjutan. Indikator ini mengukur peningkatan KTH dalam memulai, memperluas, atau meningkatkan produksi komoditi unggulan berbasis kehutanan yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga berkontribusi terhadap ketahanan pangan, energi, dan air di tingkat tapak. Melalui indikator ini, kita dapat secara objektif menilai efektivitas pendampingan, pelatihan, dan pemberdayaan yang dilakukan di lapangan.

Pengembangan komoditi produktif oleh KTH menjadi sangat relevan dan strategis karena sejalan dengan agenda pembangunan nasional yang digaungkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Prioritas pada ketahanan pangan, energi, dan air merupakan bagian dari program Astacita yang menempatkan swasembada pangan, energi, dan air sebagai cita kedua dalam visi pembangunan Indonesia 2025–2029, yang bertujuan untuk memperkuat kemandirian bangsa melalui optimalisasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal.

KTH yang mampu menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan seperti tanaman pangan kehutanan, hasil hutan bukan kayu, agroforestri dan komoditi yang mendukung layanan ekosistem air dan energi akan memperkuat struktur ekonomi di pedesaan sekaligus mendukung target pemerintahan untuk mencapai swasembada pangan dan ketahanan nasional.

Target indikator kinerja Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi, dan air pada Tahun 2025 ditetapkan sebesar 10%, dengan baseline sebanyak 4.000 KTH. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2025, capaian indikator ini berhasil sebesar 10%, yang berarti terdapat 400 KTH tambahan yang telah terlibat secara aktif dalam menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi, dan air. Capaian ini merupakan hasil dari berbagai intervensi yang dilakukan secara terintegrasi, antara lain:



Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, air, dan energi pada Tahun 2025 tercatat sebesar 10 persen. Capaian ini menunjukkan adanya perkembangan awal dalam upaya mendorong peran aktif KTH dalam pengelolaan hutan yang produktif dan berkelanjutan, khususnya dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi.

Indikator kinerja ini merupakan indikator baru yang mulai diterapkan pada periode Rencana Strategis Badan P2SDM Tahun 2025–2029, sehingga capaian kinerja Tahun 2025 belum dapat dibandingkan dengan capaian pada tahun-tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian pada tahun pertama implementasi ini memberikan gambaran awal yang positif terhadap efektivitas pendekatan pemberdayaan dan pendampingan yang dilakukan kepada KTH.

Capaian tersebut tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pendampingan dan fasilitasi yang telah dilakukan kepada KTH. Melalui peningkatan kapasitas teknis, kelembagaan, serta pemahaman terhadap potensi komoditas strategis, KTH mulai terlibat dalam produksi komoditas yang tidak hanya bernilai ekonomi, tetapi juga memiliki fungsi ekologis dan strategis bagi masyarakat sekitar kawasan hutan. Sebagai tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra), capaian 10 persen ini menjadi indikasi awal yang positif. Hasil ini mencerminkan bahwa arah kebijakan dan program yang dilaksanakan telah berada pada jalur yang tepat, meskipun masih diperlukan penguatan dan perluasan cakupan intervensi agar dampaknya dapat dirasakan lebih luas.

Ke depan, capaian ini akan terus ditingkatkan melalui penguatan pendampingan yang lebih terarah dan berkelanjutan, pengembangan akses terhadap permodalan dan pasar, serta penguatan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan. Dengan upaya tersebut, diharapkan peran Kelompok Tani Hutan dalam mendukung cadangan pangan, air, dan energi dapat semakin optimal pada tahun-tahun selanjutnya.

## Output dan Outcome

Output dari capaian peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, air, dan energi pada Tahun 2025 ditandai dengan bertambahnya jumlah KTH yang mulai mengembangkan dan memproduksi komoditas strategis berbasis potensi hutan. Selain itu, terlaksananya kegiatan pendampingan, fasilitasi teknis, serta penguatan kelembagaan KTH menjadi hasil langsung dari pelaksanaan program yang mendukung capaian indikator kinerja ini.

Output tersebut selanjutnya memberikan outcome berupa meningkatnya peran dan kontribusi KTH dalam mendukung ketahanan pangan, air, dan energi di tingkat lokal. KTH tidak hanya berfungsi sebagai pelaku usaha, tetapi juga sebagai mitra dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Dampak lainnya adalah mulai terbentuknya kemandirian ekonomi kelompok melalui diversifikasi usaha berbasis komoditas hutan serta meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga fungsi ekologis hutan.



## Efektivitas

IKK yang mendukung IKP Badan P2SDM, yaitu Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air merupakan IKK baru yang ditetapkan pada tahun Renstra 2025-2029. Di tahun pertama ini, capaian indikator ini berhasil mencapai target sebesar 10%, yang berarti terdapat 400 KTH tambahan yang telah terlibat secara aktif dalam menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi, dan air.

Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air ini belum dapat dianalisis efektivitasnya secara year-on-year, hal ini disebabkan indikator-indikator tersebut baru ditetapkan dan diukur pada Tahun 2025, sehingga belum tersedia data pembandingan dari tahun sebelumnya.

## Efisiensi

Pencapaian kinerja Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air terhadap target sebesar 100% diperoleh dengan penggunaan sumber daya anggaran sebesar Rp.726.892.425,- atau sebesar 99,96% dari pagu anggaran Rp.727.187.000,-, sehingga berdasarkan hasil perhitungan, nilai efisiensi kinerja berada pada angka 1,00 dengan kategori efisien. Secara nyata, Pusat Penyuluhan Kehutanan melakukan upaya-upaya efisiensi dalam melakukan intervensi terhadap Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air seperti seperti pelaksanaan bimbingan teknis dan sosialisasi dengan metode daring ataupun hybrid, serta penggunaan aplikasi SIMLUH untuk menyeleksi calon penerima dan juga googledrive untuk pengumpulan usulan proposal fasilitasi yang didampingi oleh penyuluh kehutanan secara online dan real time.

## Kendala

Pencapaian kinerja yang baik pada indikator Persentase peningkatan Kelompok Tani Hutan (KTH) yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dihadapi selama pelaksanaan kegiatan. Beberapa kendala utama yang memengaruhi pencapaian ini antara lain:

1. Terbatasnya kapasitas teknis dan manajerial KTH
2. Keterbatasan akses terhadap permodalan dan teknologi
3. Belum optimalnya jaringan pemasaran komoditas yang dihasilkan.
4. Selain itu, faktor eksternal seperti kondisi iklim, aksesibilitas wilayah, dan tingkat adopsi inovasi oleh masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri.

## Upaya Tindak Lanjut

Beberapa langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yang dihadapi tersebut diantaranya:

1. Diperlukan penguatan pendampingan yang lebih intensif dan terarah, baik melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia KTH maupun penguatan kelembagaan dan kemitraan.
2. Pemerintah dan pemangku kepentingan terkait perlu mendorong sinergi lintas sektor, memfasilitasi akses pembiayaan dan teknologi, serta membuka peluang pasar bagi produk KTH. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan persentase peningkatan KTH yang menghasilkan komoditas pendukung cadangan pangan, air, dan energi dapat terus meningkat secara signifikan pada tahun-tahun selanjutnya.

Selain kegiatan yang mempunyai target RO sebagaimana tabel di atas, dalam mendukung tercapainya Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dalam Mendukung Kemandirian Desa, Pusat Penyuluhan Kehutanan juga menyelenggarakan kegiatan peningkatan kapasitas ketenagaan penyuluhan dengan output di luar target RO, antara lain:

- **Penilaian dan Temu Karya Teladan Wana Lestari**, yaitu menetapkan perorangan, kelompok dan aparaturnya pemerintah atas kontribusinya dalam pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan termasuk memberdayakan masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan melalui mekanisme penilaian berjenjang dari UPT-Provinsi-Nasional dengan kriteria yang telah ditentukan. Sebanyak 57 orang teladan yang terdiri dari orang teladan yang berasal dari Penyuluh Kehutanan PNS 6 orang, Kelompok Tani Hutan (KTH) 6 orang, Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat (PKSM) 6 orang, Pengelola KHDTK 1 orang, Kelompok Pecinta Alam (KPA) 6 orang, Kader Konservasi Alam (KKA) 6 orang, Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) 3 orang, Pemegang Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa (HD) 3 orang, Pengelola Hutan Adat (HA) 2 orang, Polisi Kehutanan (Polhut) 3 orang, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) 3 orang, Manggala Agni 3 orang, Masyarakat Peduli Api 3 orang, Pemegang Izin Industri Primer Hasil Hutan Kayu/Prima Wana Mitra sebanyak 9 orang menerima penghargaan dari Menteri Kehutanan Bapak Raja Juli Antoni. Penyerahan penghargaan dilakukan di Auditorium Dr. Soedjarwo, Gedung Manggala Wanabakti pada tanggal 15 Agustus 2024. Lomba Wana Lestari diselenggarakan sebagai suatu metode penyuluhan yang dilaksanakan untuk menilai prestasi perorangan, kelompok atau aparaturnya pemerintah dalam memberdayakan dan mengubah perilaku masyarakat di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.







- **Metode Penyuluhan dan Media Penyebaran Informasi.** Metode Penyuluhan yang digunakan pada tahun 2025, antara lain: Bimbingan Teknis, Talkshow dan Pameran.

1. **Bimbingan Teknis** dengan tema “Bimbingan Teknis Operasionalisasi Aplikasi Wana Lestari” diselenggarakan pada hari Jumat, 16 Mei 2025.
2. **Talkshow** dilaksanakan 3 kali secara faktual pada tahun 2025 di 3 provinsi. (1) Talkshow dengan tema “Nilai Transaksi Ekonomi KTH: Dari Hutan Untuk Kehidupan” pada tanggal 6 Oktober 2025 di Hotel Aston, Kota Palu, Sulawesi Tengah, (2) Talkshow dengan tema “Produk KTH Terjaga, Usaha Semakin Berdaya” dilaksanakan di Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat, dan (3) Talkshow dengan tema “Produk KTH Terjaga, Usaha Semakin Berjaya” dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2025 di KTH Rahayu Jaya, Desa Labuan Batu VII, Kecamatan Labuan Ratu, Kabupaten Lampung Timur, Provinsi Lampung.
3. **Pameran** dilaksanakan paralel dengan Pameran Foresta Showbiz dilaksanakan pada tanggal 18 s.d. 21 Desember 2025 di Kampus IPB Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.



Media Penyebaran Informasi pada tahun 2025 dilakukan melalui media elektronik, yaitu media sosial Pusat Penyuluhan Kehutanan, website Pusat Penyuluhan dan aplikasi tematik, diantaranya SIMLUH, Cyber Extension, Forestamart, dan aplikasi Wana Lestari serta Youtube.

#### Media Sosial Pusat Penyuluhan Kehutanan



#### Aplikasi SIMLUH



<http://simluh.bp2sdm.kehutanan.go.id>

#### YouTube

Pusat Penyuluhan Kehutanan mempublikasikan sebanyak 10 video di YouTube selama tahun 2025.



- **Penerbitan Majalah Kenari.** Kenari merupakan media penyuluhan kehutanan berbentuk majalah yang berisi informasi, pengetahuan tentang kegiatan penyuluhan kehutanan serta pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan secara umum baik di level nasional maupun di tingkat tapak. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai media informasi bagi penyuluh kehutanan dalam melaksanakan penyuluhan di lapangan dengan tujuan memudahkan Penyuluh Kehutanan/Pendamping dalam mengakses bahan materi penyuluhan dan menyediakan sarana bagi Penyuluh Kehutanan untuk menuangkan ide/tulisan. Majalah Penyuluh Kehutanan Kenari Edisi Tahun 2025 terbit awal November dan telah didistribusikan ke seluruh Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, UPT Kementerian Kehutanan yang memiliki JF Penyuluh Kehutanan dan telah disampaikan ke seluruh Eselon I, II, SAM dan TAM Kementerian Kehutanan. Kenari juga dapat diunduh di cyber extension dengan tautan <https://cybex.bp2sdm.kehutanan.go.id/>.



- **Musyawarah Nasional Penyuluhan Kehutanan.**

Kegiatan Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 telah terlaksana dengan tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk mendukung Pembangunan Kehutanan” pada tanggal 21 Oktober 2025 di Hotel Santika Premiere Slipi, Jakarta. Munas dibuka secara resmi oleh Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BP2SDM) Kehutanan. Kegiatan ini diikuti oleh 160 orang peserta yang hadir faktual berasal dari Pejabat Eselon I Lingkup Kementerian Kehutanan, Pejabat Eselon II lingkup BP2SDM Kementerian Kehutanan, Kepala Dinas Kehutanan/LHK Provinsi, Kepala UPT Lingkup BP2SDM Kementerian Kehutanan, Ketua Umum dan Sekjen DPP IPKINDO dan Ketua Forum Penyuluh Kehutanan Swadaya Masyarakat Indonesia. Selain itu kegiatan ini juga ditayangkan secara online melalui zoom dan live youtube yang diikuti kurang lebih 700 peserta yang berasal dari penyuluh kehutanan di seluruh Indonesia. Dalam kesempatan ini Bapak Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, memberikan Penghargaan kepada 10 Provinsi Terbaik Penyelenggaraan Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025.



- **Rapat Koordinasi Pengembangan Tugas dan Fungsi Balai P2SDM (Rakor Tusi)** dilaksanakan pada tanggal 18-19 September 2025 bertempat di Artotel Mangkuluhur, Jakarta. Kegiatan Rakor Tusi diselenggarakan sebagai wadah konsolidasi dan sinkronisasi strategi pembangunan kehutanan. Kegiatan ini diikuti oleh 40 orang yang berasal dari Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM, Pejabat Eselon II lingkup BP2SDM, Pejabat Eselon III Lingkup BP2SDM, Kepala Balai P2SDM, Kepala Seksi Penyuluhan pada Balai P2SDM dan Koordinator Penyuluh Kehutanan pada Balai P2SDM. Selama pelaksanaan, kegiatan diisi dengan paparan dari pimpinan unit eselon II BP2SDM yang memaparkan kebijakan, strategi, dan rencana tindak lanjut sesuai bidang tugasnya. Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan komitmen bersama sebagai bentuk kesepahaman dan komitmen pelaksanaan Tusi Balai di lapangan, serta ditutup dengan pembekalan teknis penyuluhan kehutanan pada malam hari. Seluruh rangkaian menghasilkan kesepakatan penting yang menjadi pijakan bersama dalam memperkuat peran Balai P2SDM sebagai simpul pelaksanaan program penyuluhan dan pengembangan SDM kehutanan di tingkat wilayah.



## **Pemberian BOP Kepada Penyuluh Kehutanan ASN**

Penyaluran Biaya Operasional Penyuluh (BOP) kepada Penyuluh Kehutanan Pegawai Negeri Sipil Tahun Anggaran 2025 merupakan bentuk dukungan nyata Pusat Penyuluhan Kehutanan dalam menjamin keberlangsungan pelaksanaan tugas penyuluhan kehutanan di lapangan. BOP dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan kunjungan, pendampingan, dan bimbingan kepada Pelaku Utama dan Pelaku Usaha kehutanan, khususnya Kelompok Tani Hutan (KTH).

Kegiatan pendampingan tersebut secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian:

- Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan, dan
- Peningkatan jumlah KTH yang dilibatkan secara aktif dalam pengelolaan hutan.

Pada Tahun 2025, BOP disalurkan kepada 2.477 orang Penyuluh Kehutanan PNS di UPT Kementerian Kehutanan dan Dinas Kehutanan/Lingkungan Hidup Provinsi dengan Total penyaluran sebesar Rp.6.287.600.000,-. Jumlah tersebut mencerminkan cakupan pendampingan yang luas, mengingat setiap penyuluh memiliki wilayah dan KTH binaan masing-masing. Tingginya tingkat pelaporan BOP menunjukkan bahwa aktivitas pendampingan di lapangan berjalan secara konsisten, yang berimplikasi positif terhadap capaian luasan wilayah pendampingan dan jumlah KTH yang dilibatkan. Kinerja UPT dan Dinas dalam hal kegiatan pendampingan penyuluhan kepada KTH dalam hal pengelolaan hutan memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian indikator kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan, khususnya dalam mendukung kemandirian desa berbasis pengelolaan hutan dan penguatan kelembagaan KTH.

Secara keseluruhan, penyaluran BOP Tahun Anggaran 2025 memiliki keterkaitan yang kuat dan signifikan dengan capaian IKK Luasan Wilayah Pendampingan Penyuluh Kehutanan dan IKK Kelompok Tani Hutan yang Dilibatkan dalam Pengelolaan Hutan. BOP tidak hanya berfungsi sebagai dukungan operasional, tetapi juga menjadi instrumen pengendali kinerja melalui kewajiban pelaporan berbasis sistem. Tingginya tingkat kepatuhan pelaporan di sebagian besar UPT dan Dinas menunjukkan bahwa BOP efektif dalam mendorong aktivitas pendampingan lapangan, meningkatkan keterlibatan KTH, serta memperluas cakupan wilayah pendampingan dalam rangka mendukung kemandirian desa.



## 3.5. Realisasi Anggaran

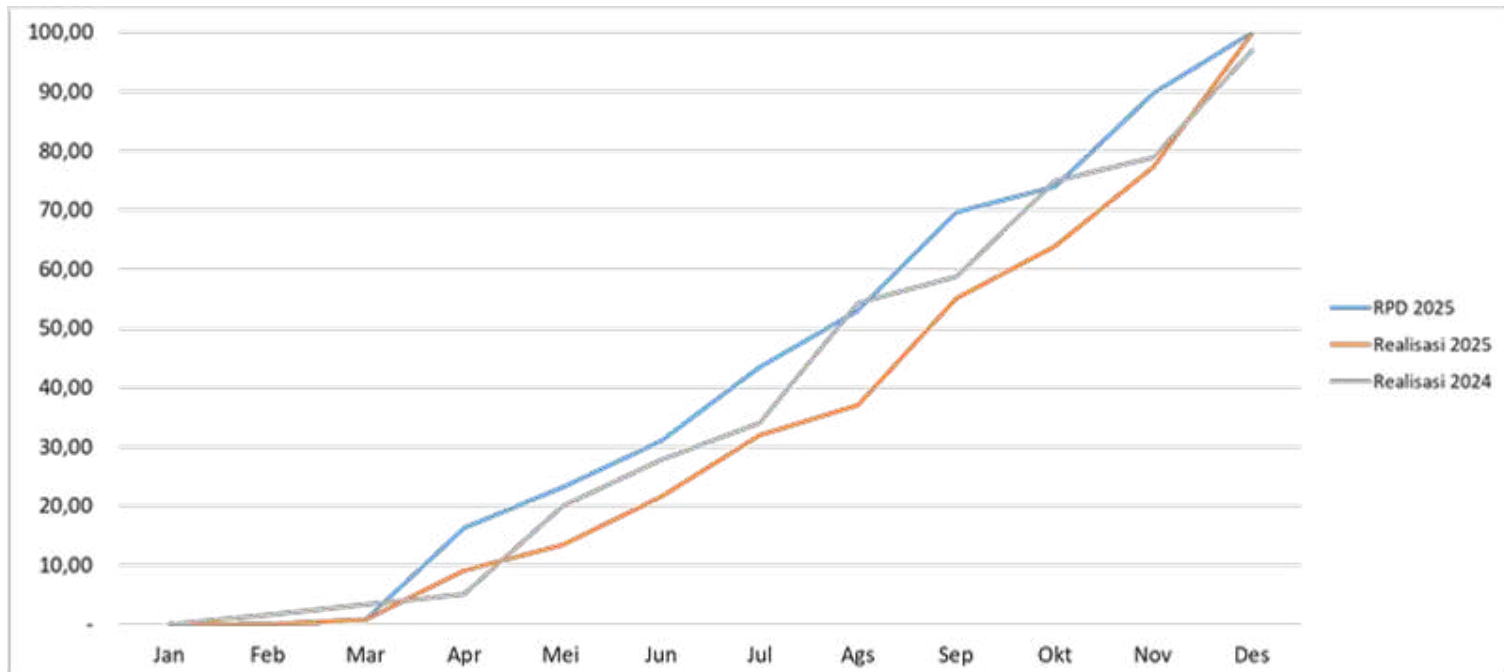
### Tren Realisasi Anggaran

Berdasarkan aplikasi OMSPAN (perekaman tanggal 13 Januari 2026), pada Tahun 2025 Pusat Penyuluhan Kehutanan dapat merealisasikan anggaran sebesar Rp.13.649.835.973,- (99,85%) dari pagu anggaran sebesar Rp.13.669.847.000,-. Apabila dibandingkan dengan pagu efektif (tanpa memperhitungkan blokir) maka sesungguhnya realisasi anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 mencapai 99,85%. Dibandingkan dengan realisasi pada Tahun sebelumnya yang sebesar 96,92%, maka terdapat peningkatan kinerja YoY sebesar 2,93%. Perbandingan tren realisasi anggaran Tahun 2025 dan Tahun 2024 sebagaimana gambar berikut

99,85%

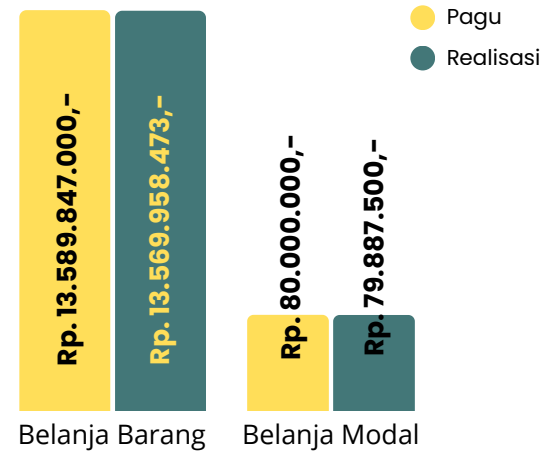
Realisasi  
Anggaran  
Tahun 2025

Tetap konsisten  
memenuhi  
prognosis yang  
telah  
direncanakan



## Realisasi Anggaran per Jenis Belanja

Proporsi anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan pada Tahun 2025 didominasi oleh belanja barang sebesar Rp. 13.589.847.000,- dan belanja modal sebesar Rp 80.000.000,-. Sehingga pada akhir Desember 2025, realisasi anggaran menunjukkan kinerja yang baik, dengan tingkat serapan belanja barang mencapai 99,85% serta belanja modal sebesar 99,86%.



## Realisasi Anggaran per Rincian Output

Realisasi anggaran Pusat Penyuluhan per rincian output dapat dilihat secara rinci sebagaimana tabel berikut ini. Pagu anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan yang tertulis di dalam DIPA Satker Kantor Pusat BP2SDM adalah Rp.13.669.847.000,-.

Rincian Output	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Penyuluh Kehutanan pendamping KTH yang ditingkatkan kapasitasnya	4.649.457.000	4.643.211.229	99,87
Peningkatan Kemandirian Usaha Kelompok Tani Hutan (KTH)	727.187.000	726.892.425	99,96
Layanan BMN	2.000.000	2.000.000	100,00
Layanan Umum	7.051.740.000	7.039.054.225	99,82
Layanan Perkantoran	1.159.463.000	1.158.800.594	99,94
Layanan Sarana Internal	80.000.000	79.877.500	99,85
<b>Total</b>	<b>13.669.847.000</b>	<b>13.649.835.973</b>	<b>99,85</b>

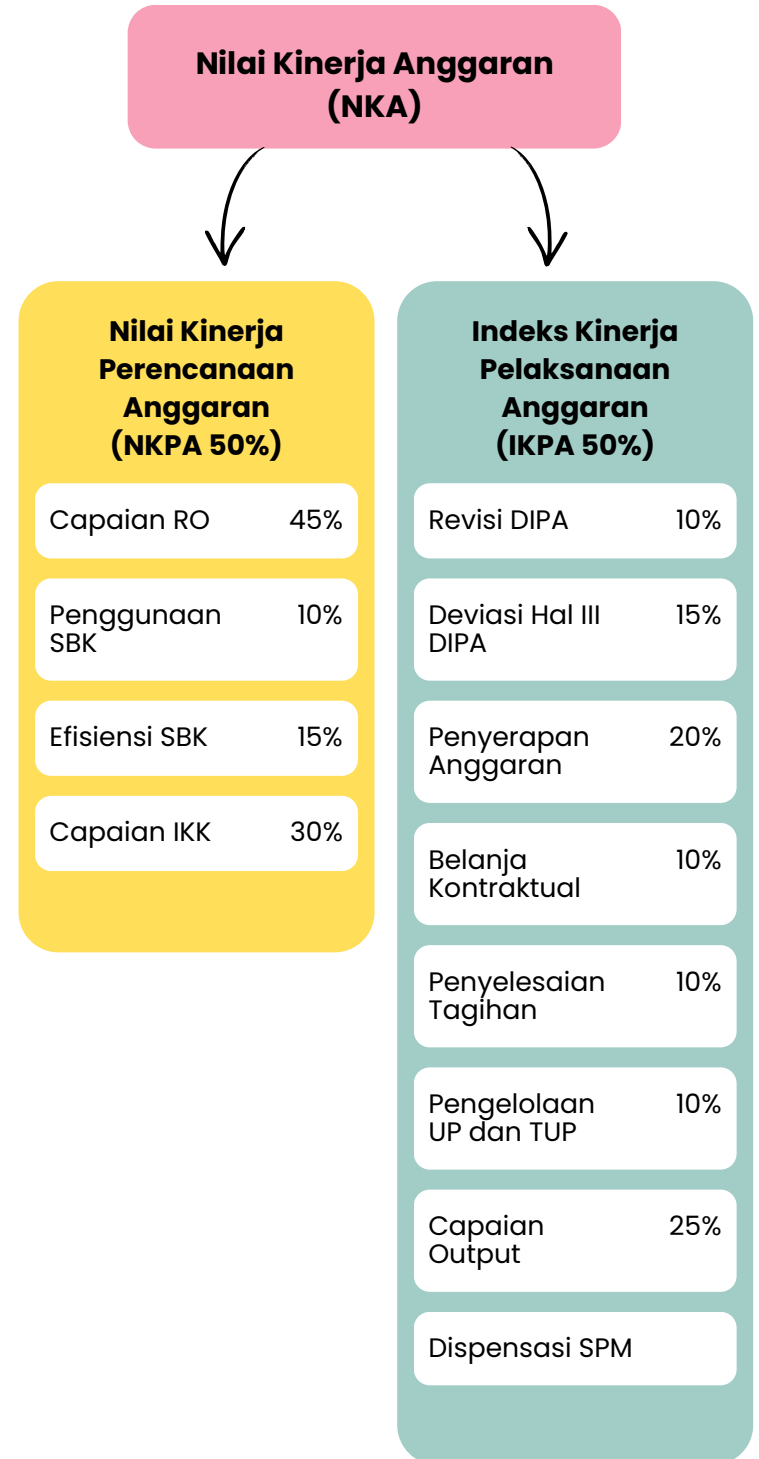
## Nilai Kinerja Anggaran (NKA)

Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang digunakan untuk menilai sejauh mana keselarasan antara perencanaan anggaran dan pelaksanaannya. Penilaian NKA bertujuan untuk memastikan bahwa anggaran direncanakan secara tepat, dilaksanakan secara tertib dan efisien, serta mampu menghasilkan output yang sesuai dengan target dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara optimal.

Secara konstruksi, NKA disusun dari dua komponen utama yang memiliki bobot seimbang, masing-masing sebesar 50 persen. Komponen pertama adalah Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA), yang menggambarkan kualitas perencanaan anggaran dan diperoleh melalui aplikasi SMART. Komponen ini menilai sejauh mana perencanaan kinerja telah dirumuskan secara realistis, konsisten, dan efisien. NKPA diukur melalui beberapa unsur, yaitu Capaian Rincian Output, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK), efisiensi SBK, serta capaian Indikator Kinerja Program (IKP).

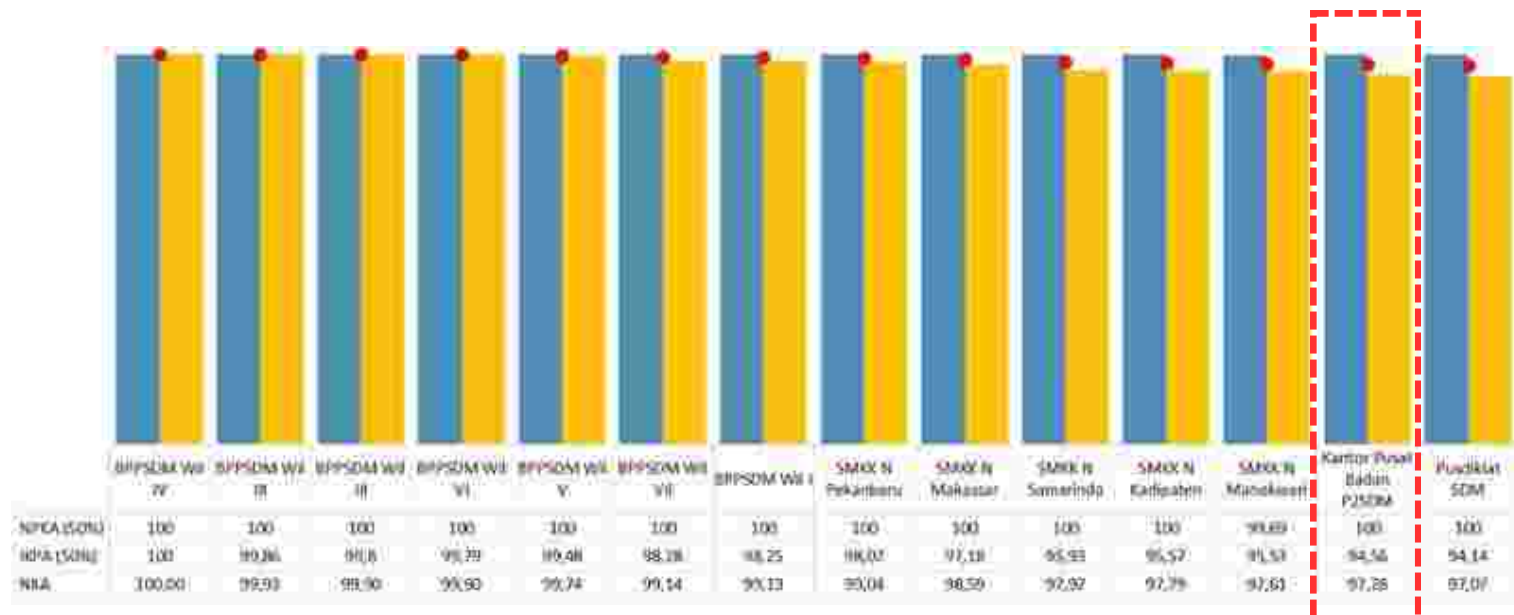
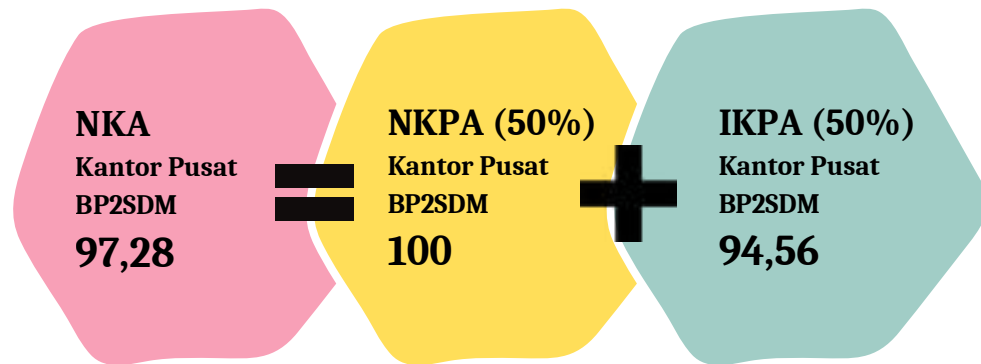
Komponen kedua adalah Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA), yang diperoleh dari aplikasi OMSPAN dan mencerminkan kualitas pelaksanaan anggaran selama tahun berjalan. IKPA menilai kepatuhan, ketepatan, dan efektivitas pelaksanaan anggaran melalui beberapa indikator, antara lain pengelolaan revisi DIPA, deviasi Halaman III DIPA, tingkat penyerapan anggaran, belanja kontraktual, penyelesaian tagihan, pengelolaan Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP), capaian output, serta pengelolaan dispensasi SPM.

Pengaturan mengenai penghitungan dan penilaian NKA ini mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Anggaran. Dengan komposisi tersebut, NKA menjadi instrumen yang komprehensif untuk menilai kinerja anggaran secara menyeluruh, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan, sekaligus menjadi dasar perbaikan kualitas pengelolaan anggaran di tahun berikutnya.



Pada Tahun 2025, Pusat Penyuluhan Kehutanan yang merupakan Sub Satker pada Kantor Pusat Badan P2SDM berhasil memperoleh Nilai Kinerja Anggaran sebesar 97,28 poin. Capaian tersebut tersusun dari Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA) sebesar 100 poin dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) sebesar 94,56 poin. Apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yang mencapai 98,84 poin, NKA Tahun 2025 mengalami sedikit penurunan. Penurunan ini terutama dipengaruhi oleh melemahnya capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran, khususnya pada komponen Deviasi Halaman III DIPA. Oleh karena itu, pada Tahun 2026 komponen tersebut perlu mendapatkan perhatian dan pengendalian yang lebih intensif agar potensi deviasi dapat diminimalkan sejak awal pelaksanaan anggaran.

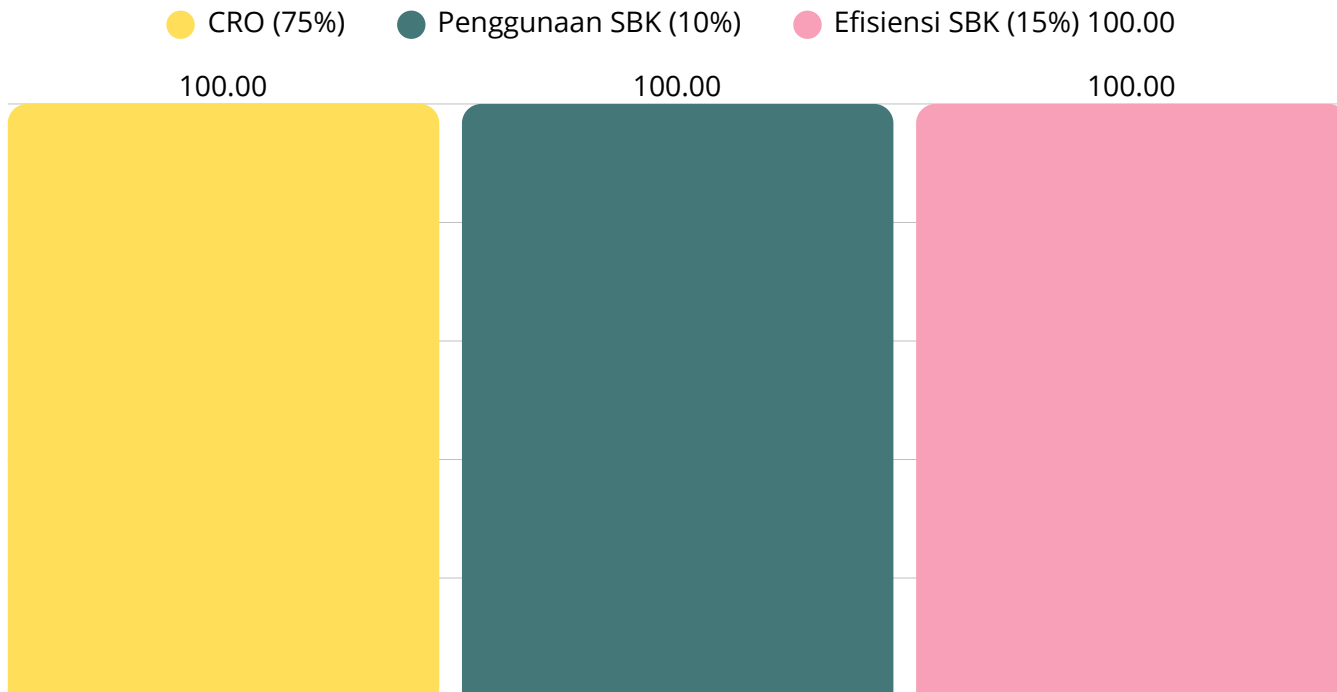
Guna mendukung pencapaian dan peningkatan NKA secara berkelanjutan, Pusat Penyuluhan Kehutanan telah melakukan sejumlah langkah strategis, antara lain melaksanakan monitoring capaian NKA secara berkala setiap bulan, menyusun dan menyampaikan rekomendasi perbaikan kepada satker, serta memfasilitasi pemaparan praktik baik dan kiat-kiat peningkatan NKA oleh satker dengan capaian tertinggi sebagai pembelajaran bagi satker lainnya.



## Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran (NKPA)

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran adalah ukuran yang digunakan untuk menilai kualitas proses perencanaan anggaran suatu instansi atau organisasi dalam mengalokasikan sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Penilaian ini mencerminkan sejauh mana perencanaan anggaran memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap regulasi. Indikator pada Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran meliputi capaian rincian output (CRO) dengan bobot 75%, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 10% dan Efisiensi Standar Biaya Keluaran (SBK) dengan bobot 15%.

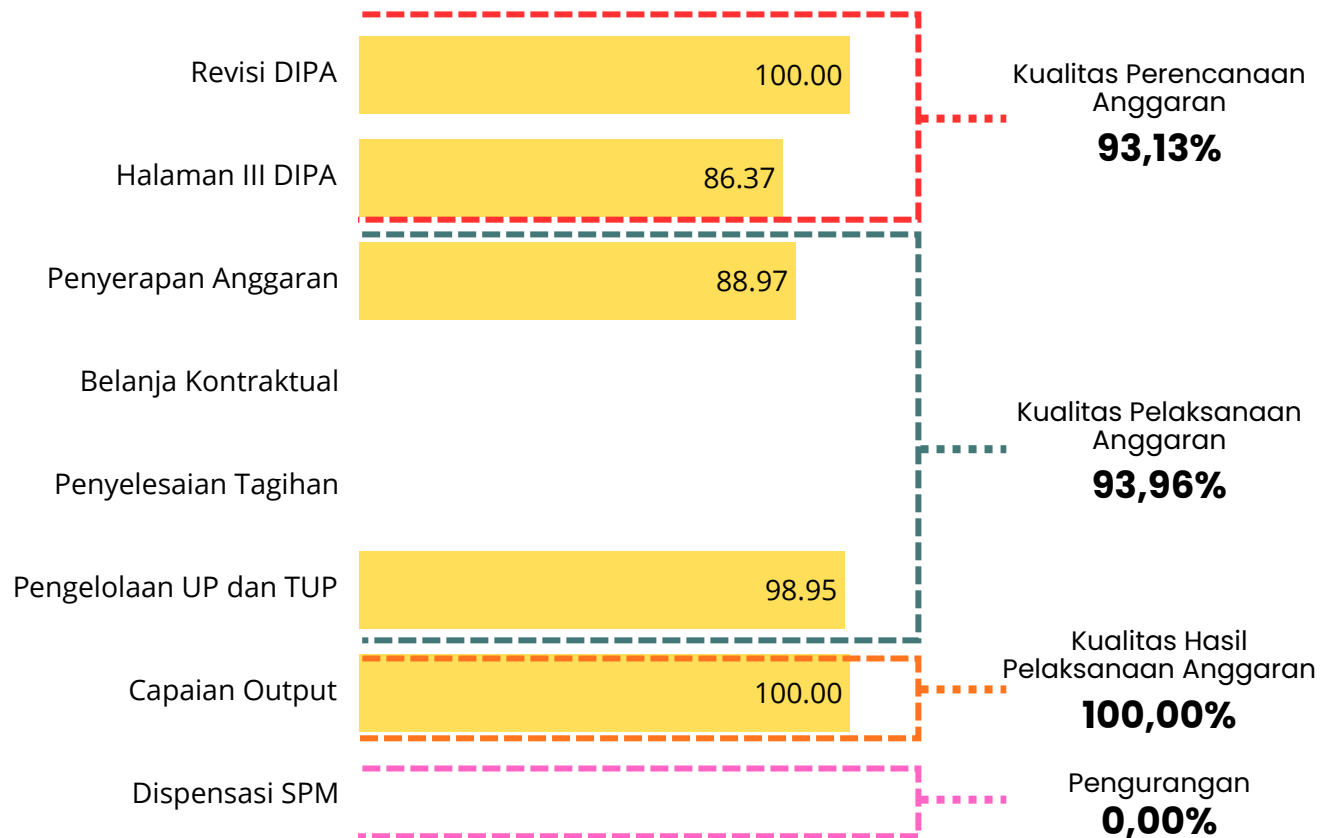
**Nilai NKPA  
Kantor Pusat  
Badan P2SDM** **100,00**



# Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah alat yang digunakan oleh Kementerian Keuangan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran pada Satuan Kerja (Satker) dan Kementerian/Lembaga (K/L). Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari 8 indikator yang terbagi dalam 3 bagian dengan masing-masing memiliki bobot yang berbeda. Penilaian IKPA terdiri dari Kualitas Perencanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA dan Halaman III DIPA, Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu Penyerapan Anggaran, Belanja Kontraktual, Penyelesaian Tagihan, dan Pengelolaan UP TUP; dan Kualitas Pelaksanaan Anggaran yaitu Capaian Output. Indikator Dispensasi SPM menjadi pengurang yang perhitungannya secara kumulatif di Bulan Desember.

**Nilai IKPA  
Kantor Pusat  
Badan P2SDM** **94,56**



**BAB 4**

*Penutup*



# Penutup

Laporan Kinerja Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam mendukung pencapaian sasaran program Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta tujuan pembangunan kehutanan. Tahun 2025 merupakan tahun awal pelaksanaan Rencana Strategis Pusat Penyuluhan Kehutanan Tahun 2025–2029, sehingga capaian kinerja pada tahun ini menjadi fondasi penting bagi pencapaian target kinerja pada periode perencanaan berikutnya.

Meskipun pelaksanaan program dan kegiatan pada Tahun 2025 dihadapkan pada berbagai dinamika, termasuk penyesuaian kebijakan dan keterbatasan anggaran, Pusat Penyuluhan Kehutanan tetap berupaya melaksanakan kegiatan secara efektif dan akuntabel. Berbagai capaian yang telah diraih mencerminkan komitmen organisasi dalam meningkatkan kualitas penyuluhan kehutanan, memperkuat pendampingan Kelompok Tani Hutan, serta mendukung pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hasil evaluasi kinerja yang disajikan dalam laporan ini menunjukkan adanya ruang perbaikan yang perlu ditindaklanjuti, baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, maupun

pengukuran kinerja. Oleh karena itu, Pusat Penyuluhan Kehutanan berkomitmen untuk menjadikan hasil evaluasi tersebut sebagai dasar dalam melakukan penyempurnaan strategi, penguatan sinergi lintas unit, serta peningkatan efektivitas pemanfaatan sumber daya pada tahun-tahun selanjutnya.

Akhir kata, diharapkan Laporan Kinerja ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi para pemangku kepentingan, sekaligus menjadi instrumen evaluasi dan pembelajaran dalam upaya mewujudkan penyuluhan kehutanan yang adaptif, profesional, dan berdaya saing. Dengan dukungan seluruh pihak, Pusat Penyuluhan Kehutanan optimis dapat meningkatkan kinerja dan kontribusinya secara berkelanjutan dalam mendukung pembangunan kehutanan nasional pada periode Renstra 2025–2029.

A man wearing a camouflage bucket hat, a dark long-sleeved shirt, and khaki pants is leaning over a wooden tray filled with soil. He appears to be working with the soil, possibly sifting or preparing it. The background is a lush tropical environment with various green plants and trees. The word "Lampiran" is overlaid in a large, yellow, cursive font across the center of the image.

# *Lampiran*

Lampiran 1. Perjanjian Kinerja  
Awal Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (*outcome*). Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.

**Jabatan** : Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Drh. Indra Eksploitasia, M.Si

**Jabatan** : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 25 April 2025

Pihak Kedua,

Drh. Indra Eksploitasia, M.Si  
NIP. 19660618-199203 2 002

Pihak Pertama,

Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.  
NIP. 19691016-199403 1 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN**

No. (1)	Kegiatan (2)	Sasaran Kegiatan (3)	Indikator Kinerja (4)	Target (5)
1.	Peningkatan Penyuluhan Kehutanan	Meningkatnya penyuluhan kehutanan untuk peningkatan kemandirian desa di sekitar hutan dan pengembangan hutan lestari	Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa	25.000 Hektar
2.			Jumlah kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengelolaan hutan	4.400 Kelompok
3.	Dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya BP2SDM	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup BP2SDM yang berdampak terhadap birokrasi pemerintahan yang profesional dan berintegritas	Nilai Maturitas SPIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	3,3 Poin
4.		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel dan efisien di lingkup BP2SDM	Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	72 Poin

**Klarifikasi rincian output (KRO)/Rincian Output (RO)**

Klarifikasi Rincian Output (KRO)	Rincian Output (RO)	Target RO	Anggaran (Rp)
BDC - Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat	Penyuluh kehutanan pendamping KTH yang ditingkatkan kapasitasnya	1.250 Orang	4.649.457.000
QDD - Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat	Peningkatan Kemandirian Usaha Kelompok Tani Hutan (KTH)	20 Kelompok Masyarakat	727.187.000
EBA- Layanan Dukungan Manajemen Internal	Layanan Umum	1 Layanan	7.093.740.000
	Layanan Parkastorah	1 Layanan	1.211.163.000
EBB-Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Layanan Sarana Internal	1 Paket	80.000.000
<b>TOTAL</b>			<b>13.721.547.000</b>

Jakarta, 25 April 2025

Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia



Drh. Indra Exploitasia, M.Si  
NIP. 19660618 199203 2 002

Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan



Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si  
NIP. 19691016 199403 1 001

**RENCANA AKSI TAHUN 2025  
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN**

Indikator Kinerja	Rincian Output Pendukung	Anggaran (Rp)	Target Awal	Satuan	Target Output Bulanan												
					Jan	Feb	Mar	April	Mei	Juni	Juli	Ag	Sep	Ok	Nov	Dek	
Luaran wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemandirian desa	Penyuluh kehutanan pendamping KTH yang ditingkatkan kapasitasnya	4.643.457.000	25.000	Hektar	-	-	-	-	-	-	2500	5000	10000	15000	20000	25000	
Jumlah kelompok tani hutan yang dilibatkan dalam pengalihan hutan	Peningkatan kemandirian Usaha Kelompok Tani Hutan (KTH)	777.167.000	4.000	kelompok	-	-	-	-	-	-	600	1200	1800	2400	3000	4000	
Nilai Mutu/itas SPK Pusat Penyuluhan Kehutanan	Layanan Farkamhutan	7.053.749.000	8,3	#on	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3
	Layanan SIKAM Internal	1.215.161.000															
Nilai SARIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	Layanan Umum	80.000.000	72	#on	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72

Jakarta, 25 April 2025  
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan

  
 Wahjdi Rudianto, S.Pi., M.Si.  
 NIP. 19691016 199403 1 001

Lampiran 2. Perjanjian Kinerja  
Akhir Tahun 2025



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome), Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

**Nama** : Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.

**Jabatan** : Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan

selanjutnya disebut pihak pertama

**Nama** : Drh. Indra Exploitasia, M.Si.

**Jabatan** : Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dalam upaya tersebut, pihak pertama akan melaksanakan pengawasan secara berjenjang kepada bawahan sejak perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan. Pencapaian target kinerja tersebut merupakan bagian tidak terpisahkan atas tanggung jawab jabatan.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

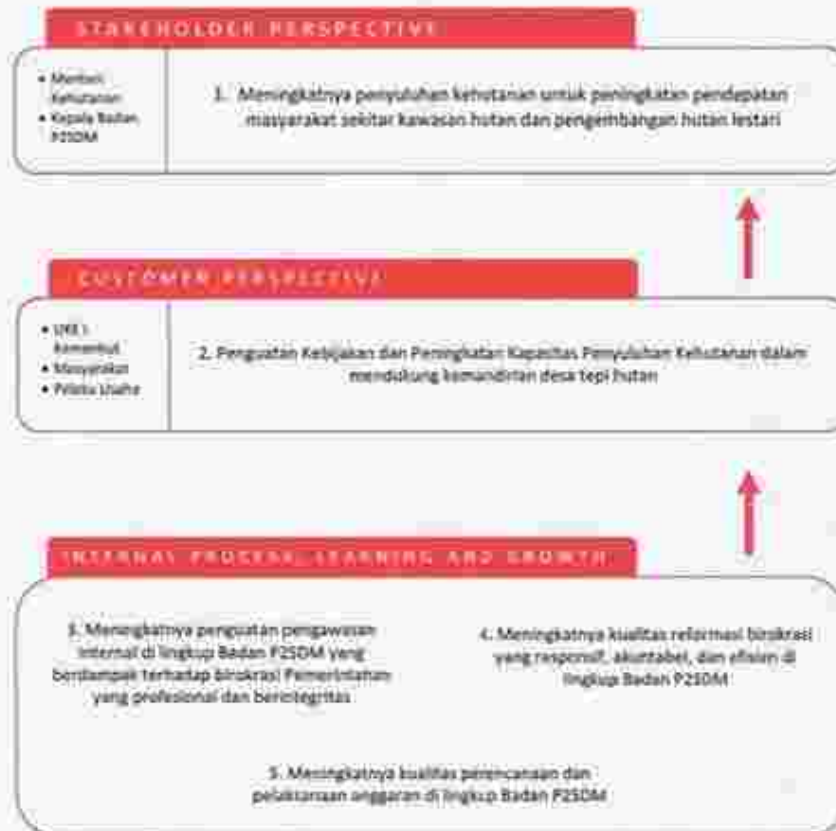
Drh. Indra Exploitasia, M.Si  
NIP. 19660618 199203 2 002

Jakarta, 18 Desember 2025

Pihak Pertama,

Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si  
NIP. 19691016 199403 1 001

## PETA STRATEGI



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN**

**STAKEHOLDER PERSPECTIVE**

No.	Kategori Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	2	3	4
1	Meningkatnya penyuluhan kebutuhan untuk peningkatan pendapatan masyarakat sekitar kawasan hutan dan pengembangan hutan lestari	1.1 Produk hasil hutan bukan kayu (HHBK) dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan : baru tersedia di Tahun 2025</b>	-
		1.2 Produk hasil hutan kayu dari Kelompok Tani Hutan <b>Catatan : baru tersedia di Tahun 2025</b>	-
		1.3 Luasan wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam meningkatkan kemandirian desa	25.000 Hektar
		1.4 Kelompok tani hutan yang dibina dalam pengelolaan hutan	4.800 Kelompok
		1.5 Nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan*	Rp. 700 Miliar
		1.6 Persentase peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air*	10 Persen

\*KK yang mencakup KP Badan P2SDM

**CUSTOMER PERSPECTIVE**

No.	Kategori	Indikator Kinerja Output	Target
1	2	3	4
2	Penguatan Kebijakan dan Peningkatan Kapasitas Penyuluhan Kehutanan dalam mendukung kemandirian desa tepi hutan	2.1 Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan HHBK <b>Catatan : baru tersedia di Tahun 2025</b>	-
		2.2 Peningkatan produktivitas bagi kelompok tani hutan yang menghasilkan Hasil Hutan Kayu <b>Catatan : baru tersedia di Tahun 2025</b>	-
		2.3 Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang meningkat kapasitasnya	1.350 Orang
		2.4 Peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)	30 Kelompok Masyarakat


**INTERNAL PROCESS, LEARNING AND GROWTH**

No.	Kategori	Indikator	Target
1	2	3	4
3	Meningkatnya penguatan pengawasan internal di lingkup Badan P2SDM yang berdampak terhadap sinergis pemerintah yang profesional dan berintegritas	3.1 Nilai Matumbax SPI Pusat Penyuluhan Kehutanan	3,30 poin
4	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi yang responsif, akuntabel, dan efisien di lingkup Badan P2SDM	4.1 Nilai SAKIP Pusat Penyuluhan Kehutanan	72 poin
5	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran di lingkup Badan P2SDM	5.1 Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan	82,5 Poin

**ANGGARAN PROGRAM DAN RINCIAN OUTPUT TAHUN 2025  
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN**

No.	Program/Kegiatan/Rincian Output	Anggaran
	<b>Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan</b>	
	<i>Kegiatan Peningkatan Penyuluhan Kehutanan</i>	
1.	Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang meningkatkan kapasitasnya	Rp 4.646.457.000,-
2.	Peningkatan kemandirian usaha kelompok tani hutan (KTH)	Rp 727.187.000,-
	<b>Program Dukungan Manajemen</b>	
	<i>Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya</i>	
	<i>Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM</i>	
3.	Layanan Umum	Rp 7.051.740.000,-
4.	Layanan Perkantoran	Rp 1.159.463.000,-
5.	Layanan Sarana Internal	Rp 80.000.000,-
6.	Layanan BMN	Rp 2.000.000,-
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 13.669.847.000,-</b>

Kepala Badan Penyuluhan dan  
Pengembangan Sumber Daya Manusia

  
Drh. Indra Eksploktasia, M.Si  
NIP. 19660618 199203 2 002

Jakarta, 18 Desember 2025

Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan

  
Wahyu Rudiana, S.Pi., M.Si  
NIP. 19691016 199403 1 001

**RENCANA AKSI TAHUN 2025  
PUSAT PENYULUHAN KEHUTANAN**

Indikator Kinerja	Anggaran (Rp)	Target	Satuan	Target Output Bulanan													
				Jan	Feb	Mar	April	Mei	Jun	Juli	Agst	Sep	Oktr	Nov	Des		
Luas wilayah pendampingan penyuluh kehutanan dalam mendukung kemurahan desa	4.420.457.000	25.000	Hektar	-	-	-	-	-	-	-	2500	5000	10000	15000	20000	25000	
Penyuluh Kehutanan Pendamping KTH yang memiliki kompetensi		1.250	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1250
Jumlah kelompok tani hutan yang dibentuk dalam pengelolaan hutan	727.387.900	4.400	kelompok	-	-	-	-	-	-	-	600	1200	1800	2400	3000	4400	
Pembinaan peningkatan kelompok tani hutan yang menghasilkan komoditi pendukung cadangan pangan, energi dan air*		30	kelompok	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30
Nilai transaksi ekonomi kelompok tani hutan*		700	Milyar Rupiah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	700
Akhir Maturitas SMP Pusat Penyuluhan Kehutanan	6.283.200.000	3,3	Pers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,3
Nilai SMP Pusat Penyuluhan Kehutanan		72	Pers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72
Nilai Kinerja Anggaran Pusat Penyuluhan Kehutanan		82,3	Pers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	82,3

\*RA yang mendukung RP Badan #220M

Jakarta, 18 Desember 2025  
Kepala Pusat Penyuluhan Kehutanan

  
 Wahyu Rudianto, S.Pi., M.Si.  
 NIP. 19691016 199403 1 001





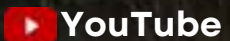


**Badan P2SDM**  
**Kementerian**  
**Kehutanan**



**Instagram &**  
**Facebook**

@pusluhkehutanan



**YouTube**

Pusat Penyuluhan Kehutanan